

**INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
KAMPUS SULAWESI SELATAN**

P-ISSN 2716-0262

E-ISSN 2798-5229

**JURNAL
PALLANGGA PRAJA (JPP)**

Volume 4 Nomor 1 April 2022

DEWAN REDAKSI

Penanggung Jawab	: Murtir Jeddawi
Redaktur	: Muhammad Faisal
Penyunting/Editor	: Umar Nain
Desain Grafis	: Yosar Kardiat
Fotografer	: H. Nashar A. Baso
Sekretariat	: Rusli Razak

Editorial Office:

Gedung Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan
Jl. Je'nemadinging Desa Kampili,
Kecamatan Pallangga, Kab. Gowa
Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia
Telp/fax : 085341977552
Email: pallanggaprajaipdn.ac.id

JURNAL

PALLANGGA PRAJA (JPP)

Volume 4 Nomor 1, April 2022

**Peran Pemerintah dalam Mengembangkan Kota Hijau (*Green Government*)
di Kota Makassar**

Nur Ichsan Amin, Akhir Saleh

**Analisis Hubungan Penguasaan Lahan dan Pola Bagi Hasil
dengan Tingkat Kemiskinan Petani Penggarap**

Abdul Halim, Muhammad Faisal

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Masa Pandemi Covid-19

Aryo Sosiawan

**Pemberdayaan Petani di Desa Mattanete Bua Kabupaten Bone
Provinsi Sulawesi Selatan**

Muhammad Idris Patarai

Organisasi sebagai Arena Kekuasaan Politik

Yosar Kardiat

Dimensi Pengukuran Kualitas Hidup di Beberapa Negara

Jamaruddin, Sudirman

**Kompetensi Kepala Daerah dalam Pelayanan Publik
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan**

Rudi Salam, Sudiarti, Aris Baharuddin, Denok Sunarsi

**Peran Kepemimpinan dalam Birokrasi Pemerintahan
di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan**

Arnas

**Efektivitas Badan Penghubung dalam Memfasilitasi Urusan
Pemerintah Daerah dan Pembangunan Kepada Pemerintah Pusat**

Ruhut Novum S.R Simanullang, Rayhan Ahmad Adimulyo, Satrio Panji Wisesa, Sulistia Wardani, Muhammad Faisal.

**Partisipasi Masyarakat dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Melalui E-Samsat Selama Pandemi Covid-19 di Bapenda Sulawesi Selatan**

Sri Wisdayanti, Muthiah Hurmaniah Burhanuddin, Iswaningsi Rezki Amaliah, Hendrawati Hamid

JURNAL
PALLANGGA PRAJA (JPP)
Volume 4 Nomor 1, April 2022

DAFTAR ISI

Peran Pemerintah dalam Mengembangkan Kota Hijau (<i>Green Government</i>) di Kota Makassar Nur Ichsan Amin, Akhir Saleh	1—9
Analisis Hubungan Penguasaan Lahan dan Pola Bagi Hasil dengan Tingkat Kemiskinan Petani Penggarap Abdul Halim, Muhammad Faisal	11—22
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Masa Pandemi Covid-19 Aryo Sosiawan	23—31
Pemberdayaan Petani di Desa Mattanete Bua Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan Muhammad Idris Patarai	33—43
Organisasi sebagai Arena Kekuasaan Politik Yosar Kardiat	45—50
Dimensi Pengukuran Kualitas Hidup di Beberapa Negara Jamaruddin, Sudirman	51—63
Kompetensi Kepala Daerah dalam Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Rudi Salam, Sudiarti, Aris Baharuddin, Denok Sunarsi	65—77
Peran Kepemimpinan dalam Birokrasi Pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan Arnas	79—88
Efektivitas Badan Penghubung dalam Memfasilitasi Urusan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Kepada Pemerintah Pusat Ruhut Novum S.R Simanullang, Rayhan Ahmad Adimulyo, Satrio Panji Wisesa, Sulistia Wardani, Muhammad Faisal.	89—98
Partisipasi Masyarakat dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Melalui E-Samsat Selama Pandemi Covid-19 di Bapenda Sulawesi Selatan Sri Wisdayanti, Muthiah Hurmaniah Burhanuddin, Iswaningsi Rezki Amaliah, Hendrawati Hamid	99—105

PENGANTAR REDAKSI

WUJUD FUNGSI PEMERINTAHAN

Ketika manusia hidup berdampingan satu sama lain, maka berbagai kepentingan akan saling bertemu. Pertemuan kepentingan antara manusia yang satu dengan yang lain ini, tidak jarang, menimbulkan gesekan ataupun perselisihan. Perselisihan yang ditimbulkan dapat berakibat fatal, apabila tidak ada sebuah sarana untuk mendamaikannya. Perlu sebuah mediator atau fasilitator untuk mempertemukan antar kepentingan yang saling bergesekan tersebut. Tujuannya adalah agar manusia yang saling bersengketa (berselisih) tersebut sama-sama memperoleh keadilan. Langkah awal ini dipahami sebagai sebuah proses untuk menuju sebuah sistem (tatanan) pemerintahan dengan kekuasaan yang ada menjadi instrument pengatur.

Dalam perjalanan kemudian, tatanan pemerintahan dengan kekuasaan yang dimiliki, terdapat fenomena penyalahgunaan kekuasaan (*otoritarian*), maka lahirlah pemerintahan yang berdasar pembatasan (konstitusi) yang kemudian dikenal dengan pemerintahan berdasarkan hukum. Seiring waktu, pemerintahan berdasarkan hukum tidaklah cukup apabila tidak diiringi dengan *evidence based*, kemudian muncullah paradigma pemerintahan berdasarkan hukum yang tertib (*administrative*).

Dengan paradigma terakhir inilah memunculkan varian fungsi pemerintahan yang tidak sekedar menjaga keamanan dan ketertiban serta kepastian hukum tetapi juga pelayanan masyarakat dan kesinambungan pendayagunaan sumber daya, yang dalam terminologi PBB sebagai *Sustainable development goals*. Sebagai kelanjutan dari *Millenium development goals*.

Berdasar alur pemikiran tersebut, pada edisi ini jurnal Pallangga memotret fenomena kekinian dengan kajian teoritik dan hasil penelusuran empiris, antara lain, wujud Peran Pemerintah dalam mengembangkan Kota Hijau di Kota Makassar (Nur Ichsan dan Akhir Saleh). Di sisi lain, Abd Halim dan M. Faisal, memotret masih adanya fenomena lemahnya posisi tawar petani penggarap terhadap pemilik lahan, yang member pengaruh masih munculnya kemiskinan ekstrim di petani penggarap.

Penguatan badan usaha milik desa di masa pandemik oleh Aryo Sosiawan memberikan perspektif perlunya profesionalitas pengelolaan. Demikian halnya, Idris Patarai, model pemberdayaan yang efektif di Desa Mattanete Bua Kabupaten Bone, Sulsel sebagai wujud salah satu fungsi pemerintahan. Sebagai perspektif global, Jamaruddin dan Sudirman, memberikan informasi dan pengetahuan perbandingan mengenai Dimensi Pengukuran kualitas hidup di beberapa Negara, yang sebelumnya Yosar Kardiat mengingatkan eksistensi Organisasi publik sebagai ajang *of political struggling*. Tema klasik namun tetap aktual, Arnas, menganalisis Peran kepemimpinan dalam birokrasi pemerintahan.

Dua tulisan terakhir, yaitu Efektifitas Badan penghubung Dalam Fasilitasi Urusan pemerintahan daerah kepada pemerintah pusat oleh Nindya Praja Ruhut Novum, R, Simanulang, Rayhan Ahmad Sudiro, Satrio Panji Wisesa dan NP. Sulistia Wardani dengan pembimbing Muhamad Faisal (dosen IPDN Sulsel) dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak kendaraan bermotor melalui E – Samsat di era pandemic oleh Nindya praja Sri Wisdayanti, NP. Muthiah Hurmaniah Burhanuddin, NP. Iswaningsi Rezki Amaliah dengan pembimbing Hendrawati Hamid (dosen IPDN Sulsel), melengkapi *empical phenemenom of government function in the reality* . Dengan segala kekurangan, edisi ini setidaknya turut memberikan kontribusi dan informasi pengembangan praktek pemerintahan. Terima kasih,

Murtir jeddawi.

**PERAN PEMERINTAH DALAM MENGEMBANGKAN KOTA HIJAU
(GREEN GOVERNMENT) DI KOTA MAKASSAR**
*THE ROLE OF GOVERNMENT IN DEVELOP A GREEN CITY
(GREEN GOVERNMENT) IN MAKASSAR CITY*

Nur Ichsan Amin, Akhir Saleh

Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan
email; akhir@ipdn.ac.id

ABSTRAK

Mengacu pada undang-undang No, 26 tahun 2009 tentang RTH, idealnya luas ruang terbuka hijau adalah 30% dari jumlah luas wilayah dihitung dari luasan wilayah kota secara keseluruhan, maka tampaknya pemerintah kota Makassar memiliki permasalahan dalam memenuhi tuntutan pengembangan ruang terbuka hijau menuju kota hijau yang diharapkan (Green government), hal itu antara lain ada beberapa asumsi dasar yang menjadi rujukan antara lain tingkat kesadaran masyarakat yang masih sangat rendah untuk melakukan penghijauan secara mandiri dan sukarela, disamping belum adanya penegakan aturan melalui peraturan daerah terkait dengan urgensi penataan penghijauan sebagaimana Perda No.4 tahun 2015 Tentang RTRW Kota Makassar 2015-2035 yang belum dilaksanakan dengan baik, belum lagi salah satu tantangan berat yang dihadapi dalam mewujudkan Makassar sebagai kota Hijau adalah gencarnya pembangunan infra struktur pada beberapa perluasan jalanan, Di sisi lain pembangunan infra struktur juga merupakan suatu tuntutan akan kebutuhan masyarakat, meskipun harus mengorbankan pohon atau bahkan kawasan RTH yang telah ada sebelumnya, baik pada median jalan maupun pada berm jalan bahkan taman kota yang memiliki fungsi sebagai penyangga jalur hijau perkotaan. Dalam kondisi demikian peran pemerintah menjadi sangat dominan dalam menentukan kemana arah pengembangan kota menuju kota hijau yang diidamkan.

Kata Kunci; Kota hijau, Infrastruktur, Peran pemerintah dan masyarakat

ABSTRACT

Referring to Law No. 26 of 2009 concerning green open space, ideally the area of green open space is 30% of the total area calculated from the area of the city as a whole, so it seems that the Makassar city government has problems in meeting the demands of developing green open space towards a green city. What is expected (Green government), there are several basic assumptions that become references, including the level of public awareness that is still very low to carry out reforestation independently and voluntarily, in addition to the absence of enforcement of rules through regional regulations related to the urgency of reforestation arrangements as per the Regional Regulation. No. 4 of 2015 concerning the Makassar City Spatial Plan 2015-2035 which has not been implemented properly, not to mention one of the tough challenges faced in realizing Makassar as a Green city is the incessant development of infrastructure in several road expansions. is a demand for the needs of the community, even though they have to sacrifice trees or even green open spaces that have existed before, both on the median road and on the road and even city parks that have a function as a buffer for urban green lanes. In such conditions, the role of the government becomes very dominant in determining the direction of city development towards the coveted green city.

Keywords; Green city, Infrastructure, Role of government and society

PENDAHULUAN

Seperti dilansir dalam Perda Kota Makassar, bahwa Visi kota ‘Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan, Budaya dan Jasa yang Berorientasi Global, Berwawasan Lingkungan dan Paling Bersahabat, (Perda No 4 tahun 2015).

Berawal dari komitmen itu, tentu pemerintah bertanggung jawab untuk memainkan peran sebagaimana apa yang dikemukakan Sadu Wasistiono (2012: 150) ”Bahwa Semua pejabat pemerintah perlu lebih sadar lingkungan sehingga berbagai kebijakan dan tindakan yang dilakukan senantiasa bersifat pro green dan pro sustainable development, Karena itu peran yang dimaksudkan adalah menjaga kelestarian wilayah untuk selalu menjaga, memelihara dan melestarikan wilayah Negara melalui dua konsep dasar yakni *pro green government dan prosustainable development*. Hal yang senada juga direspon sebagaimana dalam Perda No.4 tahun 2015 pasal 12 angka 3 huruf (e), bahwa “ RTH perlu dilakukan pengendalian untuk pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan “Dalam pernyataan lain sebagaimana dalam Perda tersebut sejumlah klausul yang mengarahkan, memberi petunjuk agar terjadi percepatan pengembangan luas kawasan terbuka Hijau di Kota Makassar antara lain dalam pasal 12 angka (5) huruf (a) menyatakan bahwa “ Strategi peningkatan luas ruang terbuka kota menjadi ruang terbuka hijau yakni dilakukan dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam gerakan Makassar hijau di ruang-ruang terbuka milik publik.

Apa yang dimaksudkan dalam pengembangan kota Makassar menjadi Ruang terbuka hijau tentu diperlukan penjabaran yang lebih kongkrit, lebih massif, terintegrasi dengan berbagai pembangunan lainnya, layaknya sebuah kota yang memiliki gebrakan pembangunan diberbagai bidang. Konsepnya harus terintegrasi dengan perencanaan pembangunan

kota sehingga tidak perlu ada yang terabaikan satu kepentingan, terutama pembangunan RTH harus mampu memberi jaminan terhadap generasi masa kini maupun generasi masa yang akan datang. Atas hal tersebut, Peran pemerintah kota sangat diperlukan guna mengakselerasi tuntutan akan kualitas dan kuantitas luasan ruang terbuka Hijau di Kota Makassar.

Dalam kaitan ini, kualitas kawasan yang akan dikembangkan diharapkan berpengaruh positif terhadap kualitas hidup, oleh karena itu pembangunan berkelanjutan mengandaikan pembangunan kualitas lingkungan secara berkelanjutan (Supardi, 2003 : 223), diharapkan ini diikuti dengan kesadaran yang meningkat sejalan dengan banyaknya informasi yang diserap dan dapat diterima seiring dengan suatu proses pembinaan maupun internalisasi yang dikembangkan oleh setiap individu, kelompok maupun aparat pemerintah itu sendiri. Kini berbagai Pembangunan fisik telah dicapai, sekalipun disisi lain tampak berdampak dengan kerusakan Lingkungan, khususnya terjadinya ancaman terhadap pencemaran, polusi udara, konsep pembangunan yang tidak disertai dengan penyediaan lahan untuk ruang terbuka Hijau, telah menjadi kekhawatiran bagi keselamatan lingkungan yang akhirnya berdampak terhadap keselamatan manusia. maka faktor kunci yang perlu dipahami untuk keberhasilan mengaktualisasikan bagaimana memainkan peran sebagaimana yang dikemukakan Adisasmita (2011: 98), perlunya peran pemerintah dalam merespon konsep membangun melalui:

1. Adanya Komitmen seluruh Jajaran anggota organisasi untuk mewujudkan visi dan Misi
2. Tersedianya dukungan pegawai yang professional.
3. Tersediany Sarana dan Prasarana
4. Adanya Komitmen pemerintah melalui berbagai Kebijakan yang dikeluarkan

Karena itu seluruh point menjadi penting untuk dikaji dan menginternalisasi nilai-nilai agar lahir komitmen seluruh pihak, baik pemerintah, swasta dan masyarakat, bersama-sama memiliki kesadaran untuk secara bersatupadu mewujudkan Green Government di Kota Makassar.

Berkenan dengan harapan itu, Kiranya penting mengutip tulisan dalam jurnal "Nurmardiansyah" yang mengutip pendapat dari Thomas L. Friedman yang mempertegas terkait dengan kata "hijau" dalam bukunya, *Hot, Flat, and Crowded: Why We Need Green Revolution*,

bahwa "hijau" bukan lagi sebuah keisengan, hijau bukan lagi sebuah basa-basi, hijau bukan lagi sesuatu yang dianggap baik, tapi Hijau sekarang adalah cara tumbuh, cara membangun, cara merancang, cara berproduksi, cara bekerja, dan cara hidup agar lebih baik. (<https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/1422/1368>).

Untuk mengejawantahkan semua peran itu tentu diharapkan fungsi-fungsi pemerintah dapat dijalankan dengan baik sebagaimana Labolo melihat kualitas pemerintahan seharusnya bekerja menurut fungsi-fungsinya (2013:31) dan untuk melihat sejauhmana fungsi-fungsi itu dijalankan bukan hanya pada inputnya akan tetapi sejauhmana outputnya yang telah diperoleh dalam pelaksanaan tugas dari fungsi-fungsi itu. Tentu semua itu akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini.

METHODOLOGI

Dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji sejauhmana peran pemerintah dalam memainkan perannya menuju kota dengan Kawasan Ruang terbuka Hijau yang luasannya mencukupi ukuran ideal sebagaimana pedoman menurut peraturan perundang-undangan, dilain sisi tentu perlu dikaji bagaimana permasalahan yang dihadapi, dalam hal ini peneliti akan melakukan penelahan dengan

menggunakan metode kualitatif. dengan melihat berbagai aspek teoritis maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan membandingkan kondisi yang ada dilapangan. Penelitian ini akan melihat pula apa yang menjadi hambatan dan tantangan dilapangan dengan melibatkan stakeholders terkait sehingga semua permasalahan dapat dilihat secara komprehensif dalam kerangka melihat seluruh instrument yang terkait dengan kebijakan pemerintah. Penelitian ini menekankan manusia sebagai instrument, yang diharapkan akan mempermudah penyesuaian dengan kenyataan dilapangan sebagaimana Moelong (2003: 3) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan social secara fundamental bergantung pengamatan pada manusia di kawasannya sendiri serta berhubungan dengan orang tersebut dengan bahasa dan peristilahannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Pengertian Peran sebagaimana dalam teori manajemen pemerintahan dapat dijelaskan, antara lain Menurut Ridwan (2006: 105) dikatakan " peran sebagai konsekwensi atas kewenangan kewenangan yang diperoleh karena perintah atas kewenangan tersebut, atau diperoleh karena mendapat mandat dan terakhir diperoleh berdasarkan kewenangan atribusi." Kewenangan-kewenangan yang dimaksud hanya dapat diperoleh pemerintah yang legitimate melalui penetapan fungsi-fungsi yang ditetapkan undang-undang, hal mana disebutkan oleh Siagian (2001) bahwa Pada Pemerintahan yang legitimate, terdapat tugas dan tanggungjawab yang melekat yakni fungsi pengat uran dan fungsi pelayanan, Kedua fungsi ini kemudian bertambah lagi dengan fungsi fungsi lain seperti Fungsi pembangunan (Riyas Rasyid) dan Fungsi Perlindungan (Undang-Undang No.30 tahun 2014. Berdasarkan fungsi itu kemudian pemerintah

mentransformasi agar fungsi fungsi itu benar benar efektif menjadi nilai yang terwujud dalam tataran tata kelola pemerintahan yang baik. terutama menginspirasi terciptanya suatu ruang yang hijau (*Green Government*) dan pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable development*).

Istilah *Green government* atau pemerintahan hijau biasanya dikaitkan dengan pohon yang subur, atau hamparan rerumputan yang tumbuh hijau dan asri yang selalu memberi kesejukan dalam hal dirasakan dan dipandang mata, Dalam hal ini “Wasistiono” (2012: 162), menjelaskan bahwa “*Green Government* atau pemerintahan hijau. dimaksudkan “ *overnment agencies at state and local levels are working to build sustainable communities*“ atau dengan kata lain pemerintahan hijau adalah lembaga-lembaga pemerintahan pada tingkat nasional maupun subnasional yang bekerja untuk membangun lingkungan hijau yang berkelanjutan. pada bagian lain digambarkan bahwa yang dimaksud dengan *pro sustainable development* (Pembangunan berkelanjutan) adalah fungsi utama pemerintahan hijau dengan bekerja membangun masyarakat yang berkelanjutan. Membangun masyarakat bukan persoalan yang mudah akan tetapi memerlukan suatu desain yang utuh dan komprehensif sehingga selalu berpikir tidak mengorbankan atau mengabaikan kelestarian lingkungan hidup yang menyebabkan daya dukung lingkungan menjadi menurun dan ketersediaan sumberdaya alam yang semakin menipis. Maka Kata Hijau selalu dikonotasikan dengan kesuburan seperti istilah-istilah tentang kota hijau dengan berbagai sebutan yang sejatinya senapas, seperti kota taman (*garden city*), kota berkelanjutan (*sustainable city*), kota berwawasan ekologi (*ecocity*) dan semacamnya.

Sedangkan *Sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan dijelaskan oleh Sumarwoto (2004: 162), sebagai

pembangunan yang memenuhi kebutuhan kita sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. lebih lanjut dijelaskan bahwa Pembangunan berkelanjutan itu adalah sebuah faktor lingkungan yang sangat diperlukan dalam mendukung program pembangunan lingkungan yang hijau, (*Green Government*), Bahwa Pembangunan berkelanjutan didalamnya terdapat beberapa faktor yang diperlukan dalam mendukung pembangunan tsb. yakni, meliputi:

1. Terpeliharanya proses ekologi yang esensial,
2. Tersedianya sumberdaya yang cukup,
3. Lingkungan social budaya dan ekonomi yang sesuai.

Ketiga hal tersebut tidak saja memberi dampak terhadap pembangunan, dalam arti memberi perlindungan terhadap kebutuhan manusia, sebagaimana proses Fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan hijau yang menghasilkan gas oksigen (O₂), gas oksigen inilah sangat esensial dalam kehidupan manusia dan makhluk lain yang sustainable, Tanpa oksigen dalam waktu yang singkat manusia akan mati, itulah sebabnya dalam Setiono (2007: 54) menyebutkan “Dengan fotosintesisnya tumbuhan menurunkan kadar CO₂ dan memproduksi O₂ sehingga secara populer taman disebut paru-paru kota “.

Dalam kaitan ini pula, mengutip pendapat Rosana, (Jurnal Kelola Volume 1/2018) bahwa ada 6 sasaran pembangunan yang berkelanjutan.“

- a. Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi (*intergenerational equity*) yang berarti bahwa pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumberdaya alam yang

replaceable dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang unreplaceable

- b. Safeguarding atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang.
- c. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan antar generasi.
- d. Mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang (inter temporal).
- e. Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi.
- f. Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya.

Dengan demikian tidak dapat dihindari, perlunya pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan maupun dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan, khususnya dalam kerangka memelihara lingkungan hidup

sebagai basis kehidupan yang perlu dijaga kelestarian dan pemeliharaannya.

Target Luas RTH yang ingin dicapai.

Kota Makassar terdiri dari 15 Kecamatan dengan luas 175,77 Km². Masalah lingkungan, sebagai isu hangat dan menjadi perbincangan baik dikalangan masyarakat maupun dikalangan pejabat publik, hal mana terkait dengan berbagai kebijakan yang langsung dengan masalah perkotaan seperti pengembangan wilayah pemukiman, pengembangan infra struktur perkotaan, pelebaran jalan dan peningkatan jalan diberbagai sudut kota, semuanya secara linear akan berpengaruh kepada persoalan lingkungan hidup dan secara spesifik berpengaruh terhadap urgensi pengembangan ruang terbuka hijau di kota Makassar. Hal itu sejalan dengan tuntutan Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana dalam pasal 30 yang menginginkan pembagian proporsional ruang terbuka hijau 20 % wilayah public dan 10 % wilayah Privat, atas dasar perhitungan itu kota makassar masih jauh yang diharapkan, yang kini baru pada 7.48 % (DLH Kota Makassar, 2021) Adapun kondisi eksisting RTH Kota Makassar th 2020 dapat dilihat betapa masih menjadi tantangan yang sangat berat untuk mencapai target sebagaimana diamanatkan Undang-Undang. Adapun kondisi saat ini dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1 Rekapitulasi kondisi Eksisting Ruang Terbuka Hijau Kota Makassar Tahun 2020

No.	Kecamatan	Hutan kota (ha)	Jalur Hijau (Ha)	Lapangan (Ha)	Taman (H)	Pemukaman (Ha)	Bakau (Ha)	Sempadan (Ha)	Luas RTH 2020 (Ha)	Prosentase
1	Biringkanaya	60.68	13.05	74.53	68.09	12.75	10.10	0	239.20	1,36
2	Bontoala	0	0,45	0	5.29	1.20	0	0	6.94	0.04
3	Makassar	0	8,15	0.29	3.96	1.93	0	0.01	14.34	0.08
4	Mamajang	0	0.32	0.26	2.83	4.44	0	0.35	8.19	0.05
5	Manggala	0	2,18	13.90	10.19	37.05	0	4.70	68.02	0.39
6	Mariso	0,54	1,95	5.63	2.80	0	0	0	10.92	0.06
7	Panakkukang	0	10,31	21.06	16.08	13.40	1.10	0	79.84	0.45
8	Rappocini	0	7,67	11.80	7.69	2.14	0	0	20.30	0.17
9	Tallo	0	4,40	4.40	13,87	13.80	364,06	0	400.66	2.28
10	Tamalanrea	601,75	16,17	16,17	12.99	5.31	34.62	74.53	220.96	1.26
11	Tamalate	0,76	6,43	19.30	14.37	5.07	0	161.83	207.74	1.18
12	Ujungpandang	0	4,17	8.46	3.57	0	0	0	16.20	0.09
13	Ujung Tanah	0	4,34	2.76	1.59	0	0	0	8.69	0.05
14	Wajo	0	1,63	0.02	0.85	0.04	0	0	2.53	0.01
15	Kep. Sangkarrang	0	0	0.39	0.32	0.31	0	0	1.02	0.01
Jumlah		141.8	81,2	178.5	164.5	97.4	0	241.4	1.315	7.48

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Thn. 2021.

Dengan kondisi eksisting Ruang terbuka Hijau seluas 7,48 % dari luas wilayah kota Makassar merupakan suatu cakupan luas yang masih sangat jauh dari luas yang idealnya, tentu ini adalah tantangan bagi Pemerintah Kota Makassar khususnya dinas Lingkungan hidup yang harus membuat strategi kebijakan dan pengaturan yang realible sehingga kondisi yang diinginkan dapat tercapai sesuai tuntutan sebagaimana amanah peraturan perundang-undangan.

Tantangan dalam mewujudkan “Green Government”

Dengan mengacu pada permasalahan yang ingin diteliti adalah bagaimana peran pemerintah dalam menjalin kerjasama dan sinergitas antar stakeholders dan Instansi pelaksana dalam mewujudkan komitmen bersama untuk mengembangkan kota Makassar menjadi kota hijau yang asri dan lestari dengan pemamfaatan ruang yang serasi, selaras dan berkesinambungan. Dengan melihat berbagai permasalahan dalam menjalankan fungsi-

fungsi baik fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, maka pada penelitian ini terdapat masalah antara lain:

1. Walaupun kebijakan disektor ekologis dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan dari stakeholders yang secara fungsional memiliki tanggung jawab, tapi tidak dilakukan atas dasar kesadaran dan komitmen “sense of belonging” selaku pengambil kebijakan, hal itu diasumsikan banyaknya keputusan pemerintah Kota yang dianggap berpotensi melemahkan konsep pengembangan RTH antara lain: Proyek pembangunan dalam kota dilakukan tanpa political will yang mengikutkan konsep ruang terbuka hijau secara integrative dengan proyek, misalnya pengawasan terhadap pengembang perumahan tanpa terlebih dahulu mengedepankan penghijauan lingkungan, Menurut “Ilham Landahing” staf pada Dinas Tata Ruang Makassar, mengatakan; Bahwa Pembangunan proyek Infrastruktur selama ini walaupun

telah dilakukan kordinasi melalui telahan ekologis yang mendalam oleh instansi lintas sektoral namun tidak ditindak lanjuti pelaksanaannya dengan baik “,

2. Adanya pembiaran terhadap perubahan alih fungsi lahan RTH menjadi lahan komersial untuk kepentingan pribadi/ golongan tertentu . antara lain Terdapat taman kota yang sangat strategis, lahan diubah menjadi fasilitas ekonomi yang dikelola oleh swasta antara lain Taman Tello, Kecamatan Panakukang, Taman Pualam diubah menjadi fasilitas public dengan fungsi yang berbeda .Taman Sultan Hasanuddin diubah dan ditambah bangunan fisik untuk keperluan lain, padahal dalam pasal 16 Perda No.3 tahun 2014 disebutkan“

Setiap orang yang tidak menaati rencana penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang terbuka hijau dipidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah)

Pangenaan sanksi yang demikian belum pernah dilakukan sebagaimana dikemukakan kepala seksi Pengendalian ruang terbuka hijau Ir.Novi Narilla, Msi ketika wawancara dalam mengonfirmasi hal tersebut pada bulan Mei 2021 “kami belum pernah melakukan proses sampai ke pengadilan terhadap pelanggaran menyangkut pengendalian RTH di Kota Makassar.“ Memang biasanya pelanggaran Perda hanya dikenakan proses dalam bentuk tindak pidana ringan, namun hal ini tidak pernah dilakukan

Tantangan dalam Mewujudkan “*Sustainable Development* “

Salah satu tuntutan dalam pemamfaatan sumberdaya alam adalah perlunya memelihara kelangsungan sumberdaya alam sebagaimana

disebutkan oleh Sumarwoto, (2004:161) bahwa: faktor lingkungan yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan ialah 1) Terpeliharnya proses ekologi yang esensial.2) Tersedianya sumberdaya yang cukup dan 3) Lingkungan social budaya dan ekonomi yang sesuai.

Bahwa ketiga faktor tersebut akan berdampak terhadap pembangunan dan juga akan mengalami dampak dari pembangunan itu sendiri. hal inilah yang perlu dijaga dalam terselenggaranya pembangunan berbasis lingkungan hidup.

Berdasarkan kajian sebagaimana hasil analisis dokumen akuntabilitas kinerja DLH Kota Makassar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Salah satu keseimbangan ekologis yang dapat mempengaruhi tatanan infrastruktur adalah proyeksi dengan Laju pertumbuhan penduduk Kota Makassar, salah satunya adalah hasil sensus penduduk tahun 2020, menunjukkan kenaikan jumlah penduduk dari sensus penduduk kota Makassar sebelumnya tahun 2010, tercatat sebanyak 1.339.374 jiwa, kini hasil sensus penduduk tahun 2020 menjadi 755.968 laki-laki dan 770.709 perempuan atau 1.526.677 jiwa, sehingga selisih jumlah penduduk berada pada angka 187.303 jiwa. Ini menandakan adanya pergeseran Pertambahan penduduk yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kelahiran maupun banyaknya penduduk urban dari berbagai daerah, dan akan berdampak terhadap kebutuhan infrastruktur yang berpotensi mempengaruhi bergesernya pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau di Kota Makassar, Selain itu banyak pergeseran pemukiman, perumahan dan kebutuhan infrastruktur sarana transportasi sebagai akibat kebutuhan yang linear seiring dengan pertumbuhan volume kendaraan di jalan, dan seterusnya. Atas hal-hal

tersebut maka seluruh komponen dan stakeholders terkait maupun pejabat public harus secara bersama-sama dan terpadu, hendaknya menyusun strategi menghadapi perubahan dengan menghitung, bagaimana menghadapi satu priode pada masa berikutnya sehingga tetap terpelihara keseimbangan proses ekologis, sumberdaya yang terjaga dan lingkungan social budaya dan ekonomi yang kondusif. Untuk itu point (2) berikut suatu analisa dalam perpektif ketersediaan kebutuhan seiring dengan perubahan lingkungan.

2. Bahwa Kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Makassar, jika dianalisis dengan menggunakan Pendekatan Ekologis dan kependudukan, Menurut Syamsu rijal dalam Jurnal “Hutan dan Masyarakat Vol. III No. 1 Mei 2008, 001-110, diakses 17 mei 2020“, yang menjelaskan bahwa;

Berdasarkan pada kemampuan tanaman dalam menyerap CO₂. Setiap luasan 1 (satu) ha mempunyai kemampuan dalam menyerap CO₂ yang dihasilkan oleh manusia sebanyak 2000 orang atau dengan kata lain bahwa setiap orang memerlukan 5 m² ruang terbuka hijau.

Lalu bagaimana dengan Kota Makassar yang kini sudah memiliki jumlah penduduk 1.526.677 jiwa (sebagaimana punt. 1 di atas). Dengan dasar perhitungan itu, berarti Makassar membutuhkan jumlah luasan RTH sekitar 763.339 Ha, sementara Makassar saat ini baru memiliki luasan RTH = 1.350 Ha, artinya masih jauh dari angka ideal. Bandingkan sensus penduduk sepuluh tahun lalu dikaitkan dengan Kebutuhan RTH dengan jumlah penduduk 1.339.374 jiwa. Membutuhkan luasan RTH 699,687 Ha, artinya 10 tahun yang lalu walaupun tidak ada penambahan penduduk, maka luasan RTH Kota Makassar yang ada sekarang belum juga mencapai luasan IDEAL, apalagi jika dibanding dengan jumlah

penduduk sekarang.

Dengan demikian sungguh jauh dari harapan keseimbangan ekologis yang setara perkembangan jumlah penduduk dengan penambahan luasan RTH. Dengan perkembangan yang demikian bagaimana mungkin memberi yang terbaik terhadap prinsip pembangunan “*Sustainable development*“ berwawasan ekologis.

3. Dalam jurnal KELOLA Vol.1 No.1 tahun 2018, sebagaimana “Rosana“ menyatakan bahwa ada beberapa instrumen pengendalian terhadap perubahan lingkungan. Salah satunya Instrumen dimaksud adalah perlunya analisis mengenai dampak Lingkungan. Namun yang menjadi persoalan adalah Izin analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) sudah dicabut melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri no.19 tahun 2017 tentang pencabutan permendagri no. 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah. Artinya bahwa apa yang dilakukan sebelumnya dengan mengaitkan kepentingan izin bagi pengusaha dengan berbagai dampak terhadap lingkungan tidak lagi diperlukan. maka berdasarkan PP 24 tahun 2018, Tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, Artinya semua kepentingan mengenai dampak Lingkungan dilakukan pada awal perencanaan sebuah pembangunan, atau dengan kata lain otonomisasi daerah dibidang pengendalian dampak lingkungan hidup telah tergerus dengan adanya Permendagri tersebut.

KESIMPULAN

Luas Kawasan Hijau Kota Makassar saat ini baru mencapai 7,48 % dari total luas wilayah Kota Makassar; 175,77 km², suatu capaian prosentase yang masih sangat rendah, progress kemajuan capaian RTH dalam kurun 10 tahun terakhir jika dikaitkan dengan perimbangan jumlah penduduk hanya menambah 0,80% atau dibulatkan menjadi 1% saja, sehingga menunjukkan peran pemerintah dan partisi-pasi masyarakat dalam mengakselerasi pemba-ngunan yang berkelanjutan masih perlu ditingkatkan.

Peran Pemerintah dalam fungsi pengaturan, dan pelayanan publik khususnya mendukung konsep “*Green Government*” melalui Pembangunan dibidang pengembangan Kawasan Hijau, masih terbatas pada peran Kordinasi disektor perencanaan, namun belum menunjukkan peran otorisasi yang kuat masing-masing Instansi, baik dalam implementasi anggaran pembangunan maupun peran dalam pengawasan dan pengendalian pembangunan .

Alih fungsi lahan masih sering terjadi yang sebelumnya merupakan kawasan hijau perkotaan , kemudian berubah menjadi fungsi ekonomi, hal mana sangat kontra produktif dengan konsep perencanaan pembangunan yang berwawasan ekologis, walaupun hal itu dipahami bertujuan untuk meningkatkan mutu pencapaian pembangunan ekonomi wilayah, tetapi dilain pihak seharusnya dibutuhkan mindset terhadap pengaruh aktivitas pemba-ngunan pada sumberdaya dan proses alam lingkungan yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo, *Manajemen Pemerintahan Daerah (Jakarta)* 2011. Graha Ilmu.
Labolo, Muhadam, *Memahami Ilmu Pemerintahan, suatu kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*, 2013, PT. Raja Grafindo Persada.
Nurmardiansyah, Eko: *Konsep Hijau: Penerapan Green Constitution Dan*

Green Legislation Dalam Rangka Eco-Democracy. (Jurnal Veritas et justitia Unpar; vol.1 No.1 , 2015)

- Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, 2006, PT Raja Grafindo Persada .
Rijal, Syamsu, *Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar tahun 2017*, Jurnal “ Hutan dan Masyarakat Vol. III No. 1 Mei 2008, 001-110,
Rasyid, Riyas, *Makna Pemerintahan, Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan*, 1996, PT. Yarsif Watampone.
Rosana, Mira: *kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Indonesia*; jurnal KELOLA Vol.1 No.1 tahun 2018, Univ. Pasundan
Siagian, SP, *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*, 2001, PT Rineka Cipta
Setiono, Kusdwiratri, *dkk, Kualitas Hidup Dalam Perspektif Perubahan Lingkungan Global*, 2007, Alumni Bandung
Soemarwoto, Otto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, 2004, Jambatan Jakarta
Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*, 2011, Pustaka Peljar.
Supardi, Imam, *Lingkungan Hidup & Kelestariannya*, 2003, PT. Alumni .
Wasistiono, Sadu, *Pengantar Ekologi Pemerintahan*, 2013, IPDN Press Jatinangor

Dokumentasi/Peraturan Perundang-Undangan.

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 2014, Nuansa Aulia
Perda No.4 tahun 2015 Tentang RTRW Kota Makassar 2015-2034
Peraturan Rektor IPDN No.070-621 Tahun 2017 Tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian Mandiri dan Kelompok Dosen, 2017, IPDN, Lembaga Penelitian dan Kajian Jatinangor.

**ANALISIS HUBUNGAN PENGUASAAN LAHAN DAN POLA BAGI HASIL
DENGAN TINGKAT KEMISKINAN PETANI PENGGARAP**
*ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP OF LAND TENURE AND PRODUCTION
SHARING PATTERNS WITH THE POVERTY LEVEL OF CHARGERS*

Abdul Halim & Muhammad Faisal
Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia
Email: faisalmile69ipdn.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara penguasaan lahan dan pola bagi hasil dengan tingkat kemiskinan petani penggarap dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Data diperoleh dengan kuesioner. Responden adalah 396 petani yang diambil dengan teknik proporsional random sampling. Analisis data menggunakan aplikasi SPSS versi 23. Uji hipotesis dengan statistik Spearman Rank. Ada hubungan yang signifikan antara penguasaan lahan dan pola bagi hasil dengan tingkat kemiskinan. Dengan pola penguasaan lahan dan bagi hasil saat ini, ternyata sebagian besar petani penggarap di Kabupaten Maros rentan terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi dan kebijakan yang memungkinkan petani penggarap yang rentan miskin ini tidak menjadi miskin dengan pemanfaatan lahan yang tersedia, serta skema bagi hasil yang saling menguntungkan antara pemilik lahan dan petani penggarap.

Kata Kunci: Kepemilikan tanah, pola bagi hasil, tingkat kemiskinan, petani penggarap

ABSTRACT

This study aims to analyze the relationship between land tenure and profit sharing patterns with the poverty level smallholder farmers using a quantitative approach. Data obtained by questionnaire. The respondents were 396 farmers who were taken by proportionate random sampling technique. Data analysis using SPSS application version 23. Test the hypothesis with Spearman Rank statistics. There is a significant relationship between land tenure and profit sharing patterns with poverty levels. With the current land tenure and production sharing patterns, it turns out that most of the tenants in Maros Regency are vulnerable to poverty. For this reason, it is necessary to have regulations and policies that enable these vulnerable poor tenants not to become poor with the use of available land, as well as mutually beneficial profit sharing schemes between land owners and smallholders.

Key Words: Land tenure, profit sharing pattern, poverty levels, harecroppers

PENDAHULUAN

Padi (beras) merupakan komoditi unggulan Provinsi Sulawesi Selatan di samping jagung, kakao, udang, rumput laut, dan sapi. Penetapan komoditi unggulan tersebut, tentunya tidak terlepas dari potensi yang dimiliki daerah ini yang meliputi 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya buatan. Sulawesi Selatan dikenal sebagai salah satu daerah sentra pengembangan

padi utama di luar Jawa. Bahkan, Pemerintah pusat pernah memberikan predikat kepada Sulawesi Selatan sebagai daerah lumbung pangan nasional. (BPS, 2018c) mencatat produksi padi Sulawesi Selatan pada tahun 2015 adalah sebanyak 5.471.806 ton atau 7,26% dari produksi nasional, berada pada urutan keempat tertinggi dari 34 provinsi di Indonesia, di bawah Provinsi Jawa Timur (13.154.967 ton), Jawa Barat (11.373.144 ton), dan Jawa Tengah (11.301.422 ton).

Terdapat beberapa wilayah yang potensial untuk pengembangan padi di Sulawesi Selatan, salah satunya adalah Kabupaten Maros. Hampir seluruh wilayah dataran di Kabupaten Maros bisa ditanami padi. Luas wilayah Kabupaten Maros tercatat 1.619,12 km² (BPS-Maros, 2019), terdiri atas 14 kecamatan dan 103 desa/kelurahan. Dari 103 desa/kelurahan tersebut, ternyata 10 desa adalah daerah pesisir pantai, 5 desa merupakan kawasan lembah, 28 desa berupa lereng/bukit, dan 60 desa adalah dataran. Wilayah Kabupaten Maros berada pada kisaran ketinggian 0-881 m di atas permukaan laut (dpl).

Penduduk Kabupaten Maros berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010 berjumlah 319.008 jiwa. Data 3 tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Maros. Berturut-turut pada tahun 2014 sebanyak 335.596 jiwa, tahun 2015 sebanyak 339.300 jiwa, dan tahun 2016 sebanyak 342.890 jiwa (BPS-Maros, 2019). Artinya, laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2014-2015 sebesar 1,10 per tahun dan selanjutnya tahun 2015-2016 sebesar 1,06% per tahun. Khusus data tahun 2016, dari jumlah penduduk sebanyak 342.890 jiwa, terdiri atas 167.724 jiwa (48,91%) adalah laki-laki dan 175.166 jiwa (51,09%) adalah perempuan.

Penduduk yang termasuk angkatan kerja di Kabupaten Maros pada tahun 2015 berjumlah 155.988 jiwa. Dari seluruh penduduk angkatan kerja ini, 145.081 jiwa penduduk yang sedang bekerja dan 10.907 jiwa pengangguran. Tidak kurang dari 32% penduduk yang sedang bekerja tersebut memilih sektor pertanian (dalam arti luas) sebagai sumber mata pencaharian utama untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Artinya, sektor pertanian di Kabupaten Maros merupakan penyerap tenaga kerja terbesar (31,89%), diikuti sektor perdagangan (21,74%), sektor jasa kemasyarakatan (17,51%), industri pengolahan (12,90%), dan sektor-sektor lainnya (15,96%).

Kontribusi sektor pertanian di Kabupaten Maros, juga dapat dilihat dari distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha. Dari 21 jenis lapangan usaha, ternyata kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Maros sebesar 15,25% atau berada pada urutan ketiga tertinggi, dibawah kontribusi sektor transportasi dan pergudangan sebesar 41,79%, serta kontribusi sektor industri pengolahan sebesar 18,14%. PDRB Kabupaten Maros tahun 2016 sebesar 11.970.398,03 juta rupiah. Kontribusi sektor pertanian ini tidak terlepas dari ketersediaan lahan sawah, baik sawah irigasi maupun sawah non irigasi.

Lahan sawah di Kabupaten Maros secara keseluruhan seluas 26.071 ha, meliputi lahan sawah irigasi seluas 15.657 ha dan lahan sawah non irigasi seluas 10.415 ha. Produksi padi sawah Kabupaten Maros tahun 2016 sebesar 436.730,26 ton yang dipanen dari areal seluas 58.437 ha atau rata-rata 7,22 ton/ha. Capaian produktivitas padi sawah di Kabupaten Maros pada 14 kecamatan berkisar antara 6,13-8,96 ton/ha. Capaian produktivitas padi sawah tersebut, jauh lebih tinggi dibanding rata-rata produktivitas padi sawah Sulawesi Selatan 5 tahun terakhir (2011-2015) yaitu sebesar 5,07-5,24 ton/ha dan produktivitas padi nasional sebesar 4,98-5,34 ton/ha. Produksi dan produktivitas yang cukup tinggi ini ditopang oleh ketersediaan prasarana dan sarana pendukung yang cukup memadai. Di Kabupaten Maros, terdapat lembaga penelitian tanaman pangan di bawah naungan Kementerian Pertanian yang sangat membantu dalam perakitan teknologi produksi, mulai dari awal panen hingga pasca panen.

Dukungan lainnya adalah keberadaan produsen benih dan pupuk di daerah ini. Kebutuhan benih padi bermutu dipasok oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) di Kabupaten Maros. Selanjutnya, kebutuhan pupuk bersubsidi disuplai oleh PT. Pupuk Indonesia

(Persero). Hal tersebut tidak terlepas dari fasilitasi dan dukungan Pemerintah Daerah, termasuk dukungan pelaku utama usaha tani di lahan sawah yaitu petani beserta keluarganya.

Permasalahan utama yang dihadapi terkait hal ini adalah capaian produktivitas padi sawah yang cukup tinggi tersebut (6,13-8,96 ton/ha), belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Padahal diketahui peningkatan pendapatan rumah tangga dapat ditempuh melalui upaya memproduktifkan seluruh sumber daya ada dalam keluarga (Handayani, Jamhari, Waluyati, & Mulyo, 2019). Tercatat jumlah penduduk miskin di Kabupaten Maros dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2014-2016) adalah tahun 2014 sebanyak 40.130 jiwa, tahun 2015 sebanyak 40.080 jiwa, dan tahun 2016 sebanyak 39.020 jiwa. Berdasarkan data ini tampak jelas bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Maros, penurunannya relatif stagnan. Bahkan, bisa dikatakan meskipun terjadi penurunan jumlah penduduk miskin, namun penurunannya sangat kecil (tidak signifikan). Penduduk miskin yang jumlahnya relatif stagnan di Kabupaten Maros tersebut, didominasi oleh petani yang bermukim di pedesaan (BPS-Maros, 2019).

Berdasarkan fenomena ini dapat dikemukakan bahwa produktivitas padi sawah yang cukup tinggi, ternyata belum sepenuhnya berimplikasi positif terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani di Kabupaten Maros. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah melalui Perum Bulog telah mengeluarkan beberapa kebijakan dan regulasi, di antaranya adalah dengan perbaikan harga gabah (beras). Namun kenyataannya, selama ini petani tetap saja tidak beranjak dari belunggu kemiskinan. Salah satu faktor yang dianggap memiliki kontribusi cukup besar sebagai penyebab terjadinya hal ini adalah penguasaan lahan sawah petani. Selama ini, kebanyakan petani mengusahakan lahan sawah dengan luasan kurang dari 0,50 ha. Bagi petani,

tanah merupakan sumber produksi pangan dan kelangsungan hidup (Faisal, 2020). Menurut data (BPS, 2018b), secara nasional, jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) yaitu: (a) skala kecil dengan luas lahan usaha tani kurang dari 0,50 ha adalah sebanyak 9.869.797 RTUP (75,93 persen); (b) skala menengah dengan luas lahan usaha tani 0,50-0,99 ha adalah sebanyak 1.996.580 RTUP (15,36 persen); dan (c) skala luas dengan luas lahan usaha tani 1,00 ha atau lebih adalah sebanyak 1.132.522 RTUP (8,71 persen).

Kecenderungan penguasaan lahan sawah RTUP secara nasional tersebut, kondisinya tidak jauh berbeda dengan RTUP di Sulawesi Selatan, yaitu: (a) skala kecil dengan luas lahan usaha tani kurang dari 0,50 ha adalah sebanyak 300.117 RTUP (50,21 persen); (b) skala menengah dengan luas lahan usaha tani 0,50-0,99 ha adalah sebanyak 1.996.580 RTUP (25,28 persen); dan (c) skala luas dengan luas lahan usaha tani 1,00 ha atau lebih adalah sebanyak 146.549 RTUP (24,52 persen). Kondisi RTUP yang kebanyakan menguasai lahan usaha tani kurang dari 0,50 ha, ditengarai sebagai salah satu faktor penyebab masih maraknya kemiskinan petani di pedesaan.

Status serta luas penguasaan lahan memiliki andil terhadap kondisi kemiskinan rumah tangga petani (Ginting, 2004); (Mufti & Zargustin, 2018); (Manatar, Laoh, & Mandei, 2017). Faktanya, sebagian petani ada yang tidak memiliki lahan sendiri untuk digarap. Jumlah petani yang tidak memiliki lahan sendiri untuk digarap mencapai 19,5 persen di Jawa dan 17,3 persen di luar Jawa (Susilowati & Maulana, 2012) therefore, is very important. This paper aims at analyzing the minimum requirements of farm land size and its break- even point (BEP. Banyaknya RTUP yang menguasai lahan sempit (kurang dari 0,5 ha) dan bahkan ada yang tidak memiliki lahan sama sekali dipicu oleh beberapa faktor yang saling terkait.

Menurut (Winarso, 2012), faktor penyebab terjadinya permasalahan penguasaan

lahan yang sempit dan bahkan tidak ada lahan sama sekali adalah adanya sistem waris pecah-bagi. Dengan sistem waris tersebut, lahan yang dimiliki petani dari satu generasi ke generasi berikutnya akan semakin sempit. Pada luasan tertentu, petani yang memiliki lahan sempit cenderung akan menjual lahannya karena pendapatan yang diperoleh dari lahan yang dimiliki tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya.

Bagi petani yang memiliki lahan sendiri untuk digarap (biasa disebut petani pemilik penggarap), akan memperoleh seluruh hasil produksinya pada saat panen. Status kepemilikan lahan yang jelas akan meningkatkan efisiensi pemakaian lahan (Ala, 2012). Hal ini berbeda kasusnya bila petani tidak memiliki lahan sawah sendiri untuk digarap. Pada kasus ini, petani diperhadapkan pada pilihan yang dilematis. Bila petani memilih untuk tidak menggarap lahan sawah milik orang lain, berarti petani tersebut tidak berusaha tani. Dalam kondisi tidak berusaha tani berarti penghidupan petani beserta keluarganya akan terganggu. Di sisi lain, bila petani memilih untuk menggarap lahan sawah milik orang lain (biasa disebut petani penggarap), berarti petani tersebut harus siap berbagi hasil dengan pemilik lahan.

Posisi petani yang tidak menguasai lahan yang luas memiliki akses terhadap sumber daya lahan yang terbatas. Ini dapat berimplikasi pada tingkatan pendapatan petani. Dengan luas lahan yang semakin sempit, pendapatan yang diperoleh petani semakin kecil (Soekartawi, 2006); (Handayani et al., 2019). Petani penggarap dengan tingkat pendapatan yang rendah cenderung menerima tawaran dari pemilik lahan. Apalagi mereka selain diikat oleh hubungan darah, pertemanan, dan kedekatan lokasi lahan yang selama ini diolah oleh petani penggarap. Perjanjian kerja sama antara petani penggarap dengan pemilik lahan dalam hal pola bagi hasil (umumnya tidak tertulis), tidak jarang merugikan pihak petani penggarap. Akibatnya, pola bagi hasil yang diterapkan

cenderung tidak seimbang dan umumnya hanya keputusan sepihak dari pemilik lahan. Petani penggarap tidak berdaya dan tidak memiliki kemampuan untuk mengubah pola bagi hasil yang telah ditetapkan oleh pemilik lahan. Beberapa hasil penelitian menemukan bahwa petani penggarap memperoleh bagian hasil yang lebih kecil dibandingkan dengan biaya yang digunakan dalam pengelolaan usaha tani pada setiap musim tanam (Irmayanti, 2010); (Priyadi & Ash Shidiqie, 2015); (Mokodongan, Rauf, & Laapo, 2016); (Auliyah & Wulandari, 2017). Bila petani penggarap tidak mematuhi keputusan pemilik lahan dalam hal bagi hasil, secara otomatis pemilik lahan akan mengalihkan hak penguasaan lahan sawahnya untuk digarap oleh petani yang lain. Hal ini menjelaskan betapa lemahnya posisi tawar menawar dari petani penggarap yang tidak memiliki tanah sendiri. Mereka ini, oleh (Suyanto, 2013) menyebutkan sebagai golongan yang menderita kemiskinan struktural. Dengan posisi tawar menawar yang lemah dan ketidakberdayaan para petani penggarap yang menderita kemiskinan struktural tersebut menjadi sasaran dari perlakuan yang tidak adil dan merugikan mereka (Suyanto, 2013).

Fenomena penguasaan lahan dan bagi hasil sebagaimana diuraikan di atas, serta keeratan hubungannya dengan tingkat kemiskinan petani penggarap di Kabupaten Maros selama ini belum banyak diteliti dan dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji dan menganalisis hubungan penguasaan lahan dan pola bagi hasil dengan tingkat kemiskinan petani penggarap di Kabupaten Maros.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data variabel penelitian diperoleh melalui instrumen berupa kuesioner. Pemilihan responden dilakukan dengan teknik *proportionate random sampling* dari populasi

sebanyak 33.382 petani yang terdaftar secara resmi sebagai anggota kelompok tani di Kabupaten Maros. Dengan menggunakan rumus $n = \frac{N \cdot d}{N}$ (Yamane, 1967), n = Jumlah sampel, N = Jumlah populasi, dan d adalah presisi sebesar 5%, diperoleh sampel 396 responden dari 33.382 populasi. Usia responden pada rentang 21-69 tahun, tingkat pendidikan bervariasi dari tidak pernah mengenyam pendidikan formal sampai lulus S1 perguruan tinggi. Sementara itu, jumlah tanggungan keluarga 0-9 orang dan pengalaman berusahatani dari 2-50 tahun. Uji hipotesis menggunakan uji statistik *Rank Spearman* dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 23 (Martono, 2010).

Variabel-variabel penelitian ini adalah penguasaan lahan, bagi hasil dan tingkat kemiskinan petani penggarap yang secara operasional didefinisikan sebagai berikut:

- (i) Penguasaan lahan didefinisikan sebagai rata-rata luas areal lahan sawah yang dikuasai oleh petani penggarap dengan sistem bagi hasil untuk setiap musim tanam. Penguasaan lahan sawah petani penggarap tersebut dibagi ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: (1) Skala kecil, petani penggarap dengan rata-rata luas lahan sawah yang dikuasai setiap musim tanam 0,50 ha; (2) Skala menengah, petani penggarap dengan rata-rata luas lahan sawah yang dikuasai setiap musim tanam adalah 0,50- 0,99 ha; serta (3) Skala luas, petani penggarap dengan rata-rata luas sawah yang dikuasai adalah 1,00 ha.
- (ii) Bagi hasil adalah pengalihan hak garap atas lahan dari pemilik lahan kepada orang lain (petani penggarap) karena antara pemilik lahan dengan petani penggarap terjadi ikatan perusahaan usaha tani dan pembagian produksi. Bagi hasil terbagi dalam 3 (tiga) tipe, masing-masing adalah: (1) Bagi hasil tipe I, yaitu bagi hasil dengan kategori

tidak proporsional (TP), dalam hal ini bentuk pembagiannya adalah hasil produksi dibagi dua masing-masing 50% untuk petani penggarap dan 50% untuk pemilik lahan (50%:50%), tetapi semua biaya produksi ditanggung oleh petani penggarap; (2) Bagi hasil tipe II: yaitu bagi hasil yang mendekati proporsional (MP), bentuk pembagiannya adalah hasil produksi dibagi dua masing-masing 50% untuk petani penggarap dan 50% untuk pemilik lahan (50%:50%), biaya pupuk dibagi dua, namun biaya-biaya produksi lainnya ditanggung oleh petani penggarap; serta (3) Bagi hasil tipe III, yaitu bagi hasil yang proporsional (P), bentuk pembagiannya adalah hasil produksi dan biaya produksi masing-masing dibagi dua, 50% untuk petani penggarap dan 50% untuk pemilik lahan (50%:50%).

- (iii) Tingkat kemiskinan petani penggarap adalah tingkat ketidakmampuan petani dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum (makanan dan bukan makanan), yang diukur berdasarkan standar kemiskinan BPS yaitu Garis Kemiskinan (GK). (Khomsan, Dharmawan, Saharuddin, Syarief, & Sukandar, 2015) menyatakan nilai GK berbeda antar daerah dan antar desa-kota. Nilai GK Kabupaten Maros pada keadaan September 2018 adalah Rp 348.726/kapita/bulan (BPS, 2018a). Terkait dengan hal tersebut, tingkat kemiskinan petani penggarap dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: (1) Miskin, bila pendapatan bersih petani penggarap per bulan $\bar{1},0$ GK; (2) Rentan miskin, bila pendapatan bersih petani penggarap per bulan antara 1,0-1,6 GK; serta (3) Tidak Miskin, bila pendapatan bersih petani penggarap per bulan $\bar{1},6$ GK.

Instrumen penguasaan lahan dikembangkan berdasarkan definisi operasional yaitu terkait dengan rata-rata luas areal lahan sawah yang dikuasai oleh petani penggarap dengan sistem bagi hasil untuk setiap musim tanam. Penguasaan lahan sawah petani penggarap ini dibagi kedalam 3 (tiga) kategori, yaitu: (a) Skala kecil, (b) Skala menengah, dan (c) Skala luas. Alternatif pilihan respondennya adalah (a) Skala kecil (Skor 1); atau (b) Skala menengah (Skor 2); atau (c) Skala luas (Skor 3). Selanjutnya, bagi hasil dibagi ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: (a) Bagi hasil tipe I; (b) Bagi hasil tipe II; dan (c) Bagi hasil tipe III. Alternatif pilihan respondennya adalah (a) Bagi hasil tipe I (skor 1); atau (b) Bagi hasil tipe II (skor 2); atau (c) Bagi hasil tipe III (skor 3). Instrumen tingkat kemiskinan petani penggarap berdasarkan standar kriteria kemiskinan BPS yaitu Garis Kemiskinan (GK), dimana GK Kabupaten Maros pada keadaan September 2018 adalah Rp348.726/kapita/bulan (BPS, 2018a). Tingkat kemiskinan petani penggarap diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan yang diperoleh dari usaha tani padi dengan Garis Kemiskinan (GK), dalam hal ini dibagi 3 (tiga) kategori, yaitu: (a) 1,0 GK; (b) 1,0-1,6 GK; dan (c) 1,6 GK. Alternatif pilihan respondennya adalah (a) 1,0 GK (skor 1); atau (b) 1,0-1,6 GK (skor 2); atau (c) 1,6 GK (skor 3).

Sekilas Kabupaten Maros Sebagai Lokasi Penelitian

Kabupaten Maros terdiri atas 14 kecamatan dan 103 desa/kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan 1.619,12 km² dan jumlah penduduk 342.890 jiwa (BPS-Maros, 2019). Penduduk Kabupaten Maros dominan bekerja di sektor pertanian (31,89%), kemudian diikuti sektor perdagangan (21,74%), sektor jasa kemasyarakatan (17,51%), industri pengolahan (12,90%), dan sektor-sektor lainnya (15,96%). Dari 21 jenis lapangan usaha, ternyata kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten

Maros sebesar 15,25% atau berada pada urutan ketiga tertinggi, di bawah kontribusi sektor transportasi dan pergudangan sebesar 41,79%, serta kontribusi sektor industri pengolahan sebesar 18,14%. Kontribusi sektor pertanian yang cukup besar ini tidak terlepas dari ketersediaan lahan sawah, baik sawah irigasi (15.657 ha) maupun sawah non irigasi (10.415 ha).

Produksi padi sawah Kabupaten Maros tahun 2016 sebesar 436.730,26 ton yang dipanen dari areal seluas 58.437 ha atau rata-rata 7,22 ton/ha. Capaian produktivitas padi sawah di Kabupaten Maros pada 14 kecamatan berkisar antara 6,13-8,96 ton/ha. Capaian produktivitas padi sawah tersebut, jauh lebih tinggi dibanding rata-rata produktivitas padi sawah Sulawesi Selatan 5 tahun terakhir (2011-2015) yaitu sebesar 5,07-5,24 ton/ha dan produktivitas padi nasional sebesar 4,98-5,34 ton/ha. Capaian produktivitas yang cukup tinggi tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. (BPS-Maros, 2017) mencatat bahwa dari 39.020 jiwa penduduk miskin di Kabupaten Maros, ternyata 28,58% diantaranya adalah penduduk yang bekerja di sektor pertanian, selebihnya 46,81% tidak bekerja dan 24,61% bekerja bukan di sektor pertanian.

Karakteristik Responden Petani Penggarap

Karakteristik responden petani penggarap di Kabupaten Maros bervariasi, baik dari segi umur, tingkat pendidikan, pengalaman berusaha tani padi, serta jumlah tanggungan keluarga. Adapun karakteristik umur dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Karakteristik Umur Responden Petani Penggarap

Umur (Tahun)	Jumlah	Persentase
Lebih dari 58	59	14,90
35 - 58	304	76,77
Kurang dari 35	33	8,33
Jumlah	396	100,00

Sumber: Olah data hasil penelitian, 2019

Tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa umur responden petani penggarap yang terbanyak berada pada kelompok umur 35-58 tahun sebesar 76,77 persen. Dengan kelompok umur tersebut mereka memiliki kondisi fisik yang memadai sehingga mereka lebih produktif dalam berusaha tani. Sementara itu, karakteristik tingkat pendidikan responden dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Karakteristik Lamanya Menempuh Pendidikan Formal Responden Petani Penggarap

Lama Menempuh Pendidikan Formal (Tahun)	Jumlah	Persentase
Lebih dari 12 Tahun	9	2,27
Antara 7 – 12 Tahun	147	37,12
Kurang dari 7 Tahun	240	60,61
Jumlah	396	100,00

Sumber: Olah data hasil penelitian, 2019

Lama menempuh pendidikan formal dari responden petani penggarap pada Tabel 2 di atas adalah kurang dari 7 tahun sebanyak 240 responden atau 60,61 persen. Sementara yang lebih dari 12 tahun hanya 9 responden atau 2,27 persen. Ini menjelaskan bahwa tingkat pendidikan responden petani penggarap kebanyakan hanya tamat di bangku sekolah dasar atau bahkan tidak menyelesaikan pendidikan formalnya di tingkat SD. Dengan demikian dilihat dari tingkat pendidikan formal responden petani penggarap memiliki kualitas sumber daya manusia yang rendah. Menurut (Arsyad, 2012), petani yang berpendidikan minimal SMA memiliki kondisi sosial ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan petani dengan tingkat pendidikan yang hanya sampai SMP. Selanjutnya, pengalaman berusahatani padi dari responden dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Karakteristik Pengalaman Berusahatani Padi Responden Petani Penggarap

Pengalaman Berusahatani Padi	Jumlah	Persentase
Lebih dari 20 tahun	231	58,33
Antara 10 – 20 tahun	132	33,34
Kurang dari 20 tahun	33	8,33
Jumlah	396	100,00

Sumber: Olah data hasil penelitian, 2019

Dapat dilihat pada Tabel 3 di atas bahwa pengalaman berusahatani padi dari responden petani penggarap sebesar 58,33 persen sudah lebih dari 20 tahun. Ini menjelaskan bahwa responden petani penggarap sudah berpengalaman dalam mengolah usahatani padi mereka. Dengan pengalaman yang dimiliki oleh petani penggarap tersebut mereka sudah mempunyai banyak pilihan mulai dari prapanen sampai pascapanen. Lebih jauh, jumlah tanggungan keluarga dari para responden juga menjadi perhatian dalam penelitian ini sebagaimana tampak pada Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. Jumlah Tanggungan Keluarga dari Responden Petani Penggarap

Tanggungan Keluarga	Jumlah	Persentase
Lebih dari 5 orang	70	17,68
Antara 3 – 5 orang	282	71,21
Kurang dari 3 orang	44	11,11
Jumlah	396	100,00

Sumber: Olah data hasil penelitian, 2019

Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa para responden petani penggarap sebesar 282 atau 71,21 persen memiliki jumlah tanggungan keluarga antara 3 sampai dengan 5 orang. Demikian juga ada 17,68 persen yang memiliki jumlah tanggungan keluarga lebih dari 5 orang. Dan sisanya hanya 11,11 persen yang memiliki jumlah tanggungan keluarga kurang dari 3 orang. Ini menjelaskan bahwa para responden petani penggarap memiliki jumlah keluarga yang relatif besar. Jumlah tanggungan keluarga

ini, bisa sebagai beban pembiayaan bagi keluarga, namun bisa juga sebagai potensi yang dapat memberikan kontribusi bagi tambahan penghasilan keluarga ketika usianya termasuk usia produktif.

Deskripsi Penguasaan Lahan

Distribusi responden petani penggarap berdasarkan tingkat penguasaan lahan dapat dilihat pada Tabel 5 berikut:

Tabel 5. Distribusi Responden Petani Penggarap Menurut Penguasaan Lahan

Penguasaan Lahan (Hektar)	Jumlah	Persentase
≥ 1,00	77	19,45
0,50 – 0,99	168	42,42
0,50	151	38,13
Jumlah	396	100,00

Sumber: Olah data hasil penelitian, 2019

Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 168 dari 396 atau 42,42 persen responden petani penggarap yang menguasai lahan 0,50-0,99 hektar dan sebanyak 151 atau 38,13 responden yang menguasai lahan hanya kurang dari setengah hektar. Sementara hanya 19,45 persen yang menguasai lahan lebih atau sama dengan 1 hektar.

Selanjutnya, proporsi pola bagi hasil yang diterapkan disajikan dalam Tabel 6 berikut ini.

Tabel 6. Distribusi Responden Petani Penggarap Menurut Pola Bagi Hasil yang Diterapkan

Pola Bagi Hasil yang Diterapkan	Jumlah	Persen tase
Bagi Hasil Proporsional	25	6,31
Bagi Hasil Mendekati proporsional	303	76,52
Bagi Hasil Tidak Proporsional	68	17,17
Jumlah	396	100,00

Sumber: Olah data hasil penelitian, 2019

Dapat dilihat pada Tabel 6 di atas bahwa sebanyak 303 dari 396 responden petani

penggarap atau 76,52 persen pola bagi hasil yang diterapkan adalah bagi hasil mendekati proporsional dan hanya 25 dari 396 responden atau 6,31 persen yang menerapkan bagi hasil secara proporsional.

Selanjutnya, untuk variabel tingkat kemiskinan disajikan sebagaimana pada Tabel 7 berikut ini:

Tabel 7. Distribusi Responden Petani Penggarap Menurut Tingkat Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan	Jumlah	Persentase
>1,6 GK (Tidak Miskin)	59	14,90
1,0 – 1,6 GK (Rentan Miskin)	182	45,96
1,0 GK (Miskin)	155	39,14
Jumlah	396	100,00

Sumber: Olah data hasil penelitian, 2019

Dapat dilihat pada Tabel 7 di atas bahwa responden petani penggarap untuk kategori rentan miskin dan miskin adalah masing-masing 45,96 persen dan 19,14 persen dari 396 responden. Sementara yang tidak miskin atau yang lebih besar 1,6 GK hanya 14,90 persen. Ini menjelaskan bahwa responden petani penggarap lebih banyak yang berada pada kategori rentan miskin dan miskin.

Hubungan Penguasaan Lahan Dan Pola Bagi Hasil Dengan Tingkat Kemiskinan Petani Penggarap

Hasil analisis korelasi *Rank Spearman*, diperoleh keeratan hubungan antara penguasaan lahan dan pola bagi hasil dengan tingkat kemiskinan petani penggarap sebagaimana disajikan dalam Tabel 8 berikut ini.

Tabel 8. Keeratan Hubungan Antara Penguasaan Lahan dan Pola Bagi Hasil Dengan Tingkat Kemiskinan Petani

Variabel yang diamati	Koefisien Korelasi (KK)	Keterangan
Hubungan antara penguasaan lahan dengan tingkat kemiskinan petani penggarap	0,664	Hubungan kedua variabel termasuk kategori kuat (tinggi), positif dan signifikan
Hubungan antara pola bagi hasil dengan tingkat kemiskinan petani penggarap	0,476	Hubungan keduanya termasuk kategori sedang, positif dan signifikan
Hubungan antara penguasaan lahan dan pola bagi hasil dengan tingkat kemiskinan petani penggarap	0,721	Hubungan keduanya termasuk kategori kuat (tinggi), positif dan signifikan

Sumber: Olah data hasil penelitian, 2019

Berdasarkan Tabel 8 tersebut di atas, terdapat hubungan yang erat antara penguasaan lahan dengan tingkat kemiskinan petani penggarap ($\rho = 0,664$). Responden petani penggarap yang termasuk kategori miskin ($\bar{1},0$ GK) cenderung didominasi oleh petani penggarap dengan skala penguasaan lahan sawah yang kecil atau sempit ($\bar{0},50$ ha) yaitu 72,9%, kemudian berturut-turut skala menengah ($0,50-0,99$ ha) yaitu 23,9% dan skala luas ($\bar{1},00$ ha) yaitu 3,2%. Selanjutnya, bila dianalisis khusus petani penggarap yang termasuk kategori rentan miskin, ternyata didominasi oleh petani penggarap dengan penggunaan lahan skala menengah ($0,50-0,99$ ha) yaitu 67,0%, kemudian berturut-turut adalah skala kecil ($\bar{0},50$ ha) yaitu 19,8%, dan skala luas ($\bar{1},00$ ha) yaitu 13,2%. Hanya sedikit petani penggarap yang termasuk kategori tidak miskin, dengan penguasaan lahan dominan skala luas ($\bar{1},00$ ha) yaitu 79,7%, kemudian berturut-turut adalah skala menengah ($0,50-0,99$ ha) yaitu 18,6% dan skala kecil ($\bar{0},50$ ha) yaitu 1,7%.

Hasil penelitian ini, melengkapi hasil penelitian (Susilowati & Maulana, 2012) *therefore, is very important. This paper aims at analyzing the minimum requirements of farm land size and its break-even point (BEP*

yang menyatakan bahwa luasan lahan yang dibutuhkan per rumah tangga tani untuk memperoleh pendapatan setara atau di atas garis kemiskinan (GK) BPS adalah minimal $0,71-1,10$ ha. Sementara hasil penelitian ini menunjukkan bahwa petani penggarap yang menguasai lahan seluas $0,71-1,10$ ha berada pada kategori rentang miskin.

Penguasaan lahan yang kecil atau bahkan tidak memiliki lahan sama sekali untuk digarap, menyebabkan sebagian besar petani dengan terpaksa menggarap lahan sawah milik orang lain dengan sistem bagi hasil. Fenomena pola bagi hasil yang dominan yaitu pola bagi hasil yang mendekati proporsional tersebut, tentunya tidak semata karena pertimbangan pendapatan. Fenomena tersebut diduga lebih banyak disebabkan oleh kesepakatan pola bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap didasarkan pada kebiasaan yang telah dilakukan secara turun-temurun di Kabupaten Maros. Penetapan kesepakatan pola bagi hasil dilakukan secara tidak tertulis, dan hanya berdasarkan kepercayaan satu sama lain. Dengan kondisi dan posisi petani penggarap yang lemah, maka penentuan kesepakatan pola bagi hasil tersebut lebih banyak ditentukan oleh pemilik lahan. Petani penggarap hanya menerima dan

melaksanakan kesepakatan bagi hasil tersebut. Begitu petani penggarap tidak menerima pola bagi hasil yang ditetapkan pemilik lahan, maka penguasaan lahan dialihkan kepada petani penggarap yang lain.

Oleh karena itu, petani penggarap tidak begitu bebas dan leluasa memilih pola bagi hasil yang akan diterapkan, meskipun pada dasarnya pola bagi hasil tersebut tidak menguntungkan dari segi pendapatan petani penggarap. Pola bagi hasil yang tidak menguntungkan dan bahkan bisa dikatakan sangat merugikan petani penggarap tersebut, pada akhirnya menjadikan petani penggarap sangat sulit untuk keluar dari belenggu kemiskinan. Terkait hal ini, tentunya peran Pemerintah Daerah sangat diperlukan, terutama dalam memfasilitasi penetapan pola bagi hasil yang menguntungkan kedua belah pihak yaitu pihak pemilik lahan dan pihak petani penggarap berupa instrumen dalam bentuk Peraturan Daerah.

Selanjutnya, terdapat hubungan yang kuat antara penguasaan lahan dan pola bagi hasil dengan tingkat kemiskinan petani penggarap di Kabupaten Maros ($\rho = 0,721$). Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden petani penggarap yang tergolong miskin adalah kebanyakan petani penggarap dengan penguasaan lahan skala sempit (0,50 ha) dan menerapkan pola bagi hasil yang tidak proporsional atau pola bagi hasil yang mendekati proporsional. Sementara itu, responden petani penggarap yang tergolong rentan miskin pada umumnya didominasi oleh petani penggarap dengan penguasaan lahan skala menengah (0,50-0,99 ha) dan menerapkan pola bagi hasil yang mendekati proporsional. Selanjutnya, responden petani penggarap yang tergolong tidak miskin adalah petani penggarap dengan penguasaan lahan skala luas (1,00 ha) dan menerapkan pola bagi hasil yang mendekati proporsional atau pola bagi hasil yang proporsional.

Keberpihakan pemerintah dan pemerintah daerah melalui regulasi dan kebijakan yang

menguntungkan petani patut mendapat perhatian. Dalam pelaksanaannya di lapangan, petani penggarap perlu difasilitasi dan diberikan kemudahan untuk memperoleh lahan pertanian, baik dalam bentuk hak sewa, izin penguasaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan. Di samping itu, dengan posisi petani penggarap yang sangat lemah, perlu pengaturan dari pemerintah daerah terhadap pola bagi hasil yang diterapkan sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak yaitu pihak pemilik lahan dan petani penggarap.

Melalui penguasaan lahan dengan luasan yang layak dari segi usaha tani, ditambah pola bagi hasil yang menguntungkan kedua belah pihak, akan sangat membantu petani penggarap untuk bisa meningkatkan pendapatannya, dan pada akhirnya dapat menjadikan petani penggarap terbebas dari kemiskinan.

KESIMPULAN

Terdapat hubungan yang signifikan antara penguasaan lahan dan pola bagi hasil dengan tingkat kemiskinan petani penggarap. Dengan penguasaan lahan dan pola bagi hasil yang berlaku selama ini, ternyata kebanyakan petani penggarap di Kabupaten Maros berada pada kategori rentan miskin. Untuk itu, diperlukan adanya regulasi dan kebijakan yang memungkinkan petani penggarap dengan kategori rentan miskin tersebut tidak menjadi miskin dengan pemanfaatan lahan yang tersedia, serta pola bagi hasil yang saling menguntungkan antara pemilik lahan dengan petani penggarap.

DAFTAR PUSTAKA

- Ala, A. (2012). *Secercah Harapan Buat Petani Gurem (dalam Gagasan, Pikiran, dan Harapan Alumni Fakultas Pertanian Unhas Terhadap Pembangunan Pertanian Indonesia)*. Makassar: Identitas Universitas Hasanuddin.

- Arsyad, M. (2012). *Membangun Pertanian dan Perdesaan untuk Percepatan Reduksi Kemiskinan (dalam Gagasan, Pikiran, dan Harapan Alumni Fakultas Pertanian Unhas Terhadap Pembangunan Pertanian Indonesia)*. Makassar: Identitas Universitas Hasanuddin.
- Auliyah, R., & Wulandari, A. (2017). *Potret Bagi Hasil Pertanian*. Yogyakarta: Deepublish.
- BPS-Maros. (2017). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Maros 2017*. Maros: BPS.
- BPS-Maros. (2019). *Kabupaten Maros dalam Angka 2019*. Maros: BPS.
- BPS. (2018a). *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2017*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2018b). *Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2018*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2018c). *Statistik Indonesia 2018*. Jakarta: BPS. Retrieved from <https://www.bps.go.id/publication/2018/07/03/5a963c1ea9b0fed6497d0845/statistik-indonesia-2018.html>
- Faisal, M. (2020). Land Conversion And The Level Of Community Social Cohesion In The Sub-District of Empoang District Binamu Jeneponto Regency. *Sosiohumaniora*. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v22i2.25970>
- Ginting, J. (2004). *Analisis Faktor Penyebab Pendapatan Petani Miskin di Kecamatan Deli Tua, Deli Serdang, Medan*. Tesis. PPS Universitas Sumatera Utara.
- Handayani, S. M., Jamhari, Waluyati, L. R., & Mulyo, J. H. (2019). Contribution of Wetland Rice Agro Tourism to Household Income at Various Categories of. *AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research*, 5(1), 32–42. <https://doi.org/dx.doi.org/10.18196/agr.5173>
- Irmayanti. (2010). *Sistem Bagi Hasil antara Pemilik Lahan dengan Petani Penggarap Usaha Tani Lahan Sawah di Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros*. Skripsi. Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin.
- Khomsan, A., Dharmawan, Saharuddin, Syarief, & Sukandar. (2015). *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Manatar, Laoh, & Mandei. (2017). Pengaruh Status Penguasaan Lahan Terhadap Pendapatan Petani Padi di Desa Tumani, Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan. *Agri-Sosio Ekonomi Unsrat, ISSN 1907-4298*, 13(1), 55–64. <https://doi.org/10.35791/agsosek.13.1.2017.14920>
- Martono, N. (2010). *Statistik Sosial, Teori dan Aplikasi Program SPSS*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mokodongan, A., Rauf, R. A., & Laapo, A. (2016). Analisis Pendapatan Petani Penggarap pada Usahatani Padi Sawah di Desa Kaleke, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi. *E-J. Agrotekbis*, 4(3), 310–315. Retrieved from <https://www.neliti.com/publications/242306>
- Mufti, M., & Zargustin, D. (2018). Penguasaan Lahan Usahatani Padi Sawah Dan Hubungannya Dengan Tingkat Pemiskinan di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. *Jurnal Agribisnis*, 19(1), 26–32. <https://doi.org/10.31849/agr.v19i1.892>
- Priyadi, U., & Ash Shidiqie, S. J. (2015). Pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian lahan sawah studi di Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman Yogyakarta. *Millah, XV No 1*, 101–115. <https://doi.org/10.20885/millah.vol15.iss1.art5>
- Soekartawi. (2006). *Analisis Usahatani*. Jakarta: UI-Press.

- Susilowati, S. H., & Maulana, M. (2012). Luas Lahan Usahatani dan Kesejahteraan Petani : Eksistensi Petani Gurem dan Urgensi Kebijakan Reforma Agraria. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 10(1), 17–30. <https://doi.org/10.21082/akp.v10n1.2012.17-30>
- Suyanto, B. (2013). *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*. Malang: Intrans Publishing.
- Winarso, B. (2012). Dinamika Pola Penguasaan Lahan Sawah di Wilayah Pedesaan di Indonesia (Pattern Dynamics Control Wetland in Rural Areas in Indonesia). *Jurnal Penelitian Pertanian Terapan*, 12(3), 137–149. Retrieved from <https://jurnal.polinela.ac.id/index.php/JPPT/article/view/209/175>
- Yamane, T. (1967). *Statistics: An Introductory Analysis* (Second Ed). New York: Harper and Row.

**PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)
DI MASA PANDEMI COVID-19**
*MANAGEMENT OF VILLAGE OWNED BUSINESS ENTITIES (BUM Desa)
DURING THE COVID-19 PANDEMIC*

Aryo Sosiawan

Mahasiswa S2 Sosiologi Universitas Hasanuddin
Corresponding Author: aryososiawan2@gmail.com

ABSTRAK

Masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menjadi momentum yang baik bagi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) untuk menata kembali orientasinya. Tidak hanya sebagai unit usaha yang hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga menjalankan fungsi sosial dengan lebih berperan dalam jaring pengaman sosial bagi masyarakat. Selain itu, periode ini juga menjadi momentum penting untuk berbenah diri agar mampu menghadapi kompleksnya permasalahan yang dihadapi BUM Desa akibat pandemi COVID-19. Masalah ekonomi yang dihadapi baik BUM Desa maupun masyarakat semakin kompleks akibat pandemi COVID-19. Permasalahan tersebut antara lain turunnya perekonomian desa akibat kesulitan yang dialami petani untuk memasarkan produknya, turunnya UMKM, turunnya daya beli masyarakat, dan bertambahnya beban ekonomi desa akibat banyaknya pemudik kembali ke desa dengan masalah karena bekerja di kota. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang dilakukan melalui pustakawan untuk membandingkan pengelolaan BUM Desa di berbagai daerah. Hasil penelitian dan pengelolaan BUM Desa Secara keseluruhan dari berbagai daerah di Indonesia yang mengelola BUM Desa dimulai dari perencanaan, hingga pengawasan terhadap BUM Desa agar tetap berjalan sebagaimana diatur dalam peraturan dan berdasarkan anggaran dasar yang telah ditetapkan. Dan ada juga cara membuka usaha seperti Peternakan, penjualan gas elpiji dan distributor gula pasir serta pengelolaan BUM Desa dapat dilakukan dengan menerapkan digitalisasi agar pengelolaan dapat berjalan lebih maksimal.

Keyword: Badan Usaha Milik Desa, Perencanaan, Pelaksanaan Pengelolaan.

ABSTRACT

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic period is a good momentum for Village Owned Enterprises (BUM Desa) to reorganize their orientation. Not only as a business unit that only pursues economic benefits, but also carries out social functions by playing a more role in social safety nets for the community. In addition, this period is also an important momentum to improve themselves in order to be able to face the complex problems faced by BUM Desa due to the COVID-19 pandemic. The economic problems faced by both BUM Desa and the community are increasingly complex due to the COVID-19 pandemic. These problems include the decline in the village economy due to the difficulties experienced by farmers to market their products, the decline in MSMEs, a decrease in people's purchasing power, and an increase in the economic burden of the village due to the large number of homecomers returning to the village with problems due to work in the city. This study uses qualitative research conducted through librarians to compare the management of BUM Desa in various regions. Results of research and management of BUM Desa Overall from various regions in Indonesia that managing BUM Desa starts with planning, to monitoring the BUM Desa so that they continue to run as regulated in the regulations and based on the articles of association that have been set. And there are also ways to open businesses such as Livestock, LPG gas sales and granulated sugar distributors and the management of BUM Desa can be done by implementing digitalization so that management can run more optimally.

Keyword: Village Owned Enterprises, Planning, Implementation of Management.

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 masih berlangsung (Cacciapaglia et al., 2020; Gross et al., 2020; Vasiev et al., 2020), berbagai dampak turut merasakan baik di dunia Pendidikan, sosial maupun ekonomi (Buheji et al., 2020; Nicola et al., 2020), namun atas segala keterpurukan itu, ada beberapa usaha yang tetap bertahan di Era Pandemic dan diharapkan terus berkembang di saat krisis. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dinilai menjadi salah satu elemen penting yang bisa memainkan peran membangkitkan dan menggairahkan perekonomian yang lesu ditengah pandemic COVID-19 (Izzalqurny et al., 2021; Muhammad et al., 2021; Sofianto & Risandewi, 2021).

BUM Desa merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan berbadan hukum (Lubis & Muda, 2018). Pemerintah Desa dapat mendirikan BUM Desa sesuai dengan kebutuhan dan Potensi desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan kepengurusan terdiri atas Pemerintah Desa dan Masyarakat desa. Sumber permodalan BUM Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa (Sofyani et al., 2019; Srijekki, 2018), tabungan Masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pinjaman atau penyertaan modal pihak lain atau Kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) pada hakikatnya adalah lembaga yang didirikan oleh Desa (Syafingi et al., 2020). Membentuk BUM Desa adalah bagian dalam menjalankan amanat peraturan perundangan (Winarsi et al., 2018), hal ini sebagaimana diatur pada: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bab X, Pasal 87, 88, 89, dan 90 yaitu: Pasal 87 (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek keuangan desa, terkait dengan tujuan pembentukan BUM Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa) dengan memberikan kewenangan desa melakukan usaha desa. Dengan meningkatnya PADesa, maka APBDesa akan meningkat pula, sehingga pada gilirannya pemerintah desa semakin mandiri dalam menyelenggarakan pembangunan desanya.

Perlu diingat bahwa fungsi BUM Desa disamping ekonomi juga memiliki Fungsi Sosial (Setyobakti, 2018). Fungsi ekonomi, kegiatan-kegiatan dalam pengembangan dan pengelolaan BUMDes adalah usaha desa yang harus memberikan margin keuntungan bagi Desa maupun bagi masyarakat Desa (Gustin et al., 2019; Syahza et al., 2021). Sedangkan Fungsi sosial, yang dapat dilakukan oleh BUM Desa adalah: (1) Tidak langsung, dengan memberikan transfer keuangan bagi kas Desa melalui penambahan Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang selanjutnya akan digunakan untuk kegiatan pembangunan Desa dengan mekanisme regular pada manajemen pembangunan desa; dan (2) Langsung, melakukan pembinaan dan pendamping usaha yang dilakukan oleh masyarakat desa, disamping itu juga melakukan pengelolaan barang/jasa milik umum (bukan private/pribadi). Kepemilikan umum (public property) dapat dikelola oleh BUM Desa seperti air bersih, irigasi, pasar desa, pariwisata desa, hutan desa, listrik desa, dan sebagainya. Dengan demikian, setiap warga desa dapat memanfaatkan secara optimal barang publik milik desa. Yanto seorang pengurus BUM Desa yang mengelola destinasi wisata Goa Pindul Gunung Kidul, menyampaikan pertanyaan terkait strategi yang bisa dilakukan oleh BUM Desa agar mampu bangkit dalam masa pandemi COVID-19.

Berdasarkan fenomena yang terjadi akibat Pandemi COVID-19, dan apabila melihat tujuan Badan Usaha Milik Desa, peneliti melihat peluang yang terbuka lebar

pengelola BUM Desa untuk berperan serta membangkitkan perekonomian masyarakat Desa serta membangkitkan gairah roda ekonomi. Dengan tunjangan Dana Desa serta dukungan regulasi dari pemerintah pusat daerah, menjadikan BUM Desa layak untuk diberdayakan demi mengantisipasi badai resesi ekonomi akibat Pandemi COVID-19. Sumber pendanaan BUM Desa dapat diperoleh dari dana desa dan dari usaha sendiri (Rahayu & Indriastuti, 2020). Secara konseptual bagi pemerintah desa, jika BUM Desa dapat dikelola dengan baik, maka pendapatan asli desa (PADesa) juga akan meningkat, dengan meningkatnya PADesa, maka proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat akan dapat meningkat. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut perlu diperhatikan mengenai pengelolaan BUM Desa secara baik dan profesional (Purbawati et al., 2019; Winarsi & Moechthar, 2020). Dalam Penelitian ini peneliti merasa tertarik untuk melihat perbandingan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dari berbagai desa yang ada di berbagai daerah di Indonesia.

METODE

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif yaitu metode penelitian yang dilakukan melalui tinjauan pustaka dan untuk mendapatkan keterangan terhadap suatu masalah tertentu secara mendalam tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Chu, 2015; Rahman & Mohezar, 2020; Samsuddin et al., 2020). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu riset atau penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Pendekatan induktif yaitu cara penyusunan/penarikan kesimpulan dengan metode pemikiran yang bertolak dari kaidah (hal-hal peristiwa) khusus untuk melakukan hal-hal yang umum. Proses dan

makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menitikberatkan pada Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Masa Pandemi COVID-19.

HASIL & PEMBAHASAN

Dampak Pandemi COVID-19 dalam perekonomian Desa memang cukup berdampak dari segi daya beli masyarakat, pembuatan acara serta usaha kecil menengah yang dilakukan oleh masyarakat. Begitupun dengan BUM Desa, BUM Desa sebagai lembaga yang dibentuk untuk kesejahteraan masyarakat mengalami dampak yang cukup signifikan.

Masa Pandemi COVID-19 merupakan momentum yang baik bagi BUM Desa untuk menata kembali orientasinya. Bukan hanya sebagai unit bisnis yang hanya mengejar keuntungan ekonomi semata, tetapi juga menjalankan Fungsi Sosial dengan lebih berperan dalam membangun jaring pengaman sosial bagi masyarakat. Selain itu, masa ini juga menjadi momentum penting untuk berbenah diri agar mampu menghadapi semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi BUM Desa akibat Pandemi COVID-19. Persoalan ekonomi yang dihadapi baik oleh BUM Desa maupun masyarakat semakin kompleks akibat pandemi COVID-19. Persoalan tersebut antara lain penurunan perekonomian desa akibat kesulitan yang dialami oleh masyarakat petani untuk memasarkan hasil produksinya, terpuruknya sektor UMKM, penurunan daya beli masyarakat, dan peningkatan beban ekonomi Desa akibat banyaknya pemudik yang pulang ke Desa dengan membawa persoalan mereka akibat hilangnya pekerjaan di kota.

BUM Desa harus berperan untuk mengatasi dampak ekonomi dan sosial masyarakat akibat Pandemi COVID-19

sebagai representasi pemerintah desa yang wajib hadir dalam masa sulit tersebut. Untuk dapat memberikan kontribusi maksimal dalam upaya mengatasi berbagai persoalan yang muncul di desa akibat pandemi COVID-19, maka BUM Desa perlu melakukan konsolidasi lembaga; serta refleksi keadaan dan melakukan transformasi organisasi, orientasi dan eksistensi.

Selain itu, BUM Desa harus mampu mengembangkan strategi bisnis baru dengan mengalihkan usaha yang terdampak dari Pandemi COVID-19 ke usaha yang tidak terdampak, melakukan konsolidasi internal, mendorong pemerintah Desa menambah penyertaan modal, serta membangun kemitraan dengan pelaku ekonomi lokal.

Guna mencegah terjadinya krisis pangan, maka BUM Desa bisa berperan dalam menjaga ketahanan pangan dengan melakukan berbagai kegiatan, baik dalam aspek produksi, distribusi maupun konsumsi. Kunci agar BUM Desa mampu melakukan peran tersebut adalah dengan melakukan inovasi dan memilih berbagai jenis usaha yang belum banyak dilakukan oleh pihak lain. Berbagai jenis usaha yang bisa dilakukan oleh BUM Desa dalam masa Pandemi COVID-19 antara lain: pemasar produk pertanian, perkebunan, peternakan, kerajinan, produksi dan perdagangan es batu, sarana produksi pertanian, usaha pertanian, peternakan perkebunan, dan pengolahan hasil komoditi desa, kredit pembiayaan produksi, penyediaan input produksi, penyediaan peralatan produksi agro, pengumpulan produk agro, penyediaan pergudangan, penyediaan transportasi, hingga pemasaran produk agro.

Strategi pengembangan BUM Desa agar mampu mengembangkan usaha di masa Pandemi COVID-19 adalah dengan melakukan inovasi dan pemanfaatan teknologi, penguatan permodalan usaha, pengadaan sarana dan prasarana, dan penguatan kapasitas SDM yang baik dalam aspek manajerial, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) maupun

kemampuan melakukan negosiasi (Karim et al., 2020).

BUM Desa sebagai representasi Desa yang merupakan unit terkecil penyelenggara Negara juga memiliki kewajiban yang sama untuk melindungi Masyarakat (Asis et al., 2020). BUM Desa dalam menjalankan usaha harus selalu menerapkan prinsip subsidiaritas, yaitu prinsip yang melarang BUM Desa untuk mematikan usaha yang sudah dilakukan oleh warga masyarakat yang ada di desa tersebut.

Banyak kasus yang menunjukkan bahwa selama ini banyak BUM Desa yang telah meninggalkan prinsip tersebut. Sebagai contoh, banyak Desa yang mengambil peran pengelolaan destinasi wisata yang selama ini dilaksanakan oleh warga masyarakat melalui kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Hal itu menyebabkan warga masyarakat tidak dapat lagi mengambil manfaat dari keberadaan destinasi wisata yang ada di Desa tersebut, sehingga terjadi konflik antara BUM Desa dengan warga masyarakat. Berikut ini peneliti membandingkan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dari berbagai daerah:

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa pada masa pandemi di Desa Wiau Kecamatan Posumaen Dalam rangka pelaksanaan perencanaan pembangunan desa yang baik, kementerian desa mengeluarkan Program Inovasi Desa (PID) pada tahun 2019 yang dipayungi oleh peraturan eputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi (PDTT) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa. Program Inovasi Desa (PID) merupakan salah satu upaya Kemendesa PDTT untuk meningkatkan kapasitas Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam mengembangkan rencana dan melaksanakan pembangunan Desa secara berkualitas agar

dapat meningkatkan produktivitas rakyat dan kemandirian ekonomi serta mempersiapkan pembangunan sumberdaya yang memiliki daya saing. Peningkatan kapasitas Desa dalam PID dilakukan melalui kegiatan Pengelolaan Pengetahuan Inovasi Desa (PPID) dan mempersiapkan lembaga Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) untuk membantu pembangunan desa dengan fokus pada bidang Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Infrastruktur Desa, yang sejalan dengan program prioritas Kemendesa PDTT dalam meningkatkan produktivitas desa.

Dalam rangka menjalankan usahanya, penting adanya organisasi yang baik beserta pelaksanaan tugas pokok masing-masing bidang, terutama BUM Desa Mutaunsa memiliki 2 jenis usaha, otomatis berbeda juga dalam pengelolannya. Namun Pengorganisasian pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Mutaunsa terlihat sudah berjalan baik sebelum adanya Pandemi dapat dilihat dari adanya struktur organisasi BUM Desa yang ada di Kantor Desa. Namun setelah ada Pandemi cukup berpengaruh terhadap pendapat BUM Desa. Selanjutnya pelaksanaannya dapat terlihat pada garis perintah dalam struktur organisasi. Dimana pemimpin memberikan perintah untuk dijalankan. Tujuan utama dalam pemberian perintah oleh atasan kepada bawahan ialah untuk memberikan kegiatan bawahan, agar kegiatan masing-masing bawahan yang beraneka ragam itu terkoordinasi pada satu arah, yaitu yang menjadi tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) tersebut. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Mutaunsa selalu memberi kan perintah kepada bawahannya apabila tidak tertuang dalam program kerja yang telah tersedia, sebab apabila yang telah tertuang dalam program kerja setiap pengurus BUM Desa ini sudah mengerti dengan tugasnya masing-masing.

Pengawasan merupakan aspek dilakukan dalam setiap organisasi terutama menyangkut

keuangan. Untuk itu sebelum dilakukan pembentukan pengurus BUM Desa telah dituangkan terlebih dahulu dalam Perdes mengenai system pengawasan BUM Desa. Pengawasan BUM Desa dilakukan oleh Kepengurusan Pengawas BUM Desa yang terdiri dari Ketua; Wakil Ketua merangkap 16 anggota; Sekretaris merangkap anggota; dan Anggota sesuai dengan perdes tentang BUM Desa. Ditengah masa Pandemi COVID-19 ini pengawasan terhadap BUM Desa tetap berjalan sebagaimana yang diatur dalam peraturan dan berdasar anggaran dasar anggaran rumah tangga yang telah ditetapkan.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Desa Kamanga Kecamatan Tompaso Dalam tahapan perencanaan pembentukan BUM Desa didasari oleh tuntutan undang-undang desa dan sebagai bentuk penerapan dari Dana Desa. Dilihat dari tahap perencanaan didalam membuat unit-unit usaha BUM Desa Desa Kamanga memperhatikan lingkungan yang ada disekitarnya sehingga program yang dibuat tidak sia-sia dan membentuk suatu unit usaha BUM Desa melalui musyawarah. Hal tersebut didasari dengan kebutuhan masyarakat Desa serta potensi desa. Untuk itu jenis usaha BUM Desa desa Kamanga ada 3 jenis usaha yakni Peternakan, Gas Lpg dan distributor gula pasir. Dalam pelaksanaan BUM Desa, Pemerintah Desa membentuk pengurus yang dituangkan dalam Perda Nomor 1 dan Nomor 2 tahun 2017 Desa Kamanga yang mengatur organisasi BUM Desa serta susunan organisasinya. Dari sturuktur tersebut dapat dilihat hirarki pekerjaan masing-masing bagian. Demi menjalankan tujuannya yakni kesejahteraan masyarakat, pemilihan program yang dapat dikerjakan oleh banyak orang dan sesuai dengan sumberdaya Desa.

Dalam rangka menjamin keberlangsungan BUM Desa Kamang, sesuai dengan amanat undang-undang, maka pemerintah desa membentuk pengurus pengawas BUM

Desa Kamang yang diatur dalam Perdes selain itu bentuk pengawasan juga dituangkan dalam AD/RT BUM Desa Desa Kamang. Secara keseluruhan pengawasan BUM Desa Kamang terdiri dari 2 yakni pengawas internal yakni pengurus pengawas BUM Desa, Kepala Desa dan Masyarakat dan pengawas Eksternal yakni Kabupaten Minahasa oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pandemi COVID-19 telah berdampak pada ketahanan pangan. Terhentinya mobilitas barang dan jasa domestik akibat adanya pembatasan sosial dan kebijakan pembatasan ekspor bahan pangan yang diterapkan oleh Negara produsen bahan pangan telah meningkatkan potensi terjadinya krisis pangan di banyak Negara termasuk Indonesia.

Pengelolaan BUM Desa Di Era Pandemi COVID-19 di Desa Kembang Kerang Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di desa Kembang Kerang Kabupaten Lombok Timur pengelolaan BUM Desa lebih menitikberatkan Pengimplementasian digitalisasi badan usaha milik Desa namun belum berjalan dengan baik dikarenakan masih adanya kendala dalam pelaksanaannya. Anggaran yang tidak mencukupi, sumberdaya manusia maupun sarana dan prasarana yang kurang memadai menjadi faktor yang menghambat pelaksanaan implementasi BUM Desa digital ini. Perilaku implementasi digitalisasi BUM Desa ini menambahkan temuan baru yang memperluas penelitian pada bidang literasi informasi dan digital. Guna meningkatkan peran BUM Desa dalam perekonomian masyarakat, disarankan untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial agar mempermudah pemasaran produk BUM Desa serta melakukan sosialisasi yang lebih baik lagi agar penggunaan digitalisasi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa bisa optimal.

Pandemi COVID-19 juga telah menimbulkan respon yang berbeda-beda baik dari masyarakat maupun pemerintah. Pada tataran pemerintahan, pemerintah-pemerintah

di dunia mengeluarkan kebijakan yang berbeda-beda sesuai dengan pertimbangan masing-masing. Ada pemerintah yang menjalankan kebijakan *lockdown*, namun ada juga yang melaksanakan kebijakan Pembatasan Sosial. Meskipun ada perbedaan dalam menanggapi dampak Pandemi COVID-19, namun secara prinsip semua negara memiliki kewajiban yang sama, yaitu harus melindungi rakyatnya.

Hilangnya prinsip subsidiaritas dalam UU Desa secara *de-facto* membuat ekonomi komunitas yang inklusif berpeluang diambil-alih oleh kekuasaan Negara melalui BUM Desa. Tindakan BUM Desa melakukan merger dan akuisisi atas Pokdarwis menjadikan Pokdarwis mengalami proses disipasi dan mengakibatkan kinerja wisata yang stagnan dan merosot, bahkan gulung tikar. BUM Desa akan bermakna dalam konteks pengembangan ekonomi lokal pada masa Pandemi COVID-19 ini, jika BUM Desa mampu mengambil peran dalam mendukung kekuatan-kekuatan ekonomi komunitas dan atau merintis usaha yang tidak dikuasi rakyat. Salah satu agenda penting bagi BUM Desa dari aspek kelembagaan adalah harmonisasi pengaturan (*rule of the game*) terkait UU Pariwisata, UU Desa dan UU Keistimewaan, sehingga membentuk tata-kelola yang mengarahkan para pelaku Ekonomi.

Menurut Peneliti sendiri strategi yang bisa dilakukan oleh BUM Desa di masa Pandemi COVID-19 ini adalah melakukan konsolidasi internal, penataan kembali destinasi wisata yang dikelola, mengemas paket wisata yang lebih sesuai dengan masa new normal, memunculkan usaha baru yang muncul akibat Pandemi COVID-19 misalnya produksi masker anti air, dan memikirkan pengembangan usaha lain selain usaha yang selama ini dilaksanakan. Sedangkan terkait dengan kondisi BUM Desa yang menerima penyertaan modal tapi tidak mampu menghasilkan keuntungan, semua itu tergantung dari niat awal saat mendirikan BUM Desa, apakah hanya untuk formalitas atau memang bertujuan untuk mengembangkan

usaha. Apabila pendirian BUM Desa tersebut hanya formalitas belaka karena mengikuti aturan dan tidak dipersiapkan dengan baik, maka wajar bila BUM Desa tersebut tidak dapat berkembang. Yang terjadi dalam pengelolaan destinasi wisata antara warga masyarakat dengan BUM Desa terjadi karena aturan yang tidak jelas. “Seharusnya semua diberi peluang oleh Negara untuk melakukan pengelolaan sehingga mereka dapat bersinergi dengan baik,”. Adanya konflik antara warga masyarakat dan BUM Desa, khususnya dalam pengelolaan destinasi wisata terjadi karena tumpang tindihnya aturan Hukum yang mengatur kegiatan pariwisata, yaitu antara UU No 9 Tahun 1970 yang mengatur tentang liberalisasi sektor wisata yang mengakibatkan dominannya sektor privat, dan UU No. 10 tahun 2003 tentang wisata yang juga memberi peran pada masyarakat untuk melakukan pengelolaan destinasi wisata.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dari berbagai daerah telah mengupayakan cara yang tepat untuk Pengelolaan BUM Desa di Era Pandemi COVID-19. Secara menyeluruh dari berbagai daerah di Indonesia bahwa mengelola BUM Desa dimulai dengan cara Perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan terhadap Bumdes tetap berjalan sebagaimana yang diatur dalam peraturan dan berdasar anggaran dasar anggaran rumah tangga yang telah ditetapkan. Dan adapula dengan cara membuka usaha seperti Peternakan, Penjualan gas lpg dan distributor gula pasir serta pengelolaan BUM Desa dapat dilakukan dengan mengimplementasikan digitalisasi agar Pengelolaannya bisa berjalan lebih Optimal. Dan disini juga Peneliti menawarkan strategi yang bisa dilakukan oleh BUM Desa di masa pandemi ini yaitu melakukan konsolidasi

internal, penataan kembali destinasi wisata yang dikelola, mengemas paket wisata yang lebih sesuai dengan masa New Normal, memunculkan usaha baru yang muncul akibat pandemi misalnya produksi masker anti air, dan memikirkan pengembangan usaha lain selain usaha yang selama ini dilaksanakan. Tentunya perlu pembekalan yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam memberdayakan masyarakat untuk menghadapi keadaan di masa Pandemi COVID-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Asis, A., Salam, M., Siregar, A. R., Salman, D., & Jamil, M. H. (2020). Analyzing performance of BUMDES: Learn from waste bank and clean water units. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 575(1), 12168.
- Buheji, M., da Costa Cunha, K., Beka, G., Mavric, B., De Souza, Y. L., da Costa Silva, S. S., Hanafi, M., & Yein, T. C. (2020). The extent of covid-19 pandemic socio-economic impact on global poverty. a global integrative multidisciplinary review. *American Journal of Economics*, 10(4), 213–224.
- Cacciapaglia, G., Cot, C., & Sannino, F. (2020). Second wave COVID-19 pandemics in Europe: a temporal playbook. *Scientific Reports*, 10(1), 1–8.
- Chu, H. (2015). Research methods in library and information science: A content analysis. *Library & Information Science Research*, 37(1), 36–41.
- Gross, B., Zheng, Z., Liu, S., Chen, X., Sela, A., Li, J., Li, D., & Havlin, S. (2020). Spatio-temporal propagation of COVID-19 pandemics. *EPL (Europhysics Letters)*, 131(5), 58003.
- Gustin, F. A., Nur, S. A., & Yuniawan, R. (2019). *The Role of Environmental Management and Green Innovation (case study of BUMDES (Village Business Agency))*.

- Izzalqurny, T. R., Handayati, P., Jannah, M., & Fitriyaningsih, S. K. (2021). The role of tourism BUM Desa in the Pandemic era in increasing village original income: A case study in Jember Regency, Indonesia. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478)*, 10(6), 278–284.
- Karim, A., Musa, C. I., & Romansyah Sahabuddin, M. A. (2020). Regional economic growth the role of BUMDes institutions in Enrekang Regency. *International Journal of Creative Research Thoughts*, 8(11), 225–229.
- Lubis, A., & Muda, I. (2018). Analysis of Ownership and Stock Composition of Vocational Business Enterprises (BUMDES) and Its Impact on "Omset" of Business Owned Enterprises. *Advances in Economics, Business and Management Research (AEBMR)*, 46, 274–277.
- Muhammad, M., Iskandar, H., Rasyidin, R., Ahyar, J., & Kurniawan, R. (2021). Village (Gampong) Owned Enterprises with Local Wisdom Between Opportunities and Threats in The Area Of COVID-19 Pandemic (Research at The Government Environment of Lhokseumawe City). *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 4(2), 212–228.
- Nicola, M., Alsafi, Z., Sohrabi, C., Kerwan, A., Al-Jabir, A., Iosifidis, C., Agha, M., & Agha, R. (2020). The socio-economic implications of the coronavirus pandemic (COVID-19): A review. *International Journal of Surgery*, 78, 185–193.
- Purbawati, D., Budiarmo, A., Nurseto, S., Ainuddin, I., & Pinem, R. J. (2019). BUMDES Financial Good Corporate Governance (Case Study at BUMDES in Tembarak District, Temanggung Regency). *3rd International Conference on Indonesian Social & Political Enquiries (ICISPE 2018)*, 119–125.
- Rahayu, N. T., & Indriastuti, A. (2020). Analysis of the Potential and Obstacles To Establishing a Village-Owned Enterprise (BUMdes) in the Guntur Subdistrict, Demak Regency. *Jurnal Stie Semarang (Edisi Elektronik)*, 12(1), 109–119.
- Rahman, A. R. A., & Mohezar, S. (2020). Ensuring continued use of a digital library: a qualitative approach. *The Electronic Library*.
- Samsuddin, S. F., Shaffril, H. A. M., & Fauzi, A. (2020). Heigh-ho, heigh-ho, to the rural libraries we go!-A systematic literature review. *Library & Information Science Research*, 42(1), 100997.
- Setyobakti, M. (2018). Identification of Business Enterprises Bumdes Based on Social and Economic Aspect (Case Study at Bumdes Ijen Lestari Tamansari Village District of Banyuwangi). *Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi Dan Manajemen (JEMA)*, 14(2).
- Sofianto, A., & Risandewi, T. (2021). Mapping of Potential Village-Owned Enterprises (BUMDes) for Rural Economic Recovery during the COVID-19 Pandemic in Central Java, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 887(1), 12022.
- Sofyani, H., Atmaja, R., & Rezki, S. B. (2019). Success factors of village-owned enterprises (BUMDes) performance in Indonesia: An exploratory study. *Journal of Accounting and Investment*, 20(2), 44–58.
- Srirejeki, K. (2018). Empowering the role of village owned enterprises (BUMDes) for rural development: case of Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 20(1), 5–10.
- Syafingi, H. M., Dewi, D. A. S., Suharso, H., Sulistyaningsih, P., & Rahmawati, U. (2020). Village fund optimization strategy for rural community welfare in Indonesia. *J. Crit. Rev.*, 7(7), 580–583.

- Syahza, A., Savitri, E., Asmit, B., & Meiwanda, G. (2021). Small-scale agricultural product marketing innovation through BUMDes and MSMEs empowerment in coastal areas. *Management Science Letters, 11*(8), 2291–2300.
- Vasiev, M., Bi, K., Denisov, A., & Bocharnikov, V. (2020). How COVID-19 pandemics influences chinese economic sustainability. *Форсаїм, 14*(2 (eng)), 7–22.
- Winarsi, S., & Moechthar, O. (2020). Implementation of The Law Principles of Good Corporate Governance in Indonesian Village-Owned Enterprise (BUMDes). *Yuridika, 35*(3), 635–656.
- Winarsi, S., Widyantoro, A., & Moechthar, O. (2018). The Law Principles for Village-Owned Enterprises (BUMDes) Management in Indonesia to Improve the Village's Economy. *Sociological Jurisprudence Journal, 1*(2), 130–136.

**PEMBERDAYAAN PETANI DI DESA MATTANETE BUA
KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN**
*FARMERS EMPOWERMENT IN MATTANETE BUA VILLAGE, PALAKKA
DISTRICT, BONE REGENCY, SOUTH SULAWESI PROVINCE*

Muhammad Idris Patarai

Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan

Email: idrispatarai@ipdn.ac.id

ABSTRAK

Pemberdayaan saat ini gencar dilakukan oleh Pemerintah. Dalam artikel ini penulis memfokuskan pemberdayaan petani yang bertujuan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan keahlian petani dalam mengelola produksi hasil pertaniannya. Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini menggambarkan aspek-aspek yang berkaitan dengan fokus yang diamati dan dikaji. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam upaya pemberdayaan petani di Desa Mattanete Bua telah terlaksana dengan baik namun masih didapati beberapa kekurangan seperti regulasi yang dilakukan Pemerintah belum sepenuhnya optimal, kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai, dan partisipasi masyarakat petani masih sangat rendah terkait sosialisasi, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian oleh Pemerintah Desa Mattanete Bua. Saran dari penulis adalah masyarakat petani di Desa Mattanete Bua harus mendapatkan perhatian dari semua pihak yang terkait baik Pemerintah maupun masyarakat lainnya, inovasi pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah agar petani dapat berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan yang dilaksanakan, pengaturan lahan pertanian dan pemukiman serta sarana prasarana yang dibutuhkan oleh petani perlu diperhatikan.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Petani Desa Mattanete Bua

ABSTRACT

Empowerment is currently being intensively carried out by the Government. In this article, the author focuses on empowering farmers with the aim of developing and optimizing farmers' skills in managing their agricultural production. The author uses a qualitative descriptive method with inductive research. This method describes aspects related to the observed and studied focus. The data collection methods used were observation, interviews, and document studies. The results showed that the efforts to empower farmers in Mattanete Bua Village had been carried out well but there were still some shortcomings such as the regulations carried out by the Government were not yet fully optimal, the quality of human resources was inadequate, and the participation of the farming community was still very low related to socialization, counseling, agricultural education and training by the Mattanete Bua Village Government. Suggestions from the author are that the farming community in Mattanete Bua Village should get attention from all related parties, both the Government and other communities, the empowerment innovations carried out by the Government so that farmers can actively participate in the empowerment program implemented, the regulation of agricultural land and settlements as well as infrastructure that needed by farmers need to be considered.

Keywords: Empowerment, Mattanete Bua Village Farmers

PENDAHULUAN

Dewasa ini, kata pemberdayaan menjadi sebuah konsep yang menarik perhatian utama oleh pemimpin dan organisasi di dunia. Pemimpin dituntut untuk dapat memberdayakan anggotanya, sehingga tidak hanya pemimpinlah yang dapat menjadi seorang pemimpin namun anggotanya juga dapat menjadi seorang pemimpin bagi diri sendiri yang nantinya akan dapat memberikan dampak positif bagi organisasi secara keseluruhan. Tentunya hal tersebut menjadi menjadi sesuatu yang menarik untuk diungkapkan. Salah satu tujuan otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dengan tujuan mempercepat terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, asas otonomi oleh Pemerintah Daerah ditangani secara fokus terutama pada peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan antar daerah dan peran masyarakat dalam mengembangkan dan membangun daerahnya masing-masing.

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah harus dimulai dengan pemberian ruang dan kesempatan yang cukup untuk menampung aspirasi masyarakatnya yang dianggap mempunyai potensi dalam membangun daerah. Terciptanya kesejahteraan masyarakat merupakan indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Dalam aspek membangun dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pemberdayaan diharapkan sebagai faktor untuk membangun dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar selalu dapat mandiri, serta tidak selalu bergantung pada Pemerintah.

Pemberdayaan masyarakat dapat ditempuh dengan peningkatan kemampuan dan keahlian SDM dengan apa yang menjadi tujuan pembangunan sumberdaya. Seperti diketahui

Indonesia merupakan negara agraris dengan ekonomi yang kebanyakan mengendalikan sektor pertaniannya. Kesempatan seperti ini dianggap sebagai hal serius, sebab kebanyakan masyarakatnya memenuhi kebutuhan hidup sangat bergantung pada hasil pertanian (mata pencaharian petani).

Pemberdayaan masyarakat muncul pertama kali pada saat aktivis gerakan Black Panther memobilisasi politik di USA pada tahun 1960 dan pada pertengahan tahun 80-an kaum wanita mempopulerkan kembali konsep pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan terjemahan dari kata "*empowerment*". Istilah pemberdayaan di Indonesia mulai populer pada tahun 1998 dan terus berkembang pada era reformasi.

Pemberdayaan yang diadaptasikan dari istilah *empowerment* berkembang di Eropa mulai abad pertengahan, terus berkembang hingga diakhir 70-an, 80-an, dan awal 90-an. Konsep pemberdayaan tersebut kemudian mempengaruhi teori-teori yang berkembang belakangan. Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Ife (1995) menyatakan bahwa "*empowerment is a process of helping disadvantaged groups and individual to compete more effectively with other interests, by helping them to learn and use in lobbying, using the media, engaging in political action, understanding how to 'work the system,' and so on*" (Ife, 1995). Definisi tersebut mengartikan konsep pemberdayaan (*empowerment*) sebagai upaya memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu.

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk mencapai keadilan sosial. Payne (1997:268) menyatakan keadilan sosial dengan memberikan ketentraman kepada masyarakat yang lebih besar serta persamaan politik dan sosial melalui upaya saling membantu dan belajar melalui pengembangan langkah-langkah kecil guna tercapainya tujuan yang lebih besar. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan

meraka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan akses kesejahteraan, dan kemampuan kultur serta politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu: kekuasaan di dalam (*power within*), kekuasaan untuk (*power to*), kekuasaan atas (*power over*) dan kekuasaan dengan (*power with*).

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang digunakan manusia untuk memperoleh bahan pangan, bahan baku produksi, atau energi, serta untuk mengelola lingkungan hidup. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk pertanian yaitu budidaya tanaman atau bercocok tanam (*crop cultivation*) serta pembesaran hewan ternak (*raising*), walaupun masih terdapat pula pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan seperti ekstraksi atau eksploitasi.

Pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat penting peranannya dalam pembangunan perekonomian bangsa. Pemerintah sudah berkomitmen melaksanakan program revolusi hijau dengan meningkatkan produksi disektor pertanian sebagai tumpuan dalam memenuhi kebutuhan pangan. Letak Indonesia yang berada di garis khatulistiwa dengan iklim tropis memberikan keuntungan untuk mengembangkan sektor pertanian dengan mudah.

Pemberdayaan petani meliputi perencanaan, perlindungan petani, pembiayaan dan pendanaan petani, dan peran serta masyarakat, yang diselenggarakan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatn, kebersamaan, keterbukaan dan berkelanjutan. Pemberdayaan didasarkan pada kondisi masyarakat. Setiap masyarakat memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Petani memiliki kebutuhan yang berbeda dengan petani lainnya. Dilakukan dengan tepat sasaran dan efisien memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan dan kemajuan pertanian.

Partisipasi para petani dalam pelaksanaan program pemberdayaan tidak bisa dipisahkan. Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers (1991: 154-155) sebagai berikut pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; kedua, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; ketiga, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Gaventa dan Valderma dalam Siti Irene Astuti D. (2009: 17 34-35) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat.

Partisipasi menurut Effendi dalam Siti Irene Astuti D. (2009: 37), terbagi atas partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam kondisi tertentu, masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan di mana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien. Sedangkan partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa di mana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Sekretariat Bina Desa (1999: 32-33) mengidentifikasi partisipasi masyarakat

menjadi 7 (tujuh) tipe berdasarkan karakteristiknya, yaitu partisipasi pasif/manipulatif, partisipasi dengan cara memberikan informasi, partisipasi melalui konsultasi, partisipasi untuk insentif materil, partisipasi fungsional, partisipasi interaktif, dan self mobilization. Menurut Basrowi dalam Siti Irine Astuti D.(2009: 37), partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu “partisipasi non fisik dan partisipasi fisik”. Partisipasi fisik adalah partisipasi masyarakat (orang tua) dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan, seperti mendirikan dan menyelenggarakan usaha-usaha beasiswa, membantu pemerintah membangun gedung-gedung untuk masyarakat, dan menyelenggarakan usaha-usaha perpustakaan berupa buku atau bentuk bantuan lainnya. Sedangkan partisipasi non fisik adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak ada kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah.

Undang-Undang No 19 Tahun 2013 yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 Tahun 2013 tentang Pembinaan Kelompok Tani yang bertujuan sebagai petunjuk pelaksanaan dan upaya pembinaan bagi petani. Petani diberi ruang dan perlindungan untuk menghasilkan produksi pertanian dengan menyediakan bantuan berupa sarana dan prasarana, penjaminan modal kembali apabila gagal panen, dan resiko harga dari Pemerintah Daerah.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan menjelaskan bahwa pertanian di Sulawesi Selatan memiliki keunikan tersendiri dan perlu adanya dasar hukum yang

mengatur dan melindungi sektor pertanian. Karena berdasarkan data lahan pertanian pangan di Sulawesi Selatan cenderung semakin berkurang dikarenakan alih fungsi yang mengancam kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan masyarakat. Pemberdayaan dan kesejahteraan para petani juga masih sangat kurang perhatiannya oleh Pemerintah.

Sektor pertanian di Sulawesi Selatan merupakan sektor yang paling dominan dibandingkan dengan sektor lainnya. Berdasarkan data tahun 2004 sebagian besar penduduk Sulawesi Selatan masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian yaitu 56,94%. Sektor pertanian di Sulawesi Selatan merupakan pilar utama penopang kesediaan pangan baik untuk daerah maupun untuk negara. Ketersediaan hasil pertanian yang melimpah membuat Sulawesi Selatan menjadi salah satu dari delapan Provinsi yang dijuluki sebagai lumbung padi nasional yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Lampung, dan Sumatera Selatan.

Kabupaten Bone merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di pesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak ±174 km dari Kota Makassar Ibu kotanya adalah Tanete Riattang. Mempunyai garis pantai sepanjang 138 km dari arah selatan kearah utara. Secara astronomis terletak dalam posisi 4'13"- 5'6" Lintang Selatan dan antara 119'42"-120' 40" Bujur Timur. Kabupaten Bone adalah kabupaten atau kotamadya dengan jumlah penduduk kedua terbesar setelah Kota Makassar.

Wilayah administrasi Kabupaten Bone terdiri atas 27 (dua puluh tujuh) kecamatan yang diperinci menjadi 328 (tiga ratus dua puluh delapan) desa dan 44 (empat puluh empat) kelurahan dengan jumlah dusun sebanyak 1.098 (seribu Sembilan puluh delapan) dan lingkungan sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) dengan jumlah penduduk di Kabupaten Bone yaitu sebesar 738.515. (BPS Kab. Bone 2016)

Sistem pertanian pada masyarakat yang Kabupaten Bone yang dominan pertanian sangatlah vital artinya bagi kehidupan mereka. Sistem pertanian bagi mereka adalah merupakan cara bagaimana mereka bisa hidup. Terlebih untuk masyarakat yang masih bersahaja, yang kehidupannya tergantung sepenuhnya pada pertanian. Maka bagi masyarakat desa semacam itu, sistem pertanian adalah identik dengan sistem perekonomian mereka, yakni bila ekonomi diartikan sebagai cara “pemuhan keperluan jasmani manusia” sejauh ini digeneralisasi secara umum, desa-desa di Indonesia umumnya adalah pertanian.

Kecamatan Palakka merupakan sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Kecamatan Palakka berbatasan dengan beberapa kecamatan lain yaitu Kecamatan Awangpone (utara), Kecamatan Tanete Riattang Barat (timur), Kecamatan Barebbo (selatan), Kecamatan Tellu Siattinge dan Ulaweng (barat). Jumlah penduduk di Kecamatan Palakka terbilang cukup besar dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Bone yaitu sebesar 21.659 jiwa (data BPS tahun 2017). Terdapat 15 desa dengan potensi sumberdaya yang berbeda-beda.

Kecamatan Palakka merupakan daerah dengan keadaan geologis yang sangat mendukung berlangsungnya kegiatan pertanian dan perkebunan. Letak geografis yang sangat strategis dekat dengan ibu kota kabupaten Bone dapat mempermudah akses distribusi dan penjualan hasil pertanian yang dihasilkan. Sarana dan prasarana yang tersedia sangat membantu para petani dalam menjalankan kegiatan pertanian mereka.

Salah satu desa di Kecamatan Palakka yaitu Desa Mattanete Bua yang menjadi daerah dengan hasil pertanian yang cukup besar setiap tahunnya. Mattanete Bua pada zaman Pra kemerdekaan RI merupakan ronde dari wilayah kerajaan Bone. Yang telah beberapa kali mengalami pergantian kepemimpinan awal mulanya dipimpin oleh “PatiTanete”

selanjutnya dipimpin oleh Mado selanjutnya dipimpin oleh kepala desa Pada tahun 1960 Tanete Buang Baru dikuatkan sebagai Desa dan Maduri merupakan wilayah Tanete buang dan pada tahun 1971 Tanete Buang di ubah namanya menjadi”Desa Mattanete Bua” yang singkatan dari Maduri dan Tanete buang.

Letaknya yang dekat dengan daerah perkotaan menjadi suatu keunggulan tersendiri yaitu 10 km dari ibu kota Kabupaten Bone. Desa Mattanete Bua berdekatan dengan beberapa Desa Lainnya yaitu Desa Tirong Kecamatan Palakka (Utara), Desa Maduri Kecamatan Barebbo (Timur), Desa Wollangi Kecamatan Ponre (Selatan), dan Desa Cinddong Kecamatan Ponre (Barat). Luas wilayah Desa Mattanete Bua sebesar 6 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 1.440 jiwa (Data Desa 2020). Memiliki 4 dusun yaitu dusun Ta’, Dusun Tanete Boang, Dusun Tanete Lamoko, Dusun Sanrangeng.

Desa Mattanete Bua memiliki potensi pertanian yang sangat besar dibandingkan dengan desa lainnya seperti jagung, cengkeh, padi, dan cokelat dengan rata-rata hasil panen per-tahun sebesar 7-10 ton. Hal ini memungkinkan ketersediaan hasil pertanian bagi masyarakat kabupaten Bone khususnya masyarakat Desa Mattanete Bua Kecamatan Palakka. Pengolahan, pemasaran, dan pendistribusian hasil pertanian oleh masyarakat dipermudah dengan adanya sarana prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Desa Mattanete Bua. Namun akses jalan di Desa Mattanete Bua masih sangat kurang memadai. Untuk jalan tani masih berupa jalan tanah dan bebatuan yang belum ada perbaikan dan perhatian dari pemerintah setempat. Hal ini menyulitkan petani dalam bekerja dan melakukan produksi hasil pertanian. Sarana dan prasarana yang cukup memadai memberikan kemudahan kepada para petani untuk mengembangkan dan meningkatkan hasil pertaniannya.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor terpenting dalam peningkatan suatu

daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah khususnya pemerintah Desa Mattanete Bua bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian karena salah satu sektor yang mampu menunjang perekonomian masyarakat. Menurunnya jumlah produksi pertanian di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan menjadi masalah dalam kajian ini. Estimasi luas panen hasil pengamatan KSA dari Januari 2019 hingga Desember 2019 di Bone sebesar 169,4 ribu hektar menurun 44,92 ribu hektar (21%) dari luas panen tahun sebelumnya. Sementara itu, estimasi produksi padi di Bone dari Januari hingga Desember 2019 sebesar 774,34 ribu ton gabah kering giling (GKG). Nilai ini menurun sekitar 231,17 ribu hektar (23%). Berdasarkan identifikasi dan analisis tersebut maka masalah yang dijadikan sebagai fokus dari kajian dapat dirumuskan mengenai bagaimana optimalisasi dan implementasi pemberdayaan petani di Desa Mattanete Bua, faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan pemberdayaan petani dan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemberdayaan petani di Desa Mattanete Bua Kecamatan Palakka Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan terutama data primer dan didukung oleh data sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara langsung dengan para petani dan perangkat desa di Desa Mattanete Bua. Selain itu, pengumpulan data primer juga dilakukan dengan melaksanakan *focus group discussion* dengan semua stakeholder di Desa Mattanete Bua. Sedangkan Data sekunder diambil dari dokumen-dokumen pemerintah desa, meliputi: rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa. Adapula data tersier yang diambil dari internet. Beberapa

artikel dan ditelusuri dengan menggunakan internet. Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjelaskan secara terperinci, melakukan sintesis atas data-data, menyusun kedalam pola, memilih bagian yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik Analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini didasarkan pada tiga hal, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Mattanete Bua

Mattanete Bua pada zaman Pra kemerdekaan RI merupakan ronde dari wilayah kerajaan Bone. Yang telah beberapa kali mengalami pergantian kepemimpinan awal mulanya dipimpin oleh "PatiTanete". Selanjutnya dipimpin oleh Mado selanjutnya dipimpin oleh kepala desa. Pada tahun 1960 Tanete Buang Baru dikuatkan sebagai Desa dan Maduri merupakan wilayah Tanete buang dan pada kenal 1971 Tanete Buang di ubah namanya menjadi "Desa Mattanete Bua" yang singkata dari Maduri dan Tanete buang.

Secara topografi ketinggian lokasi dari permukaan air sekitar 100-300meter diatas permukaan laut sehinggia beriklim panas/lembab, dengan kontur tanah yang beraneka ragam, yaitu datar, landau, miring dan terjal. Struktur tanahnya cenderung labil dan terletak jauh dari pegunungan dan tepi pantai. Desa Mattanete Bua memiliki luas wilayah 6 km² atau 1,05% dari total luas Kabupaten Bone. Jarak tempuh Desa Mattanete Bua dengan Ibukota Kabupaten Bone adalah 10 km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 menit.

Secara administratif, Desa Mattanete Bua terletak di wilayah Kabupaten Bone

dengan posisi dibatasi oleh wilayah tetangga sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Tirong
Kecamatan Palakka
- b. Sebelah Barat : Desa Cinddong
Kecamatan Ponre
- c. Sebelah Selatan : Desa Wollangi
Kecamatan Ponre
- d. Sebelah Timur : Desa Maduri
Kecamatan Palakka

Berdasarkan data Administrasi Desa Mattanete Bua tahun 2020, jumlah penduduk Desa Mattanete Bua adalah terdiri dari 485 KK, dengan jumlah penduduk total 1440 jiwa, dengan rincian laki-laki 706 jiwa dan perempuan 734 jiwa. sekitar 821 atau hampir 50% penduduk usia produktif pada usia 18-40 tahun. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM. Dari jumlah 485 KK diatas, hampir 40% KK di Desa Mattanete Bua adalah keluarga miskin, dan sisanya merupakan termasuk golongan keluarga pra sejahtera dan sejahtera. Wilayah Desa Mattanete Bua terdiri dari 4 dusun dengan tujuan memaksimalkan fungsi koordinasiterhadap pelayanan masyarakat di Desa Mattanete Bua. Setiap Dusun memiliki kontur dan luas wilayah yang berbeda-beda meskipun dalam satu kesatuan Desa.

Untuk pertaniannya, lahan pertanian Desa Mattanete Bua semakin tahun semakin menurun. Terbukti lahan pertanian Desa Mattanete Bua setahun terakhir berkurang. Banyak potensi pertanian yang dimiliki Desa Mattanete Bua namun banyak masalah yang dihadapi. namun dari tingkat produktifitas, lahan pertanian tersebut masih sangat produktif dan sanggup memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Mattanete Bua maupun masyarakat Desa lainnya.

Pemberdayaan Petani

Pemberdayaan petani dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yaitu kesejahteraan

hidup bagi para petani. Ada dua tujuan akhir yang diharapkan dalam upaya pemberdayaan petani di antaranya:

- a. masyarakat tani akan memiliki tingkat kesejahteraan yang berbeda dari sebelumnya dengan kesejahteraan yang lebih baik.
- b. masyarakat tani memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola pertanian guna mencapai peningkatan produksi.

Dalam upaya pemberdayaan, pemerintah Desa Mattanete Bua harus melalui beberapa proses untuk mewujudkan tujuan dari pemberdayaan petani. Dalam proses pemberdayaan, diperlukan pencapaian dalam pemberdayaan yakni seperti melakukan pendekatan, penguatan kepada masyarakat, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. Pemberdayaan dapat dilakukan secara maksimal apabila masyarakatnya sudah dibekali dengan pengetahuan yang mumpuni. Semakin luas pengetahuan yang dimiliki maka akan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Kebanyakan petani di Desa Mattanete Bua adalah lulusan Sekolah Menengah Pertama dengan pengetahuan yang minim, terutama dalam hal teknologi. Dalam memberdayakan petani, selain tujuan dan proses ada cara yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa Mattanete Bua seperti:

- a. Membangun Kerjasama Petani
- b. Membangun komunikasi
- c. Pemecahan masalah sebagai proses belajar

Faktor Pendukung dan Penghambat Faktor pendukung

1. Kewenangan Pemerintah Daerah

Terlaksananya desentralisasi, Pemerintah daerah menjadi lebih terfokus dalam mengurus urusan rumah tangganya. Dengan adanya campur tangan dari pemerintah daerah maka

pemberdayaan bagi petani di Desa Mattanete Bua Kecamatan Palakka Kabupaten Bone menjadi lebih intansif, serta mempunyai kesempatan yang besar untuk menjadi perhatian dari pemerintah Kabupaten Bone. Peran dan kewenangan Desa yang sangat luas dapat diambil oleh Kepala Desa untuk membuat kebijakan atau terobosan baru untuk kemajuan pertanian dei Desa Mattanete Bua.

2. Mempunyai lahan yang subur

Wilayah pertanian Kecamatan Palakka juga termasuk wilayah yang sangat subur, apabila lahan pertaniannya diolah dengan baik dan benar (mulai dari masa tanam sampai masa pasca panen) maka akan menghasilkan jumlah produksi yang banyak. Selain itu lahan pertaniannya bisa dimaksimalkan jika dalam setahun para petani mengelola lahan pertaniannya dua kali dalam setahun (setiap enam bulan sekali) sehingga menghasilkan jumlah produksi padi yang jauh lebih banyak.

3. Modernisasi alat tani

Alat tani seperti cangkul, tractor, alat semprot hama, penggiling padi, pompa air dan lain sebagainya. Para petani di Desa Mattanete Bua mendapatkan perhatian dari pemerintah Desa maupun Pemerintah Kecamatan Palakka dalam modernisasi alat pertanian mereka. Yang sebelumnya dalam mengolah tanah sawah masih menggunakan kerbau untuk membajak sawah, saat ini sudah memakai traktor mesin diesel yang cukup canggih. Tidak hanya itu, dalam menggiling padi yang sebelumnya para petani harus memisahkan padi secara konvensional untuk saat ini sudah menggunakan mesin penggiling padi yang disediakan Desa untuk seluruh petani.

4. Sarana prasarana yang lengkap

Desa Mattanete Bua yang cukup dekat dengan Ibukota Kabupaten Bone yaitu 10 km memberikan keuntungan tersendiri

dalam percepatan perkembangan pertanian. Pendistribusian peralatan pertanian, bibit, dan pupuk sangat mudah karena akses yang sangat strategis. Sarana dan prasarana yang cukup lengkap memudahkan petani dalam menjalankan produksi pertaniannya.

Faktor Penghambat

1. Regulasi

Permainan harga jual hasil produksi pertanian memang sudah cukup lama terjadi di lingkungan para petani. Mereka terkadang mewajarkan hal tersebut karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Pemerintah telah banyak menyaksikan keluhan, penderitaan, dan jeritan para petani terkait harga yang sangat tidak layak bagi mereka. Dengan usaha dan proses yang tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh membuat petani terkadang cukup geram. Para petani di Desa Mattanete Bua mengharapkan ketegasan dan kejelasan terkait implementasi dari regulasi tersebut sehingga permasalahan ini tidak terus berlanjut.

2. Sumber Daya Manusia

Pemberian pendidikan dan Latihan bagi kelompok tani sangat diperlukan dalam pengembangan potensi para petani. Hal ini dilakukan pemerintah Desa Mattanete Bua dengan menyediakan balai pertanian dan tenaga pendidik dan penyuluh yang berkompeten dalam mengajar para petani. Pemerintah Desa juga tidak menutup bagi para mahasiswa dan pelajar untuk memberikan sumbangsih dan implementasi atas ilmu dari hasil studinya kepada masyarakat tani Desa Mattanete Bua. Saling belajar dan memberikan masukan terkait teknologi pertanian, alat yang saat ini sudah cukup canggih untuk digunakan sebagai alat tani, dan juga fakta di lapangan terkait pertanian yang sesungguhnya yang diberikan oleh para petani kepada pelajar tersebut.

3. Partisipasi Masyarakat

Tingkat kesadaran masyarakat yang rendah terhadap program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan tingkat kehadiran masyarakat dalam mengikuti program pemerintah seperti pelatihan dan penyuluhan kepada para petani. Kebanyakan menganggap program seperti pelatihan dan penyuluhan tidak memberi dampak apapun. Artinya, partisipasi masyarakat itu sendiri untuk diberdayakan masih minim dan harus membutuhkan perhatian yang lebih serius oleh pemerintah untuk program kedepannya.

Upaya Mengatasi Hambatan

1. Pemerintah tegas terhadap regulasi

Ada banyak regulasi yang sudah seharusnya pemerintah lakukan untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan. Contohnya dengan pemanfaatan model satelit yang dimiliki oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), pemetaan sawah bisa dilakukan, mana yang bisa dimanfaatkan menjadi lahan pertanian, mana yang sudah menjadi pemukiman. Dengan demikian tidak ada lagi investor yang mencoba membangun lahan pemukiman di sekitaran lahan pertanian. Selanjutnya regulasi mengenai ketentuan tentang harga jual- beli hasil pertanian, apabila ada kelompok/individu tengkulak yang tidak mematuhi regulasi yang telah pemerintah daerah tetapkan, maka pemerintah daerah harus tegas memberikan evaluasi dan sanksi kepada pihak kelompok/individu tersebut

2. Pembinaan Kelompok Tani

Dalam upaya peningkatan Sumber Daya Manusia, pembinaan kelompok tani menjadi solusi yang dilakukan Pemerintah Desa Mattanete Bua dalam mengatasi hambatan yang dihadapi para petani. Berdasarkan wawancara enumerator kepada sekretaris desa mengatakan:

“Sebagian besar masyarakat desa hampir 90% adalah petani, termasuk babinsa juga memiliki pekerjaan sampingan sebagai petani. Pembinaan terhadap pertanian dilakukan melalui P3A (Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air) untuk mencari hal apa saja yang menjadi permasalahan dan perlu dibenahi dalam pelaksanaan kegiatan pertanian”

Dengan adanya pembinaan kelompok tani diharapkan masyarakat dapat lebih termotivasi dalam melahirkan inovasi-inovasi yang mampu meningkatkan pertanian dan pendapatannya.

3. Subsidi Pemerintah

Selama ini pemerintah Desa Mattanete Bua sudah memberikan pupuk dan pestisida bersubsidi dan dampaknya bagi petani cukup besar karena merasa diringankan meskipun belum sesuai dengan ekspektasi mereka. Untuk itu pemerintah kedepannya harus lebih cermat dan teliti dalam memperhitungkan jumlah pupuk dan pestisida yang hendak disubsidikan oleh Pemerintah Desa Mattanete Bua agar petani semakin nyaman dan bersemangat lagi dalam mengelola lahan pertaniannya karena ada jaminan dan perlindungan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat petani.

Tidak hanya subsidi dalam pemberian pupuk dan pestisida saja. Pemerintah Desa Mattanete Bua telah memberikan bantuan berupa alat-alat pertanian yang bisa digunakan untuk seluruh petani. Hasil wawancara kepada sekretaris desa Mattanete Bua mengatakan: “Bantuan pertanian dari pemerintah yaitu traktor, semprot racun hama, mesin giling padi, dan mesin pompa air untuk irigasi sawah”. Hal ini sangat membantu para petani karena mulai saat ini para petani tidak lagi menggiling padi di kecamatan atau di desa lain yang jaraknya cukup jauh. Dengan adanya alat-alat tersebut para petani dapat dengan mudah mengolah

hasil pertaniannya dengan cepat dan biaya yang cukup murah karena hanya memberikan biaya untuk perawatan alat saja.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Dalam upaya pemberdayaan, pemerintah Desa Mattanete Bua harus melalui beberapa proses untuk mewujudkan tujuan dari pemberdayaan petani seperti melakukan pendekatan, penguatan kepada masyarakat, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan, (2) Membangun kerjasama petani, membangun komunikasi yang baik antara petani, petani dengan penyuluh maupun petani dengan pemerintah, dan pemecahan masalah sebagai proses belajar merupakan cara yang tepat dalam pemberdayaan petani sehingga tujuan pembagunan pertanian Desa Mattanete Bua dapat tercapai, (3) Pemberdayaan petani di Desa Mattanete Bua Kecamatan Palakka Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Terbukti dengan masih terjadinya penurunan hasil produksi panen setiap tahunnya, (4) Pemerintah perlu memperhatikan, mempertahankan dan mengoptimalkan keunggulan dari pelaksanaan pemberdayaan petani seperti: kewenangan yang diberikan pemerintah daerah, kondisi geologis Desa Mattanete Bua yang subur, peralatan tani yang cukup modern, dan sarana prasarana yang lengkap untuk seluruh petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2003). *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, Edisi Revisi. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI
- Amanah, S., & Narni, F. (2014). *Pemberdayaan Sosial Petani, Keunikan Agroekosistem, dan Daya Saing*. Jakarta: Yayasan Pusaka Obor Indonesia.
- Aminah. (2017). *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hikmat, H. (2001). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama
- Irene, S. (2019). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Jamasy, O. (2004). *Keadilan, Pemberdayaan, dan Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Blantika
- Lisdayanti. (2017). *Peran Sektor Pertanian Terhadap Pengembangan Wilayah Kabupaten Bone*. Repositori UIN Alauddin
- Mulyadi. (2019). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat Desa*. Yogyakarta: Nadi Pustaka.
- Muslim, S. (2018). *Partisipasi Politik Masyarakat*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri.
- Narbuko, C. (2018). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho, S., & Muhammad, T. (2019). *Hukum Untuk Petani: Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Era Globalisasi*. Klaten: Lakeisha.
- Priyono, O. S., & Pranarka, A. M. W. (1999). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Purba, B. (2020). *Pengantar Ilmu Pertanian*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Sujarweni, W. (2019). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustakabaru pres.
- Suwartono. (2014). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
- Tawai, A. (2017). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*. Semarang: Literacy Institute.
- Wahab, A. (2008). *Analisis Ekspor Komoditi Pertanian dan Pengaruhnya Terhadap*

- Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja di Sulawesi Selatan. *Investmen, Ekspor, Economic Growth, Employment Journal*, 5, 2-7
- Ife.J.W. (1995). *Community development: Creating community alternatives- vision, analysis and practice*. Queensland: Longman Australia
- Payne.K. (1997). Patient Empowerment in Clinical Genetics Services. *Journal Of Helath Psychology*, 13 (7).
- Conyers, D (1991). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Yogyakarta:UGM Press.
- Irene. A. D. (2009). *Desentralisasi dan Partisipasi dalam Pendidikan*. Yogyakarta: UNY.
- Irene. A.D. (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

ORGANISASI SEBAGAI ARENA KEKUASAAN POLITIK *ORGANIZATION AS AN ARENA OF POLITICAL POWER*

Yosar Kardiat

Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan
Email: kardiatyosargmail.com

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang organisasi sebagai wahana (arena) dalam kekuasaan politik. Organisasi dan politik menjadi satu kesatuan dalam memanfaatkan kekuasaan di Indonesia. Pada hakekatnya penggunaan kekuasaan dalam politik bertujuan untuk mengatur kepentingan masyarakat seluruhnya, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Untuk itu, adanya pembatasan kekuasaan sangat diperlukan agar tumbuh kepercayaan masyarakat terhadap pemegang kekuasaan dan terciptanya keadilan serta kenyamanan dalam kehidupan. Melihat aktivitas organisasi sebagai aktivitas politik merupakan penyegaran terhadap pemahaman kehidupan organisasi yang selama ini selalu didominasi oleh cara pandang instrumental, yang analisisnya mengabaikan motif dan kepentingan actor yang terlibat dalam organisasi.

Kata kunci: Organisasi, Arena kekuasaan, Politik

ABSTRACT

This article discusses the organization as a vehicle (arena) in political power. Organization and politics become one unit in the use of power in Indonesia. In essence, the use of power in politics aims to regulate the interests of the community as a whole, not for personal or group interests. For this reason, the limitation of power is very necessary in order to grow public trust in those in power and create justice and comfort in life. Seeing organizational activities as political activities is a refresher on the understanding of organizational life which has always been dominated by an instrumental perspective, whose analysis ignores the motives and interests of the actors involved in the organization.

Keywords: Organization, Arena of power, Politics

PENDAHULUAN

Politik dan kekuasaan adalah sesuatu yang ada dan dialami dalam kehidupan setia porganisasi, tetapi agak sulit untuk mengukurnya akan tetapi penting untuk dipelajari dalam perilaku keorganisasian, karena keberadaannya dapat mempengaruhi perilaku orang-orang yang ada dalam organisasi. Politik dan kekuasaan tidak hanya terjadi pada system pemerintahan, namun politik juga terjadi pada organisasi formal, badan usaha, organisasi keagamaan, kelompok, bahkan

pada unit keluarga (Paramita, 2011). Politika adalah suatu jaringanin teraksi antar manusia dengan kekuasaan diperoleh, ditransfer, dan digunakan (Khairani, 2020). Politik dijalankan untuk menyeimbangkan kepentingan individu karyawan dan kepentingan manajer, serta kepentingan organisasi. Ketika keseimbangan tersebut tercapai, kepentingan individu akan mendorong pencapaian kepentingan organisasi. Namun, dalam decade terakhir ini, konflik dan politik telah menjadi bukan hanya dapat diterima tetapi topik yang modis dalam teori organisasi.

Sistem ideologi, meskipun implisit, biasanya merupakan norma-norma dan keyakinan yang diterima secara luas dalam organisasi. Dan system keahlian merupakan kekuatan yang biasanya disertifikasi secara resmi dan biasanya disetujui oleh otoritas formal. Sistem politik, sebaliknya, dapat digambarkan sebagai mencerminkan kekuatan yang secara teknis tidak sah (atau, mungkin lebih tepat, dalam kemampuannya (dan kadang-kadang di ujung-ujungnya juga). Dengan kata lain, perilaku diistilahkan politik tidak resmi yang berwenang, diterima secara luas, atau secara resmi bersertifikat. Akibatnya, perilaku politik biasanya memecah belah dan konflik, seringkali mengadu individu atau kelompok terhadap kewenangan formal, menerima ideologi, dan / atau keahlian bersertifikat, atau yang lain terhadap satu sama lain. Politik bisa, tentu saja, muncul ketika sistem lain dari pengaruh ketidakhadiran atau setidaknya lemah.

Tetapi juga dapat ditimbulkan oleh mereka, seperti ketika departementalisasi, diciptakan melalui kewenangan formal, mendorong proses kelompok yang menguntungkan kepentingan-kepentingan sempit dengan mengorbankan kebutuhan organisasi pada umumnya. Kegiatan politik dalam organisasi kadang-kadang digambarkan dalam bentuk 'game'.

Beberapa aturan yang cukup jelas, yang lain kabur. Beberapa sangat stabil, yang lainnya selalu berubah. Tapi kumpulan aturan, pada dasarnya, mendefinisikan permainan'. Untuk Grozier dan permainan. Jauh lebih dari sebuah citra. Ini adalah mekanisme konkret berkat pria-pria yang mana struktur hubungan kekuasaan mereka dan mengatur mereka. Ini adalah alat penting untuk tindakan terorganisir. Sejumlah permainan politik seperti yang dijelaskan dalam literatur, meskipun tidak ada penjelasan yang komprehensif dari organisasi sebagai sistem berbagai permainan politik dapat ditemukan.

PEMBAHASAN

Organisasi Sebagai Wahana (Arena) Politik

Organisasi sebagai salah satu entitas sosial juga tidak terlepas dari politik. Setiap orang dalam organisasi akan menggunakan taktik dan strateginya masing-masing untuk memperebutkan sumber daya yang terbatas, baik itu menyangkut distribusi informasi, kekuasaan, karir maupun penghargaan lainnya. Organisasi kesehatan, seperti rumah sakit juga tidak terlepas dari kegiatan politik (Ayuningtyas, 2009). Strauss dalam penelitiannya di institusi rumah sakit mengidentifikasi pola interaksi antara aktor di rumah sakit (dokter, perawat dan staf administrasi) sebagai eke teraturan hasil negosiasi. Tak dapat disangkal bahwa negosiasi merupakan salah satu bentuk aktivitas politik untuk mendapatkan komitmen bersama. Untuk menjadi manajer yang efektif, seorang manajer harus sadar bahwa politik selalu ada dalam setiap kehidupan organisasi. Berkenaan dengan praktik manajemen melalui pendekatan politik, maka seorang manajer (termasuk pemain lainnya) harus paham bagaimana bermain politik yang etis dan elegant, sehingga secara etis dapat diterima oleh anggota lainnya (Siswanto, 2007). Permainan politik yang tidak etis dalam jangka panjang akan berakibat buruk terhadap kredibilitas pelakunya.

Melihat aktivitas organisasi sebagai aktivitas politik merupakan penyegaran terhadap pemahaman kehidupan organisasi yang selama ini selalu didominasi oleh cara pandang instrumental, yang analisisnya mengabaikan motif dan kepentingan aktor yang terlibat dalam organisasi. Dalam kelompok sosial, termasuk organisasi, manusia selalu terlibat interaksi antar satu dengan lainnya. Setiap anggota akan membawa minat, kepentingan, persepsi, dan tujuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, proses pengaruh-mempengaruhi merupakan hal yang wajar dalam kehidupan organisasi. Dengan kata lain, politik adalah

suatu kenyataan sosial yang harus dihadapi oleh anggota organisasi, termasuk manajer. Ada ungkapan yang menarik, meskipun kita tidak suka politik, kita tidak bias menghindar dari politik.

Politik didefinisikan sebagai setiap pola hubungan yang kokoh antar manusia dan melibatkan secara cukup mencolok kendali, pengaruh, kekuasaan dan kewenangan. Jeffrey Pfeffer menciptakan suatu model teori organisasi yang memuat koalisi kekuasaan, konflik-konflik inherent pencapaian tujuan organisasi, dan keputusan-keputusan yang diambil seputar bagaimana mendesain organisasi yang mendukung kepentingan pribadi dari mereka yang berkuasa. Pfeffer & Salancik (2003) berpendapat bahwa kekuasaan bias vertikal dan horizontal dalam organisasi, dan focus mereka, seperti Hickson et al. (2002), adalah pada kekuatan subunit. Mereka berhipotesis bahwa kekuasaan akan digunakan dalam organisasi untuk mencoba mempengaruhi keputusan tentang alokasi sumber daya (Pfeffer & Salancik 2003). Subunit dapat dianggap sebagai departemen dalam organisasi. Sejauh subunit menyumbangkan sumberdaya penting, termasuk pengetahuan, yang dibutuhkan organisasi, subunit lain tunduk pada tuntutan mereka dan menyerahkan kekuasaan kepada mereka.

Pfeffer mengusulkan agar kendali di dalam organisasi menjadi tujuan ketimbang hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang rasional, seperti produksi output yang efisien. Organisasi adalah koalisi yang terdiri atas individu yang punya tuntutan berbeda serta aneka kelompok yang saling bersaing. Desain organisasi tidak lain merupakan hasil dari perjuangan kekuasaan yang dilakukan oleh koalisi-koalisi yang berbeda tujuan ini. Pfeffer (1992) mengatakan bahwa jika kita hendak memahami mengapa dan bagaimana organisasi didesain, kita perlu mengkaji pilihan-pilihan dan kepentingan-kepentingan dari mereka yang punya pengaruh

atas pembuatan keputusan di dalam organisasi. Pandangan ini sekarang sedang digemari.

Pada prinsipnya politik adalah suatu jaringan interaksi antar manusia dengan kekuasaan diperoleh, ditransfer, dan digunakan. Dengan menggunakan definisi ini, maka dapat dikatakan bahwa politik tidak hanya terjadi pada system pemerintahan, namun politik juga terjadi pada organisasi formal, badan usaha, klub-klub pribadi, organisasi keagamaan, kelompok suku primitif, marga, dan bahkan pada unit keluarga. Pusat analisis politik adalah kekuasaan dan pengaruh. Kekuasaan didefinisikan sebagai potensi seorang actor dapat mempengaruhi actor lain, sehingga actor lain tersebut menuruti kemauan actor pertama. Dalam kontes saling pengaruh-mempengaruhi ini, maka tiap-tiap actor akan saling beradu kekuasaan untuk memenangkan kepentingannya, dengan taktik memainkan kekuasaannya masing-masing.

Selain itu pendapat McShane & Van Glinow (2010) menganggap politik organisasi terkait erat dengan taktik organisasi. Menurut kedua pakar ini, politik organisasi adalah perilaku yang dianggap oleh orang lain sebagai taktik yang menguntungkan diri sendiri dengan mengatas namakan organisasi. Taktik tersebut sering kali bertentangan dengan kepentingan organisasi.

Kekuasaan dalam Organisasi

Kekuasaan adalah kapasitas seseorang, tim, atau organisasi untuk mempengaruhi yang lain (Paramaatha, 2015). Kekuasaan tidak dimaksudkan untuk mengubah perilaku seseorang, melainkan potensi untuk mengubah seseorang. Lebih jauh lagi, kedua ahli ini menjelaskan bahwa kekuasaan mensyaratkan kebergantungan. Dengan kata lain, pihak yang berkuasa memiliki hal yang dianggap penting oleh pihak lainnya sehingga pihak tersebut merasa berada di bawah kendali pihak yang memiliki kekuasaan.

Seseorang dapat dikatakan memiliki kekuasaan terhadap orang lain jika ia dapat mengontrol perilaku orang lain. Kekuasaan adalah hubungan nonresiprokal antara dua orang atau lebih. Nonresiprokal di dalam konteks ini dapat diartikan sebagai ketidakseimbangan kuasa yang dimiliki oleh individu yang satu dan individu yang lain. Dengan kata lain, dua pihak yang memiliki hubungan nonresiprokal mungkin saja tidak memiliki kekuasaan yang sama di dalam wilayah yang sama. Kekuasaan memungkinkan seseorang memaksakan kehendaknya untuk mencapai tujuan yang ia inginkan. Perbedaan tujuan berbagai pihak yang terhimpun di dalam organisasi akan mendorong pihak-pihak tersebut melakukan politik organisasi. Politik organisasi inilah yang selanjutnya menimbulkan benturan-benturan atau konflik di dalam organisasi. Namun, konflik tidak selalu membawa dampak buruk bagi organisasi, tetapi juga dapat membawa dampak positif jika dikelola dengan benar.

Politik dalam organisasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu dalam organisasi untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri (Colquitt et al., 2011). Politik organisasi tumbuh subur dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya pada saat kurangnya sumber daya manusia, sangat mungkin ada individu-individu yang mempertahankan satu posisi atau jabatan di organisasi. Secara faktual, politik organisasi bukanlah merupakan suatu hal yang tabu bagi orang-orang tertentu. Hal ini merupakan imbas dari berkumpulnya banyak individu di dalam organisasi. Semakin banyak individu di dalam organisasi, semakin banyak pula tarik menarik kepentingan di dalam organisasi tersebut. Hal tersebut berimplikasi pada maraknya politik organisasi. Setiap pihak akan melakukan apa pun yang bias mereka lakukan untuk mendukung kepentingannya serta untuk melakukan hal-hal yang menguntungkan dirinya. Hal inilah yang pada akhirnya memunculkan politicking atau *uberpolitik* dalam organisasi.

Selain itu ketidakmerataan distribusi kekuasaan sebenarnya dialami oleh setiap individu. Pertama kali individu mengenal adanya ketidakseimbangan distribusi kekuasaan di dalam keluarga. Seorang anak harus menyapa orang tuanya dengan sapaan yang dianggap santun. Seperti yang dikemukakan oleh Brown dan Gilman di atas, anak pertama kali mengenal kata ganti V pada saat ia berinteraksi dengan orang tuanya. Seiring dengan berkembangnya individu, subordinasi dalam hal kekuasaan merambah ke hal-hal lain, seperti dalam hubungan kerja.

Dari definisi yang bermacam-macam tersebut, konsep politik dapat dibatasi menjadi:

Politik sebagai Kepentingan Umum

Politik merupakan suatu rangkaian asas (prinsip), keadaan dan jalan, cara, serta alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, atau suatu keadaan yang kita kehendaki disertai dengan jalan, cara, dan alat yang akan kita gunakan untuk mencapai keadaan yang kita inginkan itu. Politik dalam pengertian ini adalah tempat keseluruhan individu atau kelompok bergerak dan masing-masing mempunyai kepentingan atau idenya sendiri (Achmad, 2019).

Politik dalam Arti Kebijaksanaan

Politik dalam arti kebijaksanaan adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dianggap lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita, keinginan atau keadaan yang kita kehendaki. Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu (Budiardjo, 2003).

Ada lima elemen iklim politis dalam organisasi yang hendaknya dapat dipahami manajer senior dalam mengendalikan organisasi, antara lain:

Inner Circle Relationship

Mengidentifikasi hubungan antara Manager Upper dengan Chief Executive, apakah hubungan tersebut bersifat kekeluargaan, kerabat atau pertemanan (Friendlines). Disamping itu apakah terjadi kolaborasi antar manajer dan apa ada grup khusus baik dari dalam departemen maupun dari luar departemen yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

Axis of Influence

Mengidentifikasi hubungan pertemanan dari manager menengah/ area yang memiliki hubungan langsung ke Chief Executive tanpa melewati Manajer Divisinya. Apakah ada hubungan khusus antara berbagai manajer level menengah dengan pimpinan puncak sehingga dapat mengesampingkan peran manajer divisinya. Bisa jadi hubungan tersebut timbul karena memang adanya special expertise yang dimilikinya dalam pengelolaan unit yang dipimpinya sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas tanpa diperlukan manager divisi.

Informal Power Centers

Apakah ada karyawan level operasional yang memiliki hubungan khusus/ pertemanan dengan manajer senior, sehingga melewati atasannya.

Polarizing Elements

Adakah ketidakcocokan antara Manajer dengan bawahannya dan dalam hal apa sajakah itu terjadi, dalam semua aktivitas organisasi atau hanya perbedaan yang tidak prinsip saja. Timbulnya hubungan antar personal yang saling berkompetisi sehingga mempengaruhi interaksi emosional bila akan mempengaruhi pengambilan keputusan maka akan menjadi kendala pelaksanaan tugas-tugas saja.

Informal Coalitions

Apakah ada grup manajer yang berkoalisi untuk menolak keputusan atau mengambil keputusan yang lain dengan yang sudah ditetapkan manajer atasnya dan sejauh mana hal ini akan diteruskan.

KESIMPULAN

Politik tidak dapat dipisahkan dari organisasi karena merupakan entitas sosial. Setiap orang di organisasi akan menggunakan teknik dan metode mereka sendiri untuk bersaing mendapatkan sumberdaya yang terbatas agar dapat diterima secara etis oleh anggota tim lainnya, seorang manajer harus tahu cara bermain politik dengan cara yang etis dan halus. Perilaku seseorang bukanlah tujuan dari kekuasaan, melainkan kemampuan untuk mengubah seseorang. Kekuasaan adalah hubungan antara dua orang atau lebih di mana tidak ada pertukaran timbal balik. Ketimpangan kekuasaan ini mempengaruhi setiap orang. Subordinasi dalam hal otoritas menyebar ke aspek kehidupan lainnya, seperti hubungan kerja, seiring bertambahnya usia.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Y. (2019). *Sosiologi Politik*. Deepublish.
- Ayuningtyas, D. (2009). Politik Pembangunan dan Kebijakan Privatisasi Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 12(03).
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia pustaka utama.
- Colquitt, J. A. Lepine, A., Wesson, MJ (2011). *organizational behavior management: improving performance and commitment in the work place*, Translators: Feizi Mohammad, Ismaeel Qaderi and Mehdi Alizadeh. Mohageg Publishing.
- Hickson, G. B., Federspiel, C. F., Pichert, J. W., Miller, C. S., Gauld-Jaeger, J., &

- Bost, P. (2002). Patient complaints and malpractice risk. *Jama*, 287(22), 2951-2957.
- Khairani, L. (2020). [BUKU] Sejarah Politik dan Kekuasaan. *Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen*.
- McShane, S., & Von Glinow, M. A. (2010). Organizational behaviour: Emerging knowledge and practice for the real world. McGraw-Hill/Irwin.
- Paramaatha, D. N. (2015). Pengaruh Kekuasaan Dan Pengambilan Keputusan Terhadap Komitmen Organisasi Guru Sekolah Dasar Bpk Penabur di Jakarta. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 6(1), 1087-1096.
- Paramita, P. D. (2011). Keterkaitan antara politik dan kekuasaan dalam organisasi. *Dinamika Sains*, 9(21).
- Pfeffer, J. (1992). *Managing with power: Politics and influence in organizations*. Harvard Business Press.
- Pfeffer, J., & Salancik, G. R. (2003). *The external control of organizations: A resource dependence perspective*. Stanford University Press.
- Siswanto, S. (2007). Politik Dalam Organisasi (Suatu Tinjauan Menuju Etika Berpolitik). *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 10(04).

DIMENSI PENGUKURAN KUALITAS HIDUP DI BEBERAPA NEGARA *THE QUALITY OF LIFE MEASUREMENT DIMENSIONS IN SOME COUNTRIES*

**Jamaruddin
Sudirman**

Institut Pemerintahan Dalam Negeri
email: jamaruddinsuroy@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pengukuran kualitas hidup yang berbeda akan memperoleh hasil yang berbeda pula. Tidak adanya konsep pengukuran kualitas hidup yang disepakati oleh para ahli karena kualitas hidup dipandang sebagai suatu yang kompleks dan tidak berlaku secara menyeluruh termasuk karena faktor budaya. Oleh karena itu, untuk mengetahui kualitas hidup sebuah negara, persatuan bangsa-bangsa (UNDP) mengukur kualitas hidup melalui indeks pembangunan manusia yang pengukuran kualitas hidup secara objektif, namun demikian organisasi kesehatan dunia dan indeks kebahagiaan mengukur kualitas hidup cenderung secara subjektif. Pembahasan ini mencoba mengungkapkan dimensi-dimensi dalam mengukur kualitas hidup seperti organisasi pemerintah, lembaga internasional termasuk hasil penelitian para ahli diberbagai negara.

Kata kunci: pengukuran, kualitas hidup

ABSTRACT

The measurement of quality of life is different because there is no concept of quality of life agreed upon by experts because quality of life is seen as complex and does not apply as a whole, including cultural factors. Therefore, to determine the quality of life of a country, United Nation Development Program (UNDP) measures the quality of life through the Human Development Index (HDI), which measures the quality of life objectively, however, the World Health Organization (WHO) and the Happiness Index has tend to measure the quality of life subjectively. This discussion tries to reveal the dimensions in measuring the quality of life such as government organizations, international institutions including the results of research by experts in various countries.

Keyword : *measurement, quality of life.*

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang dalam kualitas kehidupannya memberi makna bahwa seseorang kadang kadang membutuhkan kesendirian untuk merenung dan memaknai arti kehidupan. Namun selanjutnya dalam kehidupannya sebagai mahluk sosial membutuhkan interaksi dan kerjasama antar individu dan kelompok atau organisasi, sehingga segala kekurangan dan hambatan yang mereka miliki dapat

diatasi oleh orang lain atau kelompok lainnya. Dalam hubungan ini dapat dibangun hal-hal positif yang saling menguntungkan untuk bersama-sama membangun kualitas hidup baik dalam pemenuhan kebutuhan untuk kualitas hidup secara objektif dan kualitas hidup secara subjektif. Setiap negara di dunia akan berusaha mengoptimalkan segala kebutuhan masyarakat termasuk sarana dan prasarana kepentingan publik. Pemerintah wajib menyediakan layanan-layanan seperti layanan

di sektor pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sosial, infrastruktur, pertanian dan lain-lain. Pemenuhan kewajiban tersebut adalah tanggung jawab negara dan pemerintah dalam menyiapkan kebutuhan pangan, sandang, perumahan, aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek transportasi (darat, laut dan udara), termasuk didalamnya keselamatan dan keamanan individu, kestabilan politik, kehidupan beragama yang dijamin oleh negara, pengembangan budaya, ketenagakerjaan, hukum yang berkeadilan, hubungan dan kehidupan sosial yang tertib dan tentram, peningkatan dan pemanfaatan sumberdaya ekonomi seperti pertanian (perikanan dan kelautan, peternakan, perkebunan, tanaman pangan, dan hortikultura), pertambangan, energi, teknologi informasi dan lain-lain.

Ketercapaian pemenuhan tersebut akan mendongkrak kualitas hidup masyarakat dalam aspek pemenuhan kebutuhan manusia secara objektif. Pengukuran kualitas hidup bisa diukur melalui indeks kualitas hidup. Melalui United Nations Development Programme (UNDP), kualitas hidup diukur dengan nama Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan pengukuran singkat dari capaian rata-rata dalam dimensi utama IPM yang terdiri dari sehat dan panjang umur, berpengetahuan dan memiliki standar kehidupan yang layak. IPM adalah rata-rata geometrik dari indeks yang dinormalisasi untuk masing-masing dari tiga dimensi yaitu pertama dimensi kesehatan, kedua dimensi pendidikan dan ketiga dimensi standar hidup diukur dengan Gross National Income (GNI) atau Produk Domestik Bruto (PDB) Perkapita (UNDP, 2022).

PEMBAHASAN

Terbentuknya sebuah negara yang berdaulat mencita-citakan adanya kehidupan yang baik dengan jalannya roda pemerintahan menuju kepada kesejahteraan masyarakat yang

sejahtera lahir batin dan berkeadilan. Dalam perspektif ini kesejahteraan lahir dengan tercukupinya kebutuhan lahiriah seperti sandang, pangan dan perumahan. Sementara kebutuhan batin dengan adanya kepuasan terhadap apa yang dirasakan dalam kehidupan seorang individu. Tujuan Negara Indonesia dibentuk terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yaitu: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh karena itu, Negara harus mampu mewujudkan cita-cita bernegara tersebut dengan membangun jiwa dan raganya. Dalam sila kelima Pancasila berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Artinya bahwa seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus dapat berkeadilan sosial kepada seluruh masyarakat. Aspek kehidupan yang berkeadilan memiliki makna bahwa negara wajib hadir dalam mendistribusikan kekayaan alam untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat menuju kualitas hidup yang lebih baik yang merupakan salah tujuan negara yang tercantum dalam dasar negara Republik Indonesia.

Menuju kepada masyarakat yang memiliki kualitas hidup yang baik tidak hanya dilihat dari aspek materi saja tetapi juga bukan materi. Dalam teori integrasi kualitas hidup yang dikemukakan oleh Ventegodt et al. (2003) bahwa kualitas hidup dipandang secara objektif dan subjektif. Kualitas hidup secara objektif adalah kebutuhan biologis, kebutuhan pokok, dan potensi diri yang dapat dikembangkan sesuai dengan norma-norma budaya dimana seseorang berdomisili. Sementara kualitas hidup secara subjektif ialah persepsi seseorang terhadap arti kehidupan, kebahagiaan, kepuasan dan kesejahteraan yang dirasakannya. Hasil penelitian Dalia dan Algirdas (2009) di Lithuania menyatakan bahwa masyarakat Lithuania lebih memiliki kualitas hidupnya kepada keamanan

dan pendapatan karena kondisi negara yang belum stabil dalam aspek keamanan. Penelitian Azahan et al. (2008) menyatakan bahwa masyarakat perkotaan di Malaysia mengukur kualitas hidup secara objektif pada dimensi lingkungan. Namun demikian kualitas hidup secara subjektif belum tergantung dari persepsi masyarakat terhadap penerimaan lingkungan mereka. Pengukuran kualitas hidup menurut kajian Baris dan Osman (2003) di Uni Eropa adalah menemukan bahwa secara objektif pada aspek kesehatan (angka kematian bayi dan ibu, angka harapan hidup, adanya dana kesehatan, jumlah kamar rumah sakit perseribu jiwa sebagai pengukuran hidup sehat) dan aspek pendidikan (angka partisipasi pada sekolah dasar dan sekolah menengah, rata-rata melek huruf dan akses pengetahuan masyarakat). Sementara Konsep kualitas hidup menurut United Nations Development Programme (UNDP), diukur melalui Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang memiliki tiga dimensi yaitu pertama dimensi kesehatan, kedua dimensi pendidikan dan ketiga dimensi standar hidup diukur dengan Gross National Income (GNI) atau Produk Domestik Bruto (PDB) Perkapita (UNDP, 2022).

Dari berbagai hasil penelitian baik lembaga atau organisasi internasional seperti UNDP maupun hasil penelitian di berbagai negara membuktikan bahwa tidak ada kesamaan dalam menentukan pengukuran kualitas hidup karena perbedaan tempat/daerah/negara, kondisi negara, perbedaan norma dan budaya masyarakat, serta penerimaan mereka terhadap pembangunan (Lepage, 2009; Dalia dan Juozas, 2007; Azahan et al., 2006). Namun demikian, kesepakatan negara-negara di dunia bahwa untuk mengukur seberapa besar kemajuan dan pembangunan manusia sebuah negara diukur melalui HDI atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Untuk melihat perbedaan pengukuran kualitas hidup diberbagai negara, lembaga/organisasi internasional, lembaga/organisasi

pemerintah dan hasil penelitian para ahli dapat diuraikan sebagai berikut:

1. United Nations Development Program (UNDP)

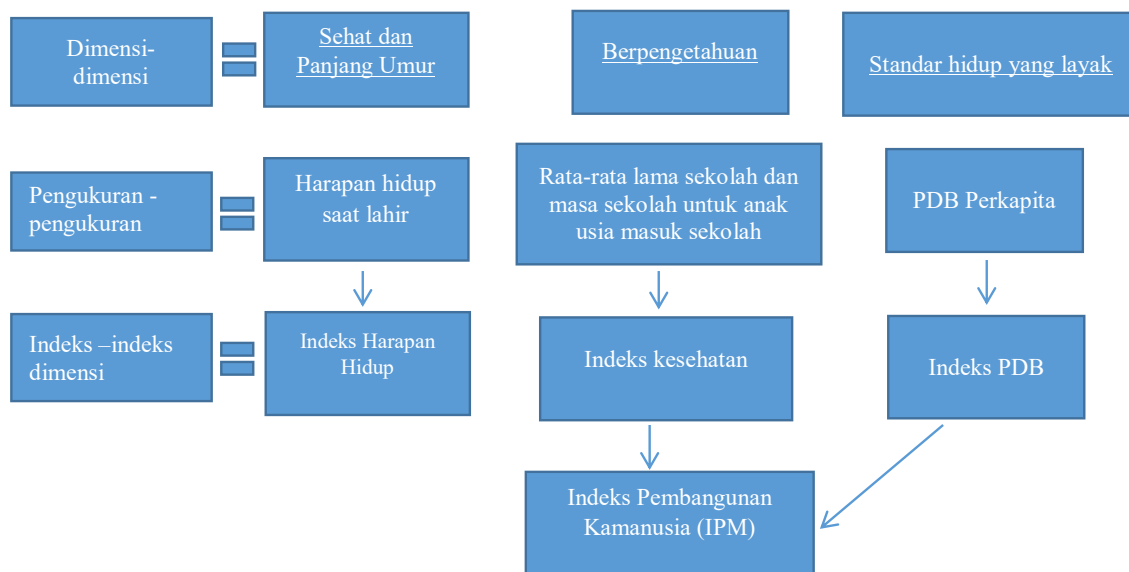
United Nations Development Program (UNDP) mengukur kualitas hidup manusia melalui Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dibuat untuk menekankan bahwa manusia dan kemampuan mereka harus menjadi kriteria utama untuk menilai pembangunan suatu negara, bukan pertumbuhan ekonomi saja. IPM juga dapat digunakan untuk mempertanyakan pilihan kebijakan nasional, menanyakan bagaimana dua negara dengan tingkat GNI per kapita yang sama dapat berakhir dengan hasil pembangunan manusia yang berbeda. Pertentangan ini dapat merangsang perdebatan yang cukup serius karena arah dan prioritas kebijakan pemerintah setiap negara yang berbeda-beda. HDI menyederhanakan dan merangkum hanya sebagian dari apa yang dibutuhkan oleh pembangunan manusia. HDI belum dapat mencerminkan mengenai ketidaksetaraan, kemiskinan, keselamatan dan keamanan manusia, pemberdayaan dan lain lain. Namun melalui Human Development Report Office (HDRO) sudah dapat memberikan indeks komposit lainnya sebagai perwakilan dari beberapa isu utama pembangunan manusia, isu ketidaksetaraan, kesenjangan gender dan isu kemiskinan. Data HDRO sebagai wadah pelaporan pembangunan manusia yang bertujuan dalam memberikan kontribusi terhadap perkembangan kebebasan, peluang dan berbagai pilihan lainnya.

IPM adalah rata-rata geometrik dari indeks yang dinormalisasi untuk masing-masing dari 3 (tiga) dimensi yaitu 1) dimensi kesehatan yang diukur dengan angka harapan hidup saat lahir, 2) dimensi pendidikan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah untuk orang dewasa berusia 25 tahun ke atas dan

masa sekolah yang diharapkan untuk anak usia masuk sekolah, dan 3) dimensi standar hidup diukur dengan Gross National Income (GNI) atau Produk Domestik Bruto (PDB) Perkapita. IPM menggunakan logaritma pendapatan, untuk mencerminkan semakin pentingnya pendapatan dengan meningkatnya

PDB Perkapita. Skor untuk ketiga indeks dimensi IPM tersebut kemudian dijumlahkan menjadi indeks komposit menggunakan rata-rata geometrik (UNDP, 2022).

Di bawah ini adalah skema Indeks pembangunan manusia menurut UNPD:



Sumber: UNDP (2022)

Sementara itu urutan IPM dunia yang paling tinggi, sedang dan yang menduduki IPM terendah seperti dalam tabel 1 berikut:

Tabel 1 Ranking HDI di Berbagai Negara Tahun 2020

Negara	Urutan	Indeks
Norwegia	1	0.957
Denmark	10	0.940
Singapura	11	0.938
Brunei Darussalam	47	0.838
Malaysia	62	0.810
Thailand	79	0.777
Indonesia	107	0.718
Filipina	107	0.718
Timor Leste	141	0.606
Niger	189	0.394

Sumber: [https://hdr.undp.org/en/content/latest-human-development-index-ranking?](https://hdr.undp.org/en/content/latest-human-development-index-ranking?locations=sd)

2. World Health Organization (WHO)

World Health Organization (WHO) atau organisasi kesehatan dunia mendefinisikan kualitas hidup sebagai persepsi seseorang mengenai posisi mereka dalam konteks budaya kehidupan dan sistem nilai di mana mereka tinggal dan kaitannya dengan tujuan, harapan, standar, dan keinginan mereka (WHO, 2022). Menurut Maria et al. (2010) menyatakan bahwa pengukuran kualitas hidup seseorang dinilai melalui persepsi mereka terhadap lingkungan seperti pendapatan, persepsi seseorang terhadap kesehatan fisik, psikologi dan hubungan sosial mereka. Artinya bahwa organisasi kesehatan dunia lebih menekankan pengukuran kualitas hidup secara subjektif karena mengukur seberapa besar persepsi masyarakat terhadap penerimaan mereka dalam kegiatan pembangunan yang ada menurut standard dan keinginan mereka.

3. Sustainable Development Goals (SDGs)

Kelanjutan dari program Millennium Development Goals (MDG) atau tujuan pembangunan milenial adalah Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang dikenal juga sebagai tujuan global, disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 sebagai seruan universal untuk bertindak dalam mengakhiri kemiskinan, melindungi bumi ini, dan memastikan bahwa pada tahun 2030 semua orang menikmati perdamaian dan kesejahteraan. Negara-negara didunia telah berkomitmen untuk memprioritaskan kemajuan bagi mereka yang tertinggal. SDGs dirancang untuk mengakhiri kemiskinan, kelaparan, AIDS, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan. Oleh Karen itu, kreatifitas, pengetahuan, teknologi, dan sumber daya keuangan dari seluruh masyarakat diperlukan untuk mencapai SDGs dalam setiap konteks.

Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan mengukur pembangunan manusia melalui aspek sosial yaitu tanpa kemiskinan (no poverty), tanpa kelaparan (zero hungry), kesejahteraan dan kesehatan yang baik (good health and well-being), pendidikan berkualitas (quality education), kesetaraan gender (gender equality), sanitasi dan air bersih (clean water and sanitation), energi bersih dan terjangkau (affordable and clean energy), pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak (decent work and economic growth), mengurangi ketidakadilan (reduce inequalities), inovasi infrastruktur dan industri (industry, innovation and infrastructure), keberlanjutan kota-kota dan komunitas (sustainable cities and communities), tanggungjawab konsumsi dan produksi (responsible consumption and production), aksi iklim (climate action), kehidupan di bawah air (life below water), kehidupan di darat (life on land), perdamaian, keadilan dan lembaga yang kuat (peace, justice and strong institutions),

dan bekerjasama untuk sebuah tujuan (partnerships for the goals). Ketujuh belas tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut terintegrasi satu sama lain antara satu bidang dengan bidang lainnya serta menyeimbangkan keberlanjutan sosial, ekonomi dan lingkungan. Dalam pengukuran ini SDGs hanya mengukur kepada kualitas manusia secara materi atau objektif saja artinya jika tercapai mereka akan dapat hidup damai dan sejahtera, tetapi ini juga belum bisa mencerminkan karena perlu diukur juga bagaimana persepsi penerimaan mereka terhadap kemajuan tersebut.

4. Happiness Index

Happiness indeks atau indeks kebahagiaan adalah i) GDP Perkapita, (ii) harapan hidup sehat saat lahir, (iii) dukungan social, (iv) kebebasan untuk membuat pilihan hidup, (v) kemurahan hati, (vi) persepsi tentang korupsi (vii) pengaruh positif didefinisikan sebagai rasa senang, tertawa, santai dan melakukan sesuatu yg disukai, dan (viii) pengaruh negatif didefinisikan sebagai rasa marah, ragu-ragu dan sedih.

Adapun happiness index negara-negara didunia yang paling tinggi, sedang dan yang menduduki indeks kebahagiaan terendah seperti dalam tabel 2 berikut:

Tabel 2 Ranking Happiness Index di Berbagai Negara Tahun 2022

Negara	Urutan	Indeks
Finlandia	1	7.821
Australia	11	7.162
Singapura	27	6.480
Philipina	60	5.904
Thailand	61	5.891
Malaysia	70	5.711
Indonesia	87	5.240
Laos	95	5.140
Myanmar	126	4.394
Afganistan	146	2.404

Sumber: <https://worldhappiness.report/ed/2022/happiness-benevolence-and-trust-during-covid-19>

5. Indeks Kesejahteraan di Australia

Australia Well-being Index (AWI) atau indeks kesejahteraan negara Australia mengukur kualitas hidup dari aspek pendapatan, standar hidup, kemampuan dana pensiun, isu pendidikan, kesehatan fisik dan penggunaan/penyalagunaan narkoba, merasa menjadi bagian masyarakat, kurangnya waktu (lack of time), hubungan pribadi atau hubungan keluarga, lingkungan, penampilan fisik, isu pekerjaan, perumahan, kesejahteraan rohani dan keselamatan pribadi (AWI, 2015).

6. Indeks Kesejahteraan di Malaysia

Malaysia Well-being Index (MWI) atau Indeks Kesejahteraan Malaysia (IKM) membagi 2 (dua) komponen yaitu kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Pengukuran indeks kesejahteraan ekonomi mencakup pengangkutan (penumpang kereta api, kepemilikan kendaraan, indeks pembangunan jalan dan panjang jalan perkapita), komunikasi (kepemilikan telepon/hp, jumlah lokasi hotspot dan pelanggan internet), pendidikan (angka partisipasi pendidikan tinggi, angka partisipasi pra-sekolah, angka partisipasi sekolah menengah, angka partisipasi sekolah dasar, persentase guru siswa di sekolah menengah, tingkat perpindahan ke sekolah lain, angka gred nasional, jumlah dosen bergelar Ph.D, tingkat gred nasional SPM, persentase guru siswa di sekolah dasar, jumlah siswa di sekolah menengah dan sekolah dasar), pendapatan dan distribusi (kemiskinan, pendapatan perkapita dan koefisien gini berdasarkan pendapatan yang dapat dibelanjakan) dan pekerjaan (kecelakaan industri, pertikaian usaha/dagang, rata-rata jam kerja).

Sementara kesejahteraan sosial meliputi perumahan (persentase ketersediaan air rumah tangga, kesesakan, persentase ketersediaan listrik rumah tangga, persentase perawatan pengambilan sampah rumah tangga), cuti/rekreasi (jumlah pelanggan TV keluarga

yang membayar, pengunjung taman rekreasi, penonton bioskop dan pelanggan tamu hotel domestik), pemerintah (jumlah transaksi e-payment, persentase kasus diselesaikan, persentase pengguna e-filing dan persentase kasus korupsi yang di vonis), keselamatan masyarakat (kecelakaan di jalan dan jumlah perampokan), partisipasi sosial (jumlah penduduk terdaftar dalam kelompok, keterampilan sebagai sukarelawan dan bencana, jumlah LSM dan pemilih terdaftar), hubungan sosial (hubungan dengan orang tua, hubungan dengan komunitas, hubungan dengan teman), budaya (keanggotaan dalam perpustakaan publik, jumlah pengunjung museum, jumlah pengunjung rumah adat/budaya dan jumlah pengunjung kompleks kerajinan), kesehatan (harapan hidup semasa lahir, angkat kematian ibu, bayi, jumlah kasus tidak terjangkau penyakit, lama menunggu pasien, rasio dokter dengan penduduk dan jumlah klinik/rumah sakit), lingkungan (kualitas air, suhu min maksimum, persentase tanah hutan, kualitas udara dan kuantitas jadwal pengambilan sampah) keluarga (kasus kekerasan dalam rumah tangga, angka perceraian dan perampokan) (MWI, 2013).

7. Pengukuran kualitas hidup atau kesejahteraan di Indonesia

a. Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa pengukuran kesejahteraan masyarakat diukur melalui:

- (i) Dimensi pendidikan yang meliputi rasio murid dan guru, rasio murid dan sekolah, partisipasi sekolah, angka melek huruf dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Rasio siswa dan guru menggambarkan rata-rata murid yang diajar oleh seorang guru.
- (ii) Dimensi kesehatan meliputi derajat kesehatan masyarakat, status kesehatan masyarakat, lamanya hari pasien, pemberian air susu ibu, pertolongan

- saat melahirkan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan). Derajat kesehatan masyarakat seperti angka kematian bayi dan angka kematian di bawah umur 5 tahun, lama hari sakit dihitung menurut lamanya mengalami keluhan kesehatan. Keluhan kesehatan ialah keadaan seorang yang mengalami gangguan kesehatan seperti penyakit akut, kronis, kecelakaan, perampokan dan lain lain. Pemberian air susu ibu (ASI) kepada bayi akan memenuhi kebutuhan gizi dan memberi kekebalan terhadap beberapa penyakit. Keselamatan Ibu melahirkan dipengaruhi oleh siapa-siapa yang menolong, apakah itu medis (dokter/bidan/perawat) atau non medis.
- (iii) Dimensi tenaga kerja (perkembangan jumlah angkatan kerja, angka partisipasi angkatan kerja dan pengangguran terbuka, lowongan pekerjaan utama dan jam kerja). Dalam konsep BPS, penduduk umur kerja ialah 15 tahun ke atas.
 - (iv) Dimensi fasilitas perumahan (kualitas rumah, fasilitas rumah dan status kepemilikan rumah). Kenyamanan tempat tinggal tidak bisa dipisahkan dengan luas lantai dan jenis bahan rumah. Rumah yang berkualitas ialah mempunyai dinding luas dan terbuat dari tembok atau kayu dengan atap beton, genteng, seng dan lantai bukan tanah, termasuk mempunyai fasilitas seperti air ledeng, listrik dan sanitasi/wc.
 - (v) Dimensi pengeluaran makanan dan bukan makanan (BPS, 2022).

b. Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengukur kesejahteraan dengan 5 (lima) tingkatan yaitu :

- (1) Keluarga Pra Sejahtera (keluarga sangat miskin) adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi satu atau lebih dari pengukuran berikut yaitu (i) paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging/ikan/telur, (ii) setahun terakhir seluruh anggota keluarga mendapatkan paling sedikit satu stel pakaian baru dan (iii) luas lantai rumah paling kurang 8 meter persegi (m²) untuk setiap penghuni rumah.
- (2) Keluarga Sejahtera Tahap I (keluarga miskin) ialah keluarga yang telah dapat memenuhi keperluan dasarnya secara minimal seperti menjalankan ibadah menurut agama masing masing anggota keluarga, (ii) umumnya seluruh anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih, (iii) seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda di rumah, tempat kerja, sekolah dan bepergian, (iv) sebagian besar lantai rumah bukan dari tanah, (v) apabila anak-anak sakit atau ikut program keluarga kecil (pencegahan hamil) dibawa ke pusat kesehatan atau rumah sakit.
- (3) Keluarga Sejahtera Tahap II (keluarga rentang) ialah keluarga yang telah memenuhi kriteria keluarga sejahtera tahap I, harus pula memenuhi syarat sosial psikologis yaitu: (i) anggota keluarga menjalankan ibadah secara teratur, (ii) paling kurang sekali seminggu keluarga menyediakan daging/ ikan/ telur, (iii) seluruh anggota keluarga mendapat paling kurang satu stel pakaian baru per tahun, (iv) luas lantai rumah paling kurang 8 meter

persegi (m²) tiap penghuni rumah, (v) seluruh anggota keluarga dalam 3 bulan terakhir dalam keadaan sehat, (vi) paling kurang satu orang anggota keluarga yang berumur 15 tahun keatas mempunyai penghasilan tetap, (vii) seluruh anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun bisa membaca tulisan latin, (viii) semua anak berusia 5 - 15 tahun bersekolah pada saat ini, (ix) memiliki anak yang masih hidup 2 atau lebih, (x) keluarga yang masih usia produktif memakai kontrasepsi atau pencegahan hamil (kecuali sedang hamil).

- (4) Keluarga Sejahtera Tahap III ialah keluarga yang sudah memenuhi kriteria keluarga sejahtera tahap II, harus pula memenuhi syarat berikut yaitu; (i) mempunyai daya untuk meningkatkan pengetahuan agama, (ii) sebagian dari penghasilan keluarga dapat disimpan untuk tabungan keluarga, (iii) biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan itu dimanfaatkan untuk komunikasi dengan anggota keluarga, (iv) ikut juga dalam aktifitas masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya, (v) mengadakan rekreasi bersama diluar rumah paling kurang 1 kali dalam 6 bulan, (vi) mendapat berita dari surat kabar/TV/majalah/medsos, (vii) anggota keluarga mampu menggunakan sarana pengangkutan sesuai dengan keadaan daerah tempat tinggal.
- (5) Keluarga Pra Sejahtera Tahap III Plus ialah keluarga yang telah dapat memenuhi kriteria keluarga sejahtera tahap III dan dapat pula memenuhi kriteria pengembangan keluarganya yaitu; (i) secara teratur atau pada waktu tertentu dengan sukarela memberikan sumbangan bagi aktifitas sosial masyarakat dalam bentuk uang atau barang.

8. Pengukuran kualitas hidup dari Hasil Penelitian menurut Para Ahli

Penelitian Baris dan Osman (2003) di Turki mengukur kualiti hidup menggunakan dimensi pembangunan sosial melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan hanya 2 aspek saja yaitu 1) aspek kesehatan dengan pengukuran rata-rata kelangsungan hidup bayi, angka harapan hidup, pengeluaran untuk biaya kesehatan, kamar rumah sakit per seribu orang sebagai pengukuran hidup sehat dan 2) aspek pendidikan dengan pengukuran angka partisipasi sekolah dasar, angka partisipasi sekolah menengah, dan rata-rata melek huruf. Negara Turki terletak di dua benua yaitu benua asia dan benua eropa. Negara ini merupakan negara maju menurut CIA world Factbook (2022) atau publikasi tahunan dari Badan Intelengensi Amerika (<https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/turkey/>).

Penelitian Dalia and Juozas (2007) di Lithuania mengukur kualitas hidup dari dimensi materi/pendapatan, dimensi kesehatan fisik, dimensi lingkungan, pendidikan, ekonomi, kebebasan politik dan keadilan gender hubungan sosial baik dalam keluarga, kelompok, komunitas dan negara, ekonomi, kebebasan politik dan keadilan gender menyatakan bahwa kesehatan fisik dan materi adalah aspek utama dalam mengukur kualitas hidup dibandingkan aspek lain seperti persekitaran, akses pendidikan, hubungan sosial dalam keluarga, kumpulan, komuniti dan negara, ekonomi, kebebasan politik dan keadilan gender. Sama ada mengukur kualiti hidup dengan persepsi kepuasan individu terhadap elemen-elemen fizikal dalam kaedah penyelidikan sosial dengan analisis transkrip dan data statistik. Lepage (2009) di perancis menyimpulkan bahwa ada 9 (Sembilan) indeks kualitas hidup adalah (i) kesejahteraan materi dan lambang kebahagiaan dalam kesejahteraan materi dengan pendekatan ekonomi, (ii) kesehatan, (iii) stabilitas politik dan keamanan, (iv) kehidupan keluarga, (v)

kehidupan komuniti, (vi) iklim dan geography, (vii) kelansungan pekerjaan (viii) kebebasan politik dan (ix) keadilan gender. Dari kesembilan indeks kualitas hidup tersebut indeks pengukuran yang paling penting dalam kualitas hidup menurut Lepage adalah pertama kesehatan dan kedua adalah kesejahteraan materi dan kebahagiaan.

Azahan et al. (2006) di Malaysia mengukur kualitas hidup dari (i) dimensi pendidikan dengan indikator adalah taraf pendidikan, isu pelayanan, jarak kesekolah, frekuensi kemudahan menggunakan informasi teknologi, (ii) dimensi lingkungan pekerjaan dengan indikator adalah kondisi lingkungan tempat bekerja, mendapatkan cuti, jumlah hari kerja, (iii) dimensi perumahan dengan ukuran adalah jenis rumah, jarak dari rumah ketempat kerja, jarak kewarung, jarak kekantor pos, frekuensi ketersediaan air dan listrik). Penelitian Dalia dan Algirdas (2009) di Lithuania menemukan bahwa kebahagiaan atau kepuasan terhadap kualiti hidup yang lebih penting adalah keamanan/keselamatan dan pendapatan, namun konsep kualiti hidup dan konsep kebahagiaan itu tidak sama walaupun memiliki hubungan. Seseorang boleh memiliki indeks kualiti hidup yang tinggi tetapi tidak bahagia sebaliknya walaupun seseorang miskin tetapi merasa bahagia (Dalia dan Algirdas, 2009). Sementara Grace (2003) di Singapura mengukur kualitas hidup dari aspek individu seperti pendapatan dan aset, (ii) aspek hubungan sosial seperti bantuan materi, pelayanan dan informasi, dukungan penerimaan emosi, (iii) aspek tempat tinggal atau rumah seperti jenis rumah, kondisi rumah, dan fasilitas dalam rumah, (iv) aspek pelayanan umum seperti taxi, bus, MRT, pusat kesehatan/ klinik, fasilitas dan pusat perawatan, (v) aspek lingkungan seperti lingkungan yang aman, tersedia media informasi dan bebas beraktifitas), (vi) aspek masa santai (leisure) dengan pengukuran adanya cuti, menikmati hobby, berolah raga, pergi menonton film atau festival.

Lyndon et al. (2011) di Malaysia pada komunitas Bidayuh di negara bagian Serawak mengukur kualitas hidup dengan dimensi yaitu (i) keamanan dan kemapanan dengan ukuran antara lain pendapatan, uang dan tabungan, makanan, rumah, pekerjaan, lahan/tanah, akses terhadap pasar dan harga pasar yang pantas untuk hasil pertanian, pendidikan, keamanan, dan tidak ada hutang), (ii) dimensi fisik dan kesejahteraan psikologi dengan ukuran kerohanian, amalan keagamaan dan sifat moral, kesehatan, harapan dan impian, penampilan yang baik, (iii) dimensi usaha dengan pengukuran yaitu capaian dalam kehidupan, informasi, sosial, penyampaian pelayanan masyarakat, (iv) dimensi hubungan keluarga dengan ukuran hubungan dengan ibu dan bapak atau mertua, adik-kakak, anak-anak, keluarga dekat, hubungan suami isteri, kehidupan disaat tua), (v) dimensi komunitas, sumber dan lingkungan dengan ukuran infrastruktur dan pelayanan publik, hubungan dengan anggota komunitas, tetangga dan teman, dorongan kebaikan, administrasi lokal dan pemerintahan, (vi) dimensi partisipasi dengan ukuran membuat keputusan, mengawal perencanaan dan pelaksanaan, (vii) dimensi pemberdayaan dengan ukuran pemberdayaan internal, dan pemberdayaan lainnya.

Shaladdin et al. (2009) juga di Malaysia menganalisis kesejahteraan hidup nelayan pesisir dengan pengukuran, (i) pendapatan (apakah pendapatan sebagai nelayan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, apakah puas dengan pendapatan yang diperoleh, apakah pendapatan sekarang lebih baik dari masa lalu dan apakah mereka merancang pendapatan di masa yang akan datang lebih baik daripada sekarang), (ii) perbelanjaan (belanja keluarga dapat dipenuhi sepenuhnya, puas dengan kemampuan belanja untuk keluarga, apakah belanja sekarang lebih baik daripada masa lalu dan apakah mereka merencanakan belanja di masa akan datang lebih baik daripada sekarang), (iii) tabungan

(apakah mereka mempunyai simpanan yang cukup untuk kegunaan keluarga, puas dengan jumlah tabungan yang ada sekarang, apakah tabungan yang ada sekarang lebih baik daripada masa lalu dan apakah mereka meencanakan nilai tabungan akan bertambah pada masa depan), (iv) rumah tempat tinggal (apakah rumah yang didiami sekarang dapat menampung anggota keluarga, apakah puas dengan rumah yang ditempati sekarang, apakah rumah yang ditempati sekarang lebih baik daripada masa lalu dan apakah mereka merencanakan rumah yang mereka tempati sekeluarga bertambah baik di masa akan datang), (v) lahan/tanah (apakah lahan yang ditempati sekarang mampu menampung keperluan sekarang, puas hati dengan lahan/tanah yang ditempati sekarang, apakah mereka merencanakan akan memiliki keluasan tanah yang lebih baik daripada sekarang), (vi) kendaraan (apakah mereka memiliki kendaraan, apakah puas dengan kendaraan yang ada sekarang serta apakah mereka merencanakan di masa depan akan dapat memiliki kendaraan yang lebih baik daripada sekarang), (vii) perahu dan peralatan nelayan (apakah mereka merasakan perahu dan peralatan nelayan yang ada sekarang memadai untuk menangkap ikan, apakah puas dengan apa yang ada sekarang, apakah perahu

dan peralatan nelayan yang ada sekarang lebih baik daripada masa lalu dan apakah mereka akan mempunyai perahu dan peralatan nelayan yang lebih baik di masa akan datang daripada sekarang), (viii) kesehatan (apakah para nelayan merasakan kerja sebagai nelayan dapat mengganggu kesehatan mereka, apakah mereka merasakan bekerja sebagai nelayan telah menjaga kesehatan mereka dan apakah puas dengan tahap kesehatan sekarang), (ix) pendidikan (apakah puas dengan tingkat pendidikan mereka, apakah mereka merasakan pendidikan adalah penting untuk menaikkan taraf kehidupan, mengetahui pendidikan juga penting untuk bekerja sebagai nelayan dan apakah mereka setuju tingkat pendidikan yang baik akan meningkatkan taraf hidupnya sebagai nelayan).

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa dalam mengukur kualitas hidup masyarakat atau negara terdapat perbedaan baik karena faktor domisili/tempat tinggal, norma, budaya, dan penerimaan mereka terhadap pembangunan, sehingga tidak ada konsep yang dapat diterima secara universal. Untuk ringkasan dimensi atau aspek kualitas hidup seperti yang diutarakan dalam pembahasan diatas dapat dilihat dalam tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Dimensi Kualitas Hidup

No	Nama	Berbagai Dimensi Kualitas Hidup
1	Ventegodt (2003)	Dimesi pendapatan, makanan, kesehatan, pendidikan, lingkungan, politik, sosial, agama, budaya dan psikologi merupakan dimensi secara objektif. Dimensi kepuasan terhadap apa yang dirasakan
2	Dalia dan Juozas (2007), Penelitian di Lithuania	Dimesi kualitas hidup diukur melalui dimesi (i) keadaan Materi seperti kesejahteraan dan keadaan kehidupan, (ii) keadaan Psikologi, (iii) kondisi Fisik, (iv) hubungan sosial, (v) keamanan dan lingkungan, (vi) ekspresi diri dan kenyamanan.
3	Azahan et al. (2006), Penelitian di Malaysia	Dimensi pendidikan, (ii) dimesni lingkungan, (iii) dimensi pekerjaan, (iv) dan dimesni perumahan
4	Baris dan Osman (2003) Penelitian di Uni Eropa	Pengukuran kualitas hidup iaitu (i) dimensi kesehatan, (ii) dimensi pendidikan, (iii) dimensi/akses pengetahuan.
5	Grace (2003), Penelitian di Singapura	(i) dimensi individu, (ii) dimensi hubungan sosial, (iii) rumah/tempat tinggal, (iv) fasilitas umum, (v) lingkungan, (vi) masa santai (leisure)

6	Daila dan Algirdas (2009)	Subjektif (kepuasan kesejahteraan, kepuasan hidup, kebahagiaan dan arti hidup) Objektif (faktor faktor objektif seperti budaya, pemenuhan kebutuhan hidup, adanya potensi dan kebutuhan biologi).
7	Indeks Pembangunan Manusia atau HDI (UNDP, 2022)	Pendapatan (kemampuan daya beli), pendidikan (rata-rata lama sekolah, dan masa sekolah untuk anak usia masuk sekolah) dan kesehatan (sehat dan panjang umur dan harapan hidup saat lahir).
8	Lyndon et al. (2011)	Dengan dimensi keamanan dan kemapanan (ii) dimensi fisik dan kesejahteraan psikologi (iii) dimensi usaha (iv) dimensi hubungan keluarga, (v) dimensi komunitas, sumber dan lingkungan, (vi) dimensi partisipasi dan (vii) dimensi pemberdayaan
9	Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO (Maria et al., 2010).	Mengukur kuitas hidup dari aspek persepsi individu terhadap lingkungan, kesehatan fisik, psikologi dan hubungan sosial.
10	Indeks kebahagiaan (https://happiness-report./2022.pdf)	(i) GDP Perkapita, (ii) harapan hidup sehat saat lahir, (iii) dukungan social, (iv) kebebasan untuk membuat pilihan hidup, (v) kemurahan hati, (vi) persepsi tentang korupsi (vii) pengaruh positif, dan (viii) pengaruh negatif
11	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs (Bank Dunia, 2022)	Penanggulangan kemiskinan dan kelaparan ekstrem, Pendidikan dasar untuk semua, kesehatan (angka kematian anak, ibu, HIV dan AIDS, demam berdarah serta penyakit lain), kesamaan gender dan pemberdayaan perempuan, lingkungan yang nyaman dan pengembangan kerjasama global
12	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (UU No 10 Tahun 1992)	Dimensi kesehatan, dimensi makanan, dimensi kerohanian/ibadah, sandang/rumah, dimensi pekerjaan dan dimensi traveling.
13	Badan Pusat Statistik (BPS, 2022)	BPS mengukur kualitas hidup melalui: i) pendapatan, ii) aspek pendidikan, iii) aspek kesehatan, iv) perumahan (kepemilikan rumah, kondisi fisik rumah, v) aspek pekerjaan, dan vi) pengeluaran makanan dan bukan makanan
14	Australia wellbeing tahun 2015 http://business.nab.com.au/wp-content/uploads/2016/03/Wellbeing-Report-Q4-2015-final.pdf	Kondisi keuangan secara umum, standar hidup dan kemampuan dana pensiun, isu pendidikan, kesehatan fisik dan penggunaan/ penyalagunaan bahan/zat, merasakan bahwa kurang waktu untuk komunitas, hubungan pribadi atau keluarga, lingkungan, penampilan fisik, isu pekerjaan dan berapa lama mendapatkan kerja, perumahan, kesejahteraan rohani dan keamanan pribadi.
15	Malaysia well being tahun 2013 http://www.epu.gov.my/en/krm2013	Pendapatan dan distribus, aspek pendidikan, aspek kesehatan, partisipasi organisasi sosial, budaya, hubungan keluarga, spek lingkungan, pengangkutan, komunikasi, aspek pekerjaan, perumahan, masa cuti/rekreasi/santai, layanan pemerintahan dan keselamatan masyarakat dalam dan luar rumah
16	Michael, 1999).	(i) makanan/kalori, (ii) pendapatan individu, (iii) keselamatan perang, (iv) keselamatan dari pembunuhan, (v) jangka hidup panjang, (vi) perceraian, (vii) kematian anak, (viii) hak asasi politik, (ix) partisipasi perempuan dalam bekerja, (x) pendidikan rendah, (xi) pendidikan menengah dan (xii) pengajian tinggi
17	Lepaga Perancis (2009)	di (i) kesejahteraan materi, (ii) kesehatan, keamanan dan stabiliti politik, kehidupan keluarga, komuniti, iklim dan geography, tidak mengganggu, kebebasan politik dan keadilan gender. Pengukuran yang paling penting dalam kualitas hidup ialah ialah kesehatan, kesejahteraan materi dan kebahagiaan.

- 18 Olivas et al. (2014), keluarga merupakan elemen yang sangat penting dalam kualitas hidup penelitian di Meksiko nelayan tradisi disusul cuaca yang baik, hubungan dengan teman, kesehatan, rumah, air, peluang pekerjaan, kedamaian, pendidikan, shopping, biaya hidup, pengangkutan, kebisingan dan terakhir liburan/holiday.

KESIMPULAN

Terdapat perbedaan pendapat para ahli tentang konsep kualitas hidup, sehingga dimensi pengukuran kualitas hidup di masing-masing negara juga akan berbeda, namun demikian satu kesepakatan yang ditentukan dalam organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sehingga kita dapat mengetahui seberapa besar kualitas sumber daya manusia di masing-masing negara. Walaupun demikian hal ini tidak menjamin secara utuh konsep kualitas hidup secara objektif dan secara subjektif karena IPM tidak memasukkan dimensi kualitas hidup secara subjektif. Artinya seberapa besar masyarakat merasakan kepuasan terhadap dimensi-dimensi kualitas hidup secara objektif atau hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai oleh daerah atau negaranya. Indeks kebahagiaan dan konsep kualitas hidup menurut organisasi kesehatan dunia (WHO) lebih mengukur kualitas hidup secara subjektif karena persepsi individu terhadap apa yang mereka rasakan. Oleh karena itu, integrasi pengukuran kualitas hidup secara objektif dan subjektif adalah penting karena orang yang mampu secara ekonomi (objektif) belum tentu merasakan hidup bahagia (subjektif).

DAFTAR PUSTAKA

Australian Well-being Index (AWI) (2015). NAB Australian Wellbeing Index – QA 2015. How Australians assess the quality of their lives. by NAB Behavioural & Industry Economics (Group Economics). <http://business.nab.com.au/wp-content/uploads/2016/03/Wellbeing-Report-Q4-2015-final.pdf>.

- Azahan, Awang; Abdul Samad, Hadi; Jamaluddin, Md Jahi; Asmah, Ahmad & Abdul Hadi, Harman Shah. (2006). Mendefinisi Semula Makna Kualiti Hidup Masyarakat Bandar Dalam Konteks Ilmu Sosial. *Malaysian Journal of Environmental Management*. 7, 19-32.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). Sosial dan Kependudukan. http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel.
- Baris, K.Y and Osman, Z. (2003). Measuring the quality of life in European union. The Case of Turkey as a Candidate, *International Journal of Social Economic*. 30 (11) 1162-1176.
- CIA World Factbook (2022). Explore All Countries-Turkey. Middle East. Di ambil pada tanggal 3 April 2022 dari <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/turkey/>.
- Dalia, S. and Algirdas, J. (2009). The Concept of life and Happiness-Correlation and Differences. *Engineering Economic*. (3), 58-66.
- Dalia, A. and Juozas, R. (2007). Quality of life and its Components' Measurement. *Engineering Economics*. 2 (52), 44-49.
- Lyndon, N.; Bustami, M.R. and Salfarina, A.G. (2011). "Persepsi Kualitas Hidup Komunitas Bidayuh: Kajian Perbandingan antara Peserta dan Bukan Peserta Program (Skema Pembangunan Kasusejahteraan Rakyat) di Daerah Serian, Serawak. *Journal of Society and Space* 7 Special Issue: *Social and Spatial Challenges of Malaysian Development* (91 – 104).
- Malaysia Well-Being Report (MWI) (2013). Economic Planning Unit Prime Minister'S Departement Putrajaya. di

- ambil bulan November 2013. <http://www.epu.gov.my/en/krm2013>.
- Michael, R.H. (1999). Testing Maslow's Hierarchy of Needs: National Quality of Life Across Time. *Social Indicators Research*. 46 (3), 249-271.
- UNDP. (2022). Human Development Index (HDI). Di dapat melalui <https://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi> pada tanggal 31 maret 2022.
- UNDP. (2022). Sustainable Development Goals. Di dapat melalui <https://www.undp.org/sustainable-development-goals?>.
- Undang-undang Dasar (UUD) 1945 beserta dengan Perubahannya. (2014). Educative Presindo. Bandung.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- Ventegodt, S.; Merrick, J. and Andersen, N.J. (2003). Quality of Life Theory I. The IQOL Theory: An Integrative Theory of the Global Quality of Life Concept. *The Scientific World Journal*, 3, 1030-1040.
- WHO (2022). WHOQOL: Measuring Quality of Life. Didapat melalui <https://www.who.int/tools/whoqol> pada tanggal 31 maret 2022.

**KOMPETENSI KEPALA DAERAH DALAM PELAYANAN PUBLIK
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**
*COMPETENCY OF REGIONAL HEAD IN PUBLIC SERVICES OF THE
GOVERNMENT OF SOUTH SULAWESI PROVINCE*

Rudi Salam, Sudiarti, Aris Baharuddin, Denok Sunarsi
Jurusan Ilmu Administrasi, Universitas Negeri Makassar, Indonesia
Jurusan Manajemen, Universitas Pamulang, Indonesia
Email: rudisalam@unm.ac.id

ABSTRAK

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dapat disimpulkan betapa masih rendahnya kualitas pelayanan di Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, Padahal tuntutan kualitas dan kuantitas jasa layanan public oleh penggunaan (User) semakin meningkat. Penggunaan telah membayar jasa layanan public, tetapi kualitas dan kuantitas diinginkan belum terpenuhi. Transparansi akuntabilitas dalam pelayanan public diperlukan untuk mengatasi kesenjangan pihak-pihak yang terikat dalam pelayanan public, sehingga dituntut pula regulator yang mampu mengalokasikan sumber daya yang ada dan terjadfi keseimbangan pihak-pihak yang terikat dalam pelayanan public. Diluar penggunaan pelayanan publik (*non-user*) perlu diperhatikan kepentingannya, khususnya tuntutan lingkungan strategis. Hingga saat ini pelayanan public masih memiliki berbagai kelemahan antara lain : kurang responsive, kurang informative, kurang bisa diakses (*accessible*), kurang koordinasi, dan birokrasi dimana pelayanan perizinan pada umumnya dilakukan melalui proses yang terdiri dari berbagai level sehingga terlalu lama. Selain itu, pelayanan public juga kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat dan inefisien.

Keywords: Kepala Daerah, Pelayanan Publik, Kualitas Pelayanan.

ABSTRACT

The results of the study indicate that it can be concluded how low the quality of service in the South Sulawesi Provincial Government is, even though the demand for the quality and quantity of public services by users is increasing. The use has paid for public services, but the desired quality and quantity have not been met. Transparency of accountability in public services is needed to overcome the gap between the parties involved in public services, so that regulators are also required to be able to allocate existing resources and there is a balance between the parties involved in public services. Apart from the use of public services (non-users), it is necessary to pay attention to its importance, especially the demands of the strategic environment. Until now, public services still have various weaknesses, including: less responsive, less informative, less accessible, lack of coordination, and bureaucracy where licensing services are generally carried out through a process consisting of various levels so that it is too long. In addition, public services are also less willing to listen to community complaints/suggestions/aspirations and are inefficient.

Keywords: Regional Head, Public Service, Service Quality.

PENDAHULUAN

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama seluruh pemerintah daerah se-Sulsel terus bergerak dalam mewujudkan provinsi berinovasi terdepan di Indonesia dalam pelayanan public (Asmara & Rahayu, 2020;

Maulana et al., 2019; Syam et al., 2018). Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Provinsi Sulsel, Syamsul Rizal mengatakan, pada tahun lalu sudah pernah dilakukan Sosialisasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), namun belum berjalan maksimal karena

tidak semua pemerintah kabupaten dan kota di Sulsel yang ikut karena belum memahami penyusunan proposal naskah inovasi.

Sosialisasi KIPP kembali dilakukan karena pada tahun lalu belum berjalan maksimal dan tidak semua pemerintah daerah di Sulsel ikut didalamnya. Hal ini disebabkan karena mereka belum memahami penyusunan proposal atau naskah akademik inovasi (Faisal & Nain, 2018; Nain, 2012, 2015, 2017, 2019; NAIN, 2001). Pemerintah daerah di Sulsel sebenarnya sudah berinovasi meski belum secara penuh memahami cara penyusunan naskah akademiknya, karena inovasi merupakan tuntutan yang harus dilakukan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat (Mondal et al., 2010; Ramani *et al.*, 2012).

Inovasi merupakan tuntutan dari masyarakat agar mendapatkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Daerah sudah melakukannya, tinggal terus dilakukan perbaikan,” imbuh Syamsul Rizal. Syamsul Rizal lebih jauh menjelaskan Melalui kompetisi yang diikuti seluruh pemerintah daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulsel, diharapkan akan lahir inovasi baru yang nantinya akan diperlombakan dalam tingkat nasional maupun internasional (Kwaku Ohemeng & Adusah-Karikari, 2015; Ma, 2012; Wollmann *et al.*, 2010).

Seluruh inovasi yang telah dibuat nantinya akan dipresentasikan dan dinilai, dan pemenangnya akan diperlombakan pada tingkat nasional maupun internasional,” tegas Syamsul Rizal. Hal ini juga sejalan dengan tuntutan dan visi misi Gubernur Sulsel yang inovatif, kreatif dan berkarakter, sehingga inovasi harus terus dilakukan, bukan hanya karena ada kompetisi, melainkan harus menjadi budaya kerja (Gallouj & Zanfei, 2013; Zhu, 2014).

Berinovasi dilakukan bukan karena ada kompetisi melainkan harus menjadi budaya kerja, karena hanya negara yang kuat

inovasinya yang mampu bersaing dikancah dunia,” tegasnya. Khusus untuk inovasi di pelayanan publik seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) ini tentunya akan mempermudah masuknya investasi karena masyarakat, khususnya investor akan mendapatkan kemudahan baik dari kepastian waktu, biaya maupun lainnya,” tutupnya. Prof. Sangkala, Ketua Tim Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Pemprov Sulsel mengatakan, hal tersebut sesuai visi Gubernur Sulsel yang inovatif, produktif, berkarakter, kompetitif serta inklusif sehingga inovasi menjadi satu keniscayaan yang wajib dilakukan. Mari kita siap dan menjadi inovator- inovator yang kuat, yang mampu bersaing baik secara nasional maupun global,” tegas Sangkala. Inovasi ini juga menjadi bagian akselerasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik, yang terus dilakukan, termasuk kedepannya akan dilakukan penataan ASN,” tutupnya.

Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan membuat gebrakan dalam sektor pelayanan publik, hal itu ditunjukkan dengan hadirnya delapan inovasi dari kabupaten dan kota di Provinsi Sulsel yang masuk dalam tahap Presentasi dan Wawancara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun 2021. Delapan inovasi yang dibangun berasal dari berbagai macam kategori, seperti dalam bidang tata kelola pemerintah; pendidikan; pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja; kesehatan; pendidikan; pemberdayaan masyarakat; dan ketahanan pangan.

Presentasi hari ke-14 ini diawali oleh Plt. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman dengan membawa inovasi Gerai Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan (Gesit-19). Dijelaskan Gesit-19 merupakan inovasi penyelenggaraan pelayanan perizinan sektor Kelautan dan Perikanan dengan mekanisme gerai, yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, diselenggarakan oleh

Pemerintah Kabupaten Sinjai. Terobosan diperuntukkan mengatasi permasalahan yang dihadapi nelayan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menempatkan gerai pada kawasan pusat pelelangan ikan (PPI) Lappa Kabupaten Sinjai.

Inovasi kedua datang dari Kota Makassar dengan terobosan Semua Membantu Menghidupkan Perpustakaan (Sentuh Pustaka). Wali Kota Makassar Ramdhan Pomanto mengatakan Sentuh Pustaka merupakan program untuk mewujudkan penyelenggaraan perpustakaan sekolah sesuai dengan standar dan meningkatkan kemampuan membaca masyarakat melalui pembudayaan kegemaran sejak dini. Tujuannya meningkatkan jumlah perpustakaan sekolah yang dibina dan memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) di Kota Makassar, kemudian meningkatkan jumlah perpustakaan sekolah yang berkualitas sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) dan memperoleh akreditasi.

Kota Palopo menjadi inovator ketiga dengan terobosan Mudah, Akuntabel, Bersahabat, Adil, Sederhana, Simpatik, dan Aman (MABASSA). Wali Kota Palopo Judas Amir menerangkan inovasi MABASSA memiliki tujuan menyatukan semua jenis izin dan Tim Teknis yang tersebar di PD teknis menjadi terpusat di DPMPTSP. Kemudian untuk menyederhanakan jenis dan persyaratan setiap perizinan sehingga masyarakat lebih mudah dalam pengurusan legalitas usaha. Melalui inovasi MABASSA maka pengurusan izin yang masih tersebar di OPD Teknis dapat disatukan dalam DPMPTSP dengan melakukan penyederhanaan perizinan dari 78 izin menjadi 24 jenis pelayanan. Selain itu sistem pelayanan yang semula menggunakan secara manual sekarang menggunakan sistem daring dan juga menyediakan pelayanan akhir pekan (Sabtu dan Minggu), dan DPMPTSP menyediakan layanan Jemput Antar (JA) berkas bagi pelaku usaha yang membutuhkan.

Selanjutnya, Bupati Barru Suardi Saleh membawa inovasi Wisata Posyandu.

Disampaikan jika awal pembangunan Wisata Posyandu untuk mengubah pola layanan di posyandu dengan menjadikan posyandu bukan hanya pusat layanan kesehatan, tetapi juga menjadi sarana hiburan atau rekreasi bagi keluarga sehingga menarik minat masyarakat. Wisata Posyandu merupakan kumpulan dari beberapa inovasi antara lain timbangan model, ulang tahun bersama di posyandu, penyuluhan kesehatan dengan pertunjukan boneka, arena bermain anak dipadukan dengan permainan rakyat, dan wisuda balita.

Dari latarbelakang diatas, melalui pelayanan yang diberikan para kepala daerah di Sulawesi Selatan, memberikan gambaran bahwasanya, seorang Kepala Daerah Pemerintahan harus mengembangkan kompetensinya dalam mendukung Pelayanan Publik.

METHOD

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kajian pustaka atau studi kepustakaan yaitu berisi teori teori yang relevan dengan masalah – masalah penelitian study (Kelly *et al.*, 2010; Migiro & Magangi, 2011; Patel *et al.*, 2013). Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian. Kajian pustaka atau studi pustaka merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. Sehingga dengan menggunakan metode penelitian ini penulis dapat dengan mudah menyelesaikan masalah yang hendak diteliti. library research, yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat

kepuustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Birokrasi di Pemerintahan Sulawesi Selatan ketika persepsi yang muncul adalah suatu system pelayanan dan administrasi pemerintahan yang terkesan aneh, berbelit-belit dan lamban. Birokrasi merupakan penyakit menahun di tanah air yang sulit di ubah. Maka banyak upaya dan program-program pembangunan dan pengembangan kelembagaan yang juga direformasi menuju system yang lebih demokratis.

Birokrasi, dunia usaha dan masyarakat adalah tiga pilar utama dalam upaya mewujudkan pelaksanaan pemerintah yang baik dikenal dengan konsep “Good Governance” (Abdou, 2021; Herawaty, 2017; Wahyurudhanto, 2020). Birokrasi sebagai organisasi formal memiliki kedudukan dan cara kerja yang terikat dengan peraturan, memiliki kompetensi sesuai jabatan atau wewenang, semangat pelayanan public, pemisahan yang tegas antara milik organisasi dan individu serta sumber daya organisasi yang tidak bebas dari pengawasan eksternal. Jika kondisi ini bias terpenuhi maka harapan mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara yang demokratis akan membawa kebaikan bagi Negara dan bangsa ini.

Karena itu birokrasi harus bisa dipahami, melalui peran dan kemampuannya, menunjang pelaksanaan system pemerintahan, baik dalam merespon berbagai permasalahan maupun dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat capabilities (Crozier & Friedberg, 2017; O’Donnell, 2018; Provan et al., 2017). Inti salah satu kondisi birokrasi yang professional adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat (public service), sehingga cita-cita, inisiatif dan upaya-upaya birokrasi perlu

diarahkan guna memiliki wawasan pelayanan public. Birokrasi hadir sebagai kreasi dari penguasa untuk memberikan pelayanan kepada penguasa, dengan tujuan untuk memperluas dan memperbesar serta mempertahankan kekuasaan. Dengan reformasi birokrasi yang dilakukan, konsep pelayanan pun dilakukan perubahan, dari orientasi pelayanan penguasa sampai saatnya menuju orientasi pelayanan publik.

Birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Saat Ini

Upaya-upaya pembaharuan dalam manajemen pemerintahan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja birokrasi. Selama orde baru, birokrasi memiliki andil besar dalam proses pembangunan. Pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan seperti pelayanan public, regulasi, proteksi, dan distribusi pada dasarnya di topang oleh demokrasi. Namun, peran birokrasi pada masa itu tidak menunjukkan potret yang baik. Persepsi masyarakat memperlihatkan bahwa citra dan kinerja birokrasi masih harus lebih ditingkatkan. Bahkan, masyarakat terkesan enggan untuk berurusan dengan birokrasi, karena berkonotasi dengan citra negative seperti redahnya kualitas pelayanan public, berprilaku korup dan nepotism (KKN), memiliki kecenderunga untuk memusatkan kewenangan, masih rendahnya profesionalisme, dan tidak terdapatnya budaya dan etika yang baik. Berbagai upaya perbaikan telah diupayakan, namun belum dapat menciptakan system birokrasi yang mantap dan membawa konsekwensi terlaksananya agenda reformasi secara cepat dan tepat. Perbaikan birokrasi belum juga menunjukkan gejala perbaikan yang positif. Bahkan sebaliknya kelembagaan birokrasi semakin transparan dalam melakukan korupsi dan akuntabilitas public menjadi pertanyaan besar.

Hasil penelitian lembaga Political and Economic Risk Consultansy (PERC) yang

dilakukan pada tahun 2002, Indonesia masuk Negara yang terpuruk birokrasinya., sampai saat ini belum mengalami perubahan yang cukup signifikan. Salah satu aspek penilaian adalah birokrasi pemerintah (kelembagaan pemerintah) yang mengindikasikan sejauh mana lembaga pemerintah memberikan kemampuan pelayanan yang baik berorientasi pada pelanggan atau public, minjinya korupsi, atau berorientasi pada kerangka hukum yang jelas.

Banyak factor yang signifikan menjelaskan kondisi keterpurukan birokrasi di tanah air, dan beberapa dijelaskan dalam uraian sebagai berikut.

Pertama, masih lemahnya kesadaran dan kemampuan untuk melakukan prinsip-prinsip good governance dengan baik. Jika hal ini dilakukan secara baik, maka masyarakat akan dapat memahami dan merasakan peran dan fungsi birokrasi yang sesungguhnya pada saat mendapatkan pelayanan. Di samping itu, masyarakat yang memahami dengan baik akan peran fungsi birokrasi akan menjadi kekuatan yang baik dalam melakukan perubahan secara efisien, namun juga bisa terjadi sebaliknya menjadi kelemahan dan bahkan penghambat dalam melakukan perubahan. Di masa reformasi banyak yang optimis bahwa kinerja birokrasi di Indonesia akan semakin membaik. Hal ini diperkuat oleh adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah hanya mengelolah enam bidang saja, yaitu politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiscal dan agama, serta beberapa bidang lainnya. Konsekwensinya adalah adanya perubahan kelembagaan yang sangat berarti dalam konteks desentralisasi yang tentunya membawa implikasi baru dalam manajemen public yang telih terfokus pada daerah dan lebih menguasai persoalan dan kondisi budaya lokal.

Kedua, system pemerintahan desedntralisasi yang digulirkan sejak era reformasi merupakan angin segar dalam pelaksanaan birokrasi, teritama di daerah.

Daerah dengan kewenangan dan tanggung jawab yang diembanya dapat merancang dan melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan kondisi geografis dan demografisnya. Hal ini juga mendorong banjgkitnya prakarsa dan kreativitas pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat dan swasta untuk menciptakan kerjasama yang harmonis dalam rangka membangun pelayanan yang baik. Namun, dalam pelaksanaan desentralisasi di era otonomi daerah ini muncul penafsiran yang beragam dan bahkan cenderung kebablasan sehingga terkesan menciptakan penguasa-penguasa dan raja-raja kecil di daerah. Artinya, dalam pelaksanaanya ada kecenderungan sebagian pemerintah daerah menafsirkan bahwa mereka memiliki kekuasaan yang sangat tinggi dalam mengurus rumah tangganya tanpa memperhatikan hubungan koordinasi dengan pemerintah pusat.

Ketiga, konsekuensi dari otonomi daerah yang kebablasan inilah, tidak bisa dinafikkan kondisinya saat ini banyak posisi atau jabatan di birokrasi di isi oelh orang-orang yang tidak memiliki kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan pekerjaannya. Hal tersebut terjadi karena lebih mengutamakan pada pengangkatan posisi di dalam jabatan structural, yang lebih diutamakan katena ruang, pangkat, golongan atau karena senioritas, bukan karena kopotensinya. Kondisi inilah yang terkadang sering menimbulkan penyimpangan wewenang dan penyalahgunaan kekuasaan. Birokrasi yang demikian, tentunya bukan menjadi harapan masyarakat. Pemerintah sendiri sebenarnya telah menyediakan paying hukum untuk menciptakan good governance sekaligus upaya untuk menunjukkan komitmennya terhadap prakti-praktik penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam system birakrasi di tanah air. Contohnya saja, Tap MPR RI No. XI/MPR/1999 dan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan

nepotisme, serta UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1999 tentang Komisi Pemeriksaan Kekayaan Negara, demikian pula dengan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Semua Payung hukum ini di buat untuk menjaga aparatur birokrasi, sebagai garda terdepan pelayanan public, menjadi bersih dan professional., sehingga harapannya kepercayaan masyarakat akan berangsur menjadi positif.

Keempat, masih kurang efisiennya institusi birokrasi sendiri. Pada masa sebelum reformasi dilakukan, aparatur atau SDM birokrasi banyak yang tidak berkompeten di bidang pekerjaan dan tidak professional karena praktik-praktik nepotisme. Walaupun sebenarnya saat ini kondisinya tidak banyak berubah secara dramatis. Birokrasi menjadi gemuk karena harus menampung sanak saudara dan keluarga para pejabat atau penguasa dalam birokrasi. Rendahnya mutu aparatur atau SDM birokrasi bisa dilihat dari beberapa indicator seperti kemampuan pelayanan yang tidak optimal, sebagian besar waktu tidak digunakan secara produktif, dan belum optimalnya peran-peran dalam menemukan terobosan menjalankan tugas sebagaimana diamatkan.

Kelima, belum jelasnya standar kinerja yang dapat diukur untuk menentukan mutu output yang dihasilkan aparatur. Hal tersebut terkait dengan asumsi bahwa seberapapun kualitas dari output kegiatan yang dilaksanakan tidak akan memberikan perubahan terhadap penghargaan kepada aparatur yang bersangkutan. Kondisi ini terkait dengan motivasi, yang akan berpengaruh terhadap sanksi baik reward maupun punishment.

Keenam, pengawasan sebagai bagian dari proses interaksi pembelajaran sekaligus memberikan wahana dijalankannya system sanksi, penghargaan tidak atau belum berjalan sebagaimana diharapkan. Konsep pengawasan yang dijalankan saat ini masih merupakan

ritual administrative yang tidak memiliki banyak manfaat dalam pengembangan SDM aparatur.

Ketujuh, kecenderungan lemahnya kompetensi terkait dengan penggunaan teknologi informasi menuju e-government merupakan salah satu tantangan dan kebutuhan. Apabila ditambah dengan minimnya fasilitas hardware dan software teknologi informasi dan komunikasi yang lebih canggih di lembaga-lembaga birokrasi, terutama di daerah. Hal ini berakibat pada pelaksanaan system pelayanan publik yang masih manual dan lamban.

Kedelapan, hubungan dan komunikasi yang kurang terbuka diantara aparatur birokrasi yang ada membawa dampak terhadap kondisi ketidakpercayaan atau distrust sehingga memberikan fasilitasi komunikasi dialog dan rendahnya gagasan untuk pengembangan karena hubungan masih dilihat dalam konteks “siapa” yang dibicarakan dan bukan “apa” yang dibicarakan.

Kesembilan, rendahnya kualitas SDM aparatur, yang tercermin dari kondisi kesejahteraan pegawai, rekrutmen dan pembinaan karier, budaya kerja dan profesionalisme sumber daya aparatur yang belum sepenuhnya mampu memberikan pengaruh positif dalam proses perkembangan aparatur. Karena persoalan kesejahteraan inilah, seringkali tindakan-tindakan yang tidak jujur atau tidak mengandalkan moralitas menjadi mengedepankan. Pungutan liar, tindak penyuapan dan semacamnya menjadi bagian yang membuat birokrasi semakin kompleks.

Kesepuluh, selain mentalitas dan budaya kekuasaan masih merupakan karakter sebagian besar aparat birokrasi pada masa reformasi. Kultur kekuasaan yang telah terbentuk semenjak masa pra-modern ternyata masih sulit untuk dilepaskan dari perilaku aparat atau pejabat birokrasi. Kultur seperti itu telah menyebabkan perilaku pejabat birokrasi menjadi bersikap acuh dan arogan terhadap

masyarakat. Perilaku-perilaku tersebut telah menyebabkan antara lain budaya kerja yang tidak disiplin, tidak tepat waktu, menunda-nunda pekerjaan, serta tidak ada kerjasama dan koordinasi dengan rekan kerja. Perilaku birokrasi yang demikian dapat ditemui pada saat pengurusan pembuatan surat perizinan, yang tidak tepat waktu akibat penundaan suatu pekerjaan, disamping kurang adanya kerjasama di antara pegawai kerja untuk menyelesaikan surat perizinan sesuai waktunya.

Permasalahan dan kondisi seperti yang dijelaskan di atas, memang secara perlahan-lahan telah diantisipasi dan diatasi oleh pemerintah sendiri. Beberapa kementerian telah melakukan reformasi birokrasi sendiri di wilayah kerjanya. Memang jika tidak diperbaiki hal-hal terjadi di atas, maka akan sulit untuk mewujudkan tujuan mencapai kondisi reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik atau public service.

Birokrasi dan Kompetensi Kepala Daerah dalam Pelayanan Publik

Rendahnya kualitas pelayanan public merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perbaikan pelayanan public di era-reformasi merupakan harapan seluruh masyarakat, namun dalam perjalanannya, ternyata tidak mengalami perubahan yang signifikan (Newman & Clarke, 2009; Radnor & Osborne, 2013). Berbagai tanggapan masyarakat justru cenderung menunjukkan bahwa berbagai jenis pelayanan public mengalami kemunduran yang sebagian di tandai dengan banyaknya penyimpangan dalam layanan public tersebut. Sistem dan prosedur pelayanan yang berbelit-belit dan sumber daya manusia yang lamban dalam memberikana pelayanan juga merupakan aspek layanan public yang banyak disoroti. Dalam bidang pelayanan public, upaya-upaya

telah dilakukan dengan menetapkan standar pelayanan public untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, murah dan transparan. Namun upaya tersebut belum banyak dinikmati masyarakat. Hal tersebut terkait dengan pelaksanaan system dan prosedur pelayanan yang kurang efektif, berbelit-belit, lamban, tidak merespon kepentingan pelanggan, dan lain-lain adalah sederetan atribut negative yang ditimpakan kepada birokrasi.

Bahkan untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelayanan public, pemerintah telah menetapkan terbentuknya Komisi Pelayanan Publik (KPP) yang independen dan berada di tingkat pusat dan daerah. Akan tetapi, kenyataannya komisi ini tidak digunakan masyarakat dan malah terpuruk dengan masalahnya sendiri, terutama para komisionernya yang sibuk mengurus tidak turunya gaji mereka. Pelayanan public seringkali menjadi ukuran paling mudah dipahami sejauh mana kinerja pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Pelayanan public adalah salah satu fungsi penting pemerintah selain regulasi, proteksi dan distribusi. Pelayanan public merupakan proses sekaligus output yang menunjukkan bagaimana fungsi pemerintah dijalankan. Ketidakpuasan terhadap kinerja pelayanan public dapat dilihat dari keengganan masyarakat berhubungan dengan birokrasi pemerintah atau dengan kata lain adanya kesan keinginan sejauh mungkin untuk menghindari dan bersentuhan dengan birokrasi pemerintah apabila menghadapi urusan.

Fenomena "*high cost*" ketika berhubungan dengan birokrasi pemerintah menjadi suatu keniscayaan yang terpaksa diterima. Kondisi-kondisi seperti ini sebagian besar ditemui pada keseluruhan level organisasi public yang memberikan pelayanan. Kondisi ini menandakan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan terhadap public dinilai masih jauh dari optimal. Pemahaman terhadap fakta lemahnya birokrasi dilihat sejauhmana kemampuan

mengaktualisasikan fungsi-fungsi pemerintah, yang berujung pada sejauh mana pelayanan public dapat dijalankan. Artinya, sejauhmana pemerintah mampu dan dapat berperilaku transparan, akuntabel, dan demokratis akan berdampak pada sejauh mana pelayanan public yang akan dan sudah dilakukan.

Menuju Birokrasi Berwawasan “Publik Service”

Hal yang membuat birokrasi lemah kinerja adalah mekanismenya yang sangat hirarkis. Ini terlihat dari budaya kerja bahwa setiap pekerjaan/urusan harus menunggu petunjuk, perintah, dan persetujuan dari atasan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Akibat dari kreativitas, inisiatif dan sikap kemandirian para birokrat kurang berkembang.

Perubahan struktur politik di era reformasi mengakibatkan lemahnya dukungan politik terhadap birokrasi. Perubahan struktur kepemimpinannya ternyata tidak serta merta menjadikan kinerja birokrasi menjadi baik dan bahkan cenderung sebaliknya. Sebagai contoh, aparat birokrasi yang sejak semula tidak memiliki netralitas politik kemudian menjadi semacam penghambat dari dalam terhadap kinerja birokrasi di bawah pimpinan yang baru. Peran-peran dominan dan bersifat monopoli oleh pemerintah di bidang pelayanan public, ternyata belum banyak mengalami perubahan dalam kaitannya dengan peningkatan kemampuan yang optimal dalam melakukan pelayanan. Hal ini dibuktikan dengan masih dirasakan tidak fleksibel dan kurang responsive dari organisasi pemerintah dalam menawarkan dan memberikan pelayanan kepada pelanggan. Hal tersebut terkait dengan belum banyaknya kelembagaan pemerintah yang didesain sedemikian rupa sehingga mampu merespons dinamika masyarakat informasi yang terus berkembang. Artinya, perspektif tata aturan suatu pemerintah yang kaku harus mulai dipikirkan dan dipertimbangkan perubahan kearah organisasi yang tidak berkota-kotak.

Kecenderungan orientasi birokrasi hanya kepada Negara “kepada penguasa saja” dan mengabaikan pengabdianya kepada masyarakat telah memberikan andil ketidak seimbangan peran ketiga actor baik pemerintah sendiri, masyarakat dan sector swasta. Kondisi yang tidak berimbang ini memfasilitasi munculnya pemerintah dengan perilaku kurang bisa bersaing, hal ini disebabkan pemegang monopoli tertentu pada administrasi public tidak memberikan peluang untuk merespons terhadap kritik.

Demikian juga orientasi kepada pelanggan internal yang berlebihan, member kecenderungan yang kurang sehat di mana agak sulit masyarakat memberikan kritikan. Gejala tersebut dapat dilihat dengan adanya kecenderungan pertumbuhan organisasi dengan struktur yang semakin gemuk, sebaliknya operasinal dari setiap unit organisasi tersebut semakin mengecil. Peran birokrasi memberikan pelayanan kepada masyarakat masih belum sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. Akan tetapi, menguatnya iklim demokratisasi di Indonesia saat ini berimplikasi pada semakin menguatnya tuntutan untuk memperoleh pelayanan public yang lebih baik dari birokrasi. Keadaan ini banyak dilatarbelakangi oleh kesadaran terhadap hak-hak sebagai konsumen yang telah melakukan kewajibannya dalam hal ini membayar pajak. Kesadaran terhadap hak diartikulasikan dalam bentuk tuntutan perbaikan pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah, yang diharapkan terdapat pelayanan public yang lebih cepat, murah dan lebih baik atau faster, cheaper and better.

Oleh karena itu, orientasi pelayanan birokrasi harus berubah. Dari orientasi pelayanan kepada penguasa, menjadi orientasi pelayanan kepada public. Aktivitas pelayanan yang berorientasi kepada pelanggan, yang sesungguhnya adalah pelanggan eksternal dalam hal ini masyarakat luas. Kemampuan memberikan pelayanan yang lebih baik akan dapat dilakukan apabila pemerintah mampu

untuk menilai secara saksama, apakah sebenarnya kebutuhan para pelanggannya.

Dalam konteks pelayanan ini, upaya memberikan pelayanan yang lebih baik oleh pemerintah salah satunya dengan melakukan desentralisasi sebagaimana diamatkan dalam UU No, 32 dan No. 33 Tahun 2004. Dengan demikian, desentralisasi merupakan salah satu jawaban untuk mendekatkan dan mengefektifkan pelayanan kepada pelanggan. Asumsinya pemerintah daerah yang kemudian memiliki kewenangan, memiliki pelanggan sendiri-sendiri dengan karakteristik yang berbeda-beda. Desentralisasi yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah merupakan peluang yang menguntungkan dilihat dari perspektif upaya mengoptimalkan dan upaya membuat pelanggan lebih tepat sasaran dan berdaya guna. Prinsip dasar yang terkandung dari kedua UU tersebut adalah keinginan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih tepat, dan lebih responsive kepada masyarakat. Asumsinya adalah pemerintah daerah yang paling mengetahui masalah dan kebutuhan masyarakatnya.

Dengan demikian, sesungguhnya birokrasi Indonesia saat ini harus direformulasi, yakni kembali pada paradigma pengelolaan pelayanan kepada public. Reorientasi kepada daerah sebagai ujung tombak pelayanan public dimaksudkan untuk menghadapi tuntutan pelayanan secara menyeluruh yang tidak lagi dilakukan secara terpusat, tetapi telah dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Tambahan lagi, kecepatan teknologi informasi telah mengantarkan perubahan-perubahan yang sangat cepat. Teknologi informasi juga telah mengubah perkembangan global yang jauh berbeda dibanding sebelumnya era informatika lahir. Kejadian apapun mengenai suatu pemerintahan di belahan bumi manapun dapat disaksikan pada saat yang sama di belahan bumi lainnya. Era teknologi informasi yang semakin cepat telah memberikan suatu implikasi bahwa informasi menjadi sesuatu

yang sangat penting. Kondisi menguatnya teknologi informasi telah memberikan ruang hidup tersendiri bagi birokrasi yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Teknologi informasi telah menghantarkan kehidupan dunia yang semakin tidak ada batasnya.

Informasi yang cepat diterima akan menimbulkan pemaknaan atas informasi. Apabila suatu informasi berkenaan dengan pemerintahan dan pelaksanaan birokrasi di suatu Negara di nilai baik, maka akan memunculkan efek image yang baik terhadap pemerintahan tersebut. Kondisi seperti ini mendatangkan implikasi lebih luas terkait dengan persepsi terhadap bangsa, kualitas pemerintahan, stabilitas politik, dan aspek lainnya. Pada gilirannya, informasi yang diterima oleh warga dunia akan berimplikasi pada sejauh mana warga dunia merespons untuk menanamkan investasi, sejauh mana rasa keamanan dapat tumbuh dan sejauh mana suatu pemerintahan dipercaya oleh warga dunia. Pada perkembangan selanjutnya, tuntutan kinerja birokrasi diukur dengan indicator-indikator yang sama dengan kinerja birokrasi di tempat lain.

Tersedianya TI dalam mendukung metode dan mekanisme kerja birokrasi seperti: e-government, e-procurement, e-business, e-audit, atau tersedianya TI dalam mendukung kerangka hukum dan kebijakan misalnya cyberlaw, telecoirt, dan sebagainya merupakan bentuk-bentuk upaya menuju pada system pelayanan publik yang lebih akuntabel dan transparan.

Terkait dengan kondisi seperti ini, maka birokrasi Indonesia memiliki peluang untuk mampu mendongkrak kinerja pemerintah dengan memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang. Teknologi informasi bisa dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya menyerap informasi dari pelanggan (masyarakat) secara cepat dan murah. Pengetahuan yang tepat terhadap harapan dan kebutuhan pelanggan pada dasarnya diharapkan dapat memberikan

implikasi kemauan meningkatkan kompetensi, kemampuan untuk menggali potensi dan cara baru guna meningkatkan daya saing, atau melakukan aliansi strategis seiring dengan tuntutan perkembangan teknologi yang semakin cepat.

Birokrasi sebagai mesin dari pemerintah, pada dasarnya memproduksi barang baik dalam bentuk benda maupun jasa untuk kepentingan seluruh warga tanpa kecuali. Namun birokrasi yang monopoli memproduksi barang untuk kebutuhan dan kepentingan public, kecenderungan mengalami kesulitan pada proses produk dan layanan sampai kepada masyarakat. Apabila ketidakmerataan dan ketidakadilan ini terus-menerus, maka pelayanan yang berpihak pada golongan tertentu saja akan memunculkan potensi kecemburuan, mempertajam jurang yang kaya dan miskin dalam konteks pelayanan, dan disintegritas dalam kehidupan berbangsa.

Kecenderungan birokrasi “yang berpihak” kepada salah satu segmen pelanggan, misalnya pada golongan yang memiliki uang atau yang mampu membayar berpotensi untuk merusak citra birokrasi secara institusional dan bisa berimplikasi luas terhadap keutuhan bangsa. Selain itu akan semakin meruncingkan secara fisiologis perbedayaan orang kaya dan orang miskin. Di samping harapan birokrasi secara institusi yang netral sesuai amanah UU no. 43 Tahun 1999, relative belum dilaksanakan secara utuh. Itu dapat dilihat bagaimana oknum tertentu untuk mendapatkan suatu jabatan tertentu. Di samping itu, aparat birokrasi masih melakukan aktifitas ekonomi baik pada waktu jam kerja maupun sesudah jam kerja, yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya.

Hal lain yang perlu dicermati dalam perilaku birokrasi kita adalah netralitas terhadap pemimpin terpilih. Terdapat kecenderungan bahwa birokrasi umumnya cenderung melakukan afiliasi politik terhadap pemerintah yang berkuasa. Gejala ini berdampak negative

terhadap sportifitas pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, salah satu pertimbangan penting yaitu perlunya memperkuat netralitas birokrasi adalah untuk menjaga kemampuan melayani pelanggan internal (pemerintah) maupun eksternal (masyarakat luas) tanpa diskriminatif. Karena apabila tidak demikian maka sesungguhnya reformasi politik yang sedang dijalankan akan menemui batu sandungan ketika birokrasi belum mampu menempatkan dirinya dalam koridor netralitas. Pada saatnya lemahnya kemampuan untuk bersikap netral akan menyebabkan terjadinya stagnasi reformasi.

Lebih dari itu, pemerintah harus mengupayakan fungsi pelayanan public yang optimal. Pengelolaan pelayanan public cenderung lebih bersifat direktif yang hanya memperhatikan/mengutamakan kepentingan pimpinan/organisasinya saja, harus diubah. Pelayanan public harus dikelola dengan paradigma yang bersifat supportif dimana lebih memfokuskan diri kepada kepentingan masyarakatnya, pengelolaan pelayanan harus mampu bersikap menjadi pelayan yang sadar buntut melayani dan bukan dilayani.

Dalam konteks desentralisasi, pelayanan public seharusnya menjadi lebih responsive terhadap kepentingan public, dimana paradigma pelayanan public beralih dari pelayanan yang sifatnya sentralistik ke pelayanan yang lebih memberikan focus pada pengelolaan yang berorientasi kepuasan pelanggan.

Untuk menuju pada terwujudnya birokrasi yang berwawasan atau berorientasi pada pelayanan public, beberapa criteria Kepala Daerah Pemerintah Sulawesi Selatan harus dipenuhi seperti berikut. Lebih memfokuskan diri pada fungsi pengaturan melalui berbagai kebijakan yang memfasilitasi berkembangnya kondisi kondusif bagi kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

1. Lebih memfokuskan diri pada pemberdayaan masyarakat sehingga

masyarakat mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap fasilitas-fasilitas pelayanan yang telah dibangun bersama.

2. Menerapkan system kompetisi dalam hal penyediaan pelayanan public tertentu sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang berkualitas.
3. Terfokus pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang berorientasi pada hasil (outcome) sesuai dengan masukan yang digunakan.
4. Lebih mengutamakan apa yang diinginkan oleh masyarakat.
5. Pada hal tertentu pemerintah juga berperan untuk memperoleh pendapat dari masyarakat dari pelayanan yang dilaksanakan.
6. Lebih mengutamakan antisipasi terhadap permasalahan pelayanan
7. Lebih mengutamakan desentralisasi dalam pelaksanaan pelayanan.
8. Menerapkan system pasar dalam memberikan pelayanan.

Selain itu, pelayanan public juga harus (1) memiliki dasar hukum yang jelas dalam penyelenggaraannya, (2) memiliki stakeholder yang luas, (3) memiliki tujuan social, (4) dituntut untuk akuntabel kepada public, dan (5) memiliki indicator performance.

KESIMPULAN

Dorongan kebutuhan untuk perubahan dalam rangka merespon dinamika lingkungan local dan global yang semakin kompleks dan penuh persainagn memerlukan upaya serius yang harus dilakuakn oleh birokrasi di tanah air. Permasalahan berkaitan dengan kondisi dan mentalitas aparatur birokrasi, yang menjadi ujung tombak pelayanan public, sekaligus indicator keberhasilan pelayanan harus ditingkatkan mutu kualitas pemahamannya akan tugas, mentalitas melayani bukan dilayani, dan jujur dalam melaksanakan ugas menjadi ktusial untuk ditangani.

Keberhasilan pelaksanaan fungsi-fungsi Kepala Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan sangat ditentukan seberapa kompeten SDM aparatur dalam memegang jabatannya. Implikasinya diperlukan suatu upaya untuk menjamin agar terjadi proses pembelajaran yang berkesinambungan dan peningkatan diri terus menerus dan upaya terencana untuk mengidentifikasi kesenjangan kinerja dan merespon dengan solusi yang tepat dan efektif.

Suatu tatanan dimana kentalnya semangat nepotisme sering kali memberikan kondisi dimana praktik ketidakpercayaan terhadap keberadaan individu lainnya. Sejalan dengan hal itu, ndi dlam masyarakat itu sendiri telah terjadi kekentalan semangat etnisisme dan melemahnya kepercayaan (trust) di antara anggota masyarakat itu sendiri. Dalam batas-batas tertentu apabila modal social kian melemah, sebuah bangsa berada pada titik nadir kebangkrutan. Banyak kasus dimana korupsi yang menggurita menyebabkan chaos, sebuah pintu darurat akibat ketidakpuasan dan mengakibatkan bergantinya regime melalui proses kekerasan. Dalam perspektif lain, GONE theory yang dikemukakan oleh Jack Bologne menjelaskan bahwa factor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan meliputi greeds (keserakahan), oportunitities (kesempatan), needs (kebutuhan), dan exposures (pengungkapan).

Selain itu, kesadsaran terhadap implementasi fungsi-fungsi penting pemerintah pada dasarnya mengerucut pada pelayanan public yang optimal. Artinya, harus diupayakan dengan sungguh-sungguh agar birokrasi memiliki kompetensi orientasi pelanggan internal dan eksterna yang jelas dan berimbang. Dengan demikian, tidak dikenal lagi birokrasi yang melayani dirinya sendiri atau hanya melayani perintah, biorkrasi yang tidak memiliki ukuran dasar (bottom line) untuk dinilai kinerjanya, dan tidak dikenal lagi birokrasi yang mewujud sebagai agen yang

berpotensi memunculkan polarisasi karena perbedaan pemberian pelayanan terhadap kelompok masyarakat berpunya (the have) dengan kelompok masyarakat yang kurang beruntung (the have not).

Pelaksanaan desentralisasi yang pada ujungnya adalah pemeratakan kesejahteraan dan keadilan serta semakin mendekatkan pelayanan masyarakat dengan upaya desentralisasi melalui otonomi harus tetap menjaga kesatuan dalam bingkai NKRI yang mewujud pada otonomi masyarakat dan bukan pada otonomi wilayah. Artinya, harus diupayakan dengan sungguh-sungguh pemerintah daerah yang mampu menjalin sinergi dengan pemerintah daerah lainnya, dan juga pemerintah pusat untuk mengupayakan orientasi pelayanan yang tepat terhadap masyarakat. Dengan demikian, tidak di kenal lagi birokrasi pemerintah daerah yang menjalankan fungsi-fungsi dengan hanya bersandar pada sentiment kedaeraha yang berujung pada egoisme daerah dan menjebak birokrasi untuk hanya melayani kepentingan pemerintah daerah, tetapi melupakan substansi dan esensi fungsi pemerintah yang melayani masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdou, A. M. (2021). Good governance and COVID-19: The digital bureaucracy to response the pandemic (Singapore as a model). *Journal of Public Affairs*, e2656.

Asmara, A. Y., & Rahayu, A. Y. S. (2020). Innovation in Delivering Public Health Service: Practice In Banyuwangi Regency-Indonesia. *Asmara, A. Y*, 12–21.

Crozier, M., & Friedberg, E. (2017). *The bureaucratic phenomenon*. Routledge.

Faisal, M., & Nain, U. (2018). Implikasi Program Dana Desa terhadap Kohesi Sosial di Desa Tamalate Kabupaten Takalar. *Sosiohumaniora*, 20(3), 222–230.

Gallouj, F., & Zanfei, A. (2013). Innovation in public services: Filling a gap in

the literature. *Structural change and economic dynamics*, 27, 89–97.

- Herawaty, H. (2017). Good Governance and Strengthening the Management of Civil Servant Towards to World Class Bureaucracy. *Papua Law Journal*, 2(1), 40–51.
- Kelly, B. D., O’Callaghan, E., Waddington, J. L., Feeney, L., Browne, S., Scully, P. J., Clarke, M., Quinn, J. F., McTigue, O., & Morgan, M. G. (2010). Schizophrenia and the city: A review of literature and prospective study of psychosis and urbanicity in Ireland. *Schizophrenia research*, 116(1), 75–89.
- Kwaku Ohemeng, F. L., & Adusah-Karikari, A. (2015). Breaking through the glass ceiling: Strategies to enhance the advancement of women in Ghana’s public service. *Journal of Asian and African Studies*, 50(3), 359–379.
- Ma, L. (2012). *Public service performance and political elite career advancement: Evidence from China*. Liang Ma.
- Maulana, R. Y., Bafadhal, F., & Firmansyah, A. (2019). E-Government Implementation: The Concept of Innovative Transformation of Leadership and Public Officials’ Capacities in Indonesian Open Government (The Case of Evaluating E-Government Utilization in Government Information Management in Jambi Province). *Available at SSRN 3497307*.
- Migiro, S. O., & Magangi, B. A. (2011). Mixed methods: A review of literature and the future of the new research paradigm. *African journal of business management*, 5(10), 3757–3764.
- Mondal, M. A. H., Kamp, L. M., & Pachova, N. I. (2010). Drivers, barriers, and strategies for implementation of renewable energy technologies in rural areas in Bangladesh—An innovation

- system analysis. *Energy policy*, 38(8), 4626–4634.
- Nain, U. (2012). *Perangkat Desa dan Peningkatan Sekdes Menjadi PNS*.
- Nain, U. (2015). *Posyandu: upaya kesehatan berbasis masyarakat*. Pustaka Pelajar.
- Nain, U. (2017). *Relasi Pemerintah Desa dan Supradesa Dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa*. Pustaka Pelajar.
- Nain, U. (2019). Analysis of the Strength of Development Agencies in Village Development Planning. *Pinisi Business Administration Review*, 1(1), 69–76.
- Nain, U. (2001). *Pelaksanaan program Posyandu dan perilaku sehat ibu dan anak di desa Sidimulyo Godean Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta*. Universitas Gadjah Mada.
- O'Donnell, G. (2018). Tensions in the bureaucratic-authoritarian state and the question of democracy. In *Promise of Development* (hal. 276–299). Routledge.
- Patel, S. S., Molnar, M. Z., Tayek, J. A., Ix, J. H., Noori, N., Benner, D., Heymsfield, S., Kopple, J. D., Kovesdy, C. P., & Kalantar-Zadeh, K. (2013). Serum creatinine as a marker of muscle mass in chronic kidney disease: results of a cross-sectional study and review of literature. *Journal of cachexia, sarcopenia and muscle*, 4(1), 19–29.
- Provan, D. J., Dekker, S. W. A., & Rae, A. J. (2017). Bureaucracy, influence and beliefs: A literature review of the factors shaping the role of a safety professional. *Safety Science*, 98, 98–112.
- <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ssci.2017.06.006>
- Ramani, S. V, SadreGhazi, S., & Duysters, G. (2012). On the diffusion of toilets as bottom of the pyramid innovation: Lessons from sanitation entrepreneurs. *Technological Forecasting and Social Change*, 79(4), 676–687.
- Syam, H., Akib, H., Patonangi, A. A., & Guntur, M. (2018). Principal Entrepreneurship Competence Based on Creativity and Innovation in the Context of Learning Organizations in Indonesia. *Journal of Entrepreneurship Education*, 21(3), 1–13.
- Wahyurudhanto, A. (2020). Critical Reorientation of Bureaucratic Reform and Good Governance in Public Sector Administration in Indonesia. *Webology*, 17(2), 308–316.
- Wollmann, H., Baldersheim, H., Citroni, G., McEldowney, J., & Marcou, G. (2010). From Public Service to Commodity: The Demunicipalization (or Remunicipalization) of Energy Provision in Germany, Italy, France, the UK and Norway. In *The Provision of Public Services in Europe*. Edward Elgar Publishing.
- Zhu, X. (2014). Mandate versus championship: Vertical government intervention and diffusion of innovation in public services in authoritarian China. *Public Management Review*, 16(1), 117–139.

**PERAN KEPEMIMPINAN DALAM BIROKRASI PEMERINTAHAN
DI INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
KAMPUS SULAWESI SELATAN**

*THE ROLE OF LEADERSHIP IN GOVERNMENT BUREAUCRACY AT THE
INSTITUTE OF DOMESTIC GOVERNMENT CAMPUS
IN SOUTH SULAWESI*

Arnas

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip Unismuh Makassar
E-mail: arnas.peace@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepemimpinan dalam birokrasi pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum sebagai macam data yang dikumpul dari lapangan secara objektif dengan tipe fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara terhadap sejumlah informan. Analisis data dengan menggunakan model analisa interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepemimpinan dalam birokrasi pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal Berdasarkan indikator efektivitas yang dikemukakan oleh Stodgil (dalam Sugiyono 2006:58) ada 7 peran pemimpin yaitu *Integration, Communication, Roduct emphasis, Fronternization, Organization, Evaluation*, dan *Initation* belum dijalankan dengan baik. Faktor Penghambat Peran kepemimpinan yaitu Faktor Jabatan yang adanya indikasi pemegang jabatan dan faktor situasi dan kondisi, Direktur harus bisa memiliki fleksibilitas yang tinggi terhadap situasi dan kondisi kepada pegawai.

Kata Kunci: Peran, Kepemimpinan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ABSTRACT

This study aims to determine the role of leadership in the government bureaucracy at the Institute of Domestic Administration, South Sulawesi Campus. The type of research used is qualitative, which is a form of research that aims to provide an overview as the kind of data collected objectively from the field with the phenomenological type. Data collection techniques used were observation, interviews with a number of informants. Data analysis using an interactive analysis model. The results showed that the role of leadership in the government bureaucracy at the Institute of Internal Administration, South Sulawesi Campus has not been fully implemented optimally. Organization, Evaluation, and Initation have not been implemented well. Inhibiting Factors The role of leadership, namely the Position Factor, which indicates the incumbent and the situation and condition factors, the Director must be able to have high flexibility in the situation and conditions for employees.

Keywords: Role, Leadership, Institute of Domestic Government

PENDAHULUAN

Kepemimpinan organisasi dalam birokrasi pemerintahan dapat didefinisikan sebagai suatu proses mempengaruhi para pegawai/aparatur untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan mengarahkan organisasi agar

lebih kompak dan kondusif, dengan menerapkan konsep, nilai, etika, karakter, pengetahuan dan keterampilan. Berdasarkan pengertian ini, pimpinan belum dapat disebut pemimpin. Pemimpin dapat mempengaruhi para pegawai untuk mencapai tujuan, sementara pimpinan

hanya mampu memberikan perintah. Dalam hubungannya dengan peran kepemimpinan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan sesuai keadaannya, masih kurang peran kepemimpinan yang diharapkan dari seorang pimpinan dengan indikasi bahwa atasan hanya menggunakan kewenangan untuk menyelesaikan tugas dan tujuan tertentu tanpa memperhatikan integrasi pegawai yang menimbulkan konflik horizontal dalam organisasi yang berdampak pada program kerja yang akan dicapai. Seharusnya seseorang pimpinan mampu merealisasikan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi jabatannya sesuai visi dan misi organisasi birokrasi di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan, tetapi kenyataannya hanya menjalankan tugas dan fungsi sebatas sebagai pimpinan institusi dan lebih mengutamakan gaya kepemimpinan tersendiri yang bersifat instruktif. Jika melihat perkembangan berbagai teori manajemen kepemimpinan yang ada, maka timbul suatu kesadaran bahwa perkembangan teori kepemimpinan telah berkembang sedemikian pesat sejalan dengan perkembangan kehidupan yang ada, tidak menutup kemungkinan setiap pimpinan dalam memberikan perhatian untuk membina, menggerakkan dan mengelola semua sumber daya yang ada dalam organisasi memiliki pola yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan itu disebabkan oleh gaya kepemimpinan, kemampuan manajerial dan sikap profesional yang dimiliki.

Hasibuan (2014:170), kepemimpinan (*leadership*) yang ditetapkan oleh seorang manajer dalam organisasi dapat menciptakan integrasi yang serasi dan mendorong gairah kerja karyawan untuk mencapai sasaran yang maksimal. Kepemimpinan adalah kata benda dari pemimpin (*leader*). Pemimpin (*Leader*) adalah seseorang yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya, mengarahkan bawahan untuk mengerjakan sebagian pekerjaannya dalam mencapai tujuan organisasi. Menurut

Robbins (dalam Mustafa dan Maryadi, 2018) kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan. Kristiawan, dkk. (2019) kepemimpinan adalah segala tindakan yang dilakukan seseorang baik individu maupun kelompok untuk melakukan koordinasi dan melakukan pengarahan kepada individu atau kelompok lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Wiles (2017) kepemimpinan merupakan segenap bentuk bantuan yang dapat diberikan oleh seseorang bagi penetapan dan pencapaian kelompok. Selain itu Canon (2017) mengatakan kepemimpinan adalah kemampuan atasan mempengaruhi perilaku bawahan maupun perilaku kelompok dalam organisasi. Menurut S. P. Siagian (dalam Erika, dkk, 2020) pengertian kepemimpinan adalah kemampuan dan keterampilan seseorang ketika menjabat sebagai pimpinan dalam suatu organisasi untuk mempengaruhi perilaku orang lain, khususnya bawahannya agar berfikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga dapat memberikan sumbangan nyata dalam pencapaian tujuan organisasi. Davis dan Newstrom (dalam Pasolong 2010), gaya kepemimpinan, pada dasarnya mengandung pengertian sebagai suatu perwujudan tingkah laku seorang pemimpin, yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin. Perwujudan tersebut biasanya membentuk suatu pola atau bentuk tertentu. Pengertian gaya kepemimpinan yang demikian ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Keduanya menyatakan bahwa pola tindakan pemimpin secara keseluruhan seperti yang dipersepsikan atau dipicu oleh bawahan tersebut dikenal sebagai gaya kepemimpinan. Rivai (2007:149), peran kepemimpinan dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pemimpin di dalam organisasi mempunyai peran, setiap pekerjaan membawa serta harapan bagaimana penanggung peran yang seiring pekerjaan tersebut juga mengandung arti bahwa harapan mengenai

peran penting dalam mengatur perilaku bawahan. Selanjutnya peran kepemimpinan dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seorang sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin diinginkan yang berjalan dengan perilaku. Fakta bahwa organisasi mengidentifikasi pekerjaan yang harus dilakukan dan perilaku peran yang diinginkan yang berjalan dengan seiring pekerjaan tersebut, juga mengandung arti bahwa harapan mengenai peran penting dalam mengatur perilaku bawahan. Menurut pendapat Stodgil (dalam Sugiyono 2006:58), ada beberapa perana kepemimpinan yaitu : *Integration*, yaitu tindakan-tindakan yang mengarah pada peningkatan koordinasi.; *Communication*, yaitu tindakan-tindakan yang mengarah pada meningkatnya saling pengertian dan penyebaran informasi; *Reduct emphasis*, yaitu tindakan-tindakan yang berorientasi pada volume pekerjaan yang dilakukan; *Fronternization*, yaitu tindakan-tindakan yang menjadikan pemimpin menjadi bagian dari kelompok; *Organization*, yaitu tindakan-tindakan yang mengarah pada perbedaan dan penyesuaian daripada tugas-tugas; *Evaluation*, yaitu tindakan-tindakan yang berkenaan dengan pendistribusian ganjaran-ganjaran atau hukuman-hukuman; *Initiation*, yaitu tindakan yang menghasilkan perubahan-perubahan pada kegiatan organisasi; *Domination*, yaitu tindakan-tindakan yang menolak pemikiran-pemikiran seseorang atau anggota kelompoknya.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepemimpinan, Menurut Komang A. dan Ni Wayang M.(2008:106-107), ada beberapa faktor tertentu yang dapat mempengaruhi proses kepemimpinan dalam suatu organisasi, yaitu : Faktor kemampuan personal atau Karakteristik pribadi pemimpin, Faktor kemampuan personal adalah kombinasi antara potensi sejak pemimpin dilahirkan ke dunia sebagai manusia dan faktor pendidikan yang ia dapatkan. Dengan demikian antara potensi bawaan dan perlakuan edukatif adalah dua hal yang tidak dapat terpisahkan.

Umumnya pemimpin akan mempunyai taraf intelegensi yang lebih tinggi dari pada yang dipimpin. Selain itu ada karakteristik lain seperti kecerdasan dan motivasi; Faktor Jabatan atau kelompok yang dipimpin, Pengertian Jabatan adalah struktur kekuasaan yang dimiliki dalam organisasi. Dalam hal ini digunakan sebagai alat untuk menginterpretasi tujuan yang harus dicapai olehnya; Faktor Situasi dan kondisi, Pengertian situasi adalah kondisi yang melingkupi perilaku kepemimpinan. Setiap pemimpin akan berfungsi pada situasi, yang berupa situasi manusia, fisik, dan waktu. Tiap-tiap perubahan situasi membutuhkan perubahan seperti kemampuan memimpin. Dengan pengertian bahwa setiap situasi adalah unik, maka untuk tiap situasi dibutuhkan pemimpin yang spesifik dan fleksibel dalam menghadapi situasi yang tidak menentu. Menurut Davis, faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan ada empat faktor yang mempengaruhi kepemimpinan dalam organisasi, yaitu : Kecerdasan : seseorang pemimpin harus mempunyai kecerdasan yang melebihi para anggotanya. Kematangan dan keuasan social (*Social manutory and breadth*) yang artinya seseorang pemimpin biasanya memiliki emosi yang stabi, matang, memiliki aktivitas dan pandangan yang cukup matang; Motivasi dalam dan dorongan prestasi (*Inner motivasi and achievement drives*) yang berarti dalam diri seseorang pemimpin harus mempunyai motivasi dan dorongan untuk mencapai suatu tujuan; Hubungan manusiawi : pemimpin harus biasa mengenai dan menghargai para anggotanya. Menurut Greece, didalam suatu organisasi, hubungan antara bawahan dengan pimpinan bersifat saing mempengaruhi. Ferrel H. (dalam Thoha, 2001 : 65), bahwa birokrasi adalah suatu organisasi birokrasi disusun sebagai satu herarki otoritas yang begitu terperinci untuk mengatasi pembagian kerja secara terperinci. Dalam Wikipedia, Birokrasi berasal dari kata *bureaucracy* (bahasa inggris *bureau+cracy*), diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai

komando dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak orang berada ditingkat bawah daripada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya sipil maupun militer.

Menurut Weber (1987 : 23) Birokrasi adalah sistem administrasi rutin yang dilakukan dengan keseragaman, diselenggarakan dengan cara-cara tertentu, didasarkan atas aturan tertulis, oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe fenomenologi. Untuk kebutuhan pengumpulan data, peneliti melakukan pengumpulan data primer yaitu data empiris yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah Direktur, Wakil Direktur Bagian Administrasi Umum, Wakil Direktur Bagian Administrasi Akademik dan Kerjasama, Wakil Direktur Bagian Administrasi Keprajaan, Kepala Bagian Administrasi Umum, dan Civitas Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan

Data sekunder yang terdapat di dalam penelitian ini yaitu data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai laporan-laporan atau bahkan dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis yang digunakan dalam penelitian terkait . Peran kepemimpinan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan. Di dalam pengumpulan data yang digunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dan dalam menganalisis data digunakan reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk pengabsahan data digunakan tiga triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi waktu dan triangulasi teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Letak geografis Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri Sulawesi Selatan berada di Kabupaten Gowa. Tepatnya di Kecamatan Pallangga, Desa Kampili, dengan jarak kurang lebih 15 km dari kota Makassar dan membutuhkan jarak tempuh sekitar 1 jam. Letaknya yang memang agak sedikit membatasi ruang gerak dan akses ke tempat-tempat strategis seperti pusat bisnis, pertokoan dan bandara. Hal tersebut mempunyai pertimbangan lain mengapa sampai Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri Sulawesi Selatan ditempatkan di desa kampili yaitu agar praja dapat melaksanakan proses pendidikan secara maksimal mengingat bahwa dalam keseharian selama 24 jam sehari wajib berada di Kampus. Sejarah Singkat Institut Pemerintahan Dalam Negeri kampus Sulawesi Selatan, Dasar hukum pembentukan Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagai lembaga pendidikan kepomongprajaan adalah Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan. Isi perubahan di dalam Peraturan Presiden tersebut difokuskan pada penataan sistem pendidikan tinggi kepomongprajaan, meliputi jenis pendidikan, pola pendidikan, kurikulum, organisasi penyelenggara pendidikan, tenaga kependidikan dan peserta didik. Pendidikan tinggi kepomongprajaan selain diselenggarakan di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri Pusat di Jatinangor, serta Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri Cilandak di Jakarta, juga diselenggarakan di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri Daerah

yang menyelenggarakan program studi tertentu sebagai satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan. Pemikiran yang mendasar dan menyeluruh atas pengalaman panjang penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dari masa ke masa, telah melahirkan falsafah pendidikan pemerintahan yang memberikan gambaran jelas tentang karakter pemimpin pemerintahan yang memiliki sikap, mental dan perilaku sebagai seorang pamong yang bertakwa, adil dan bijak. Hal ini merupakan landasan dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang dalam perkembangan selanjutnya pemimpin pemerintahan diposisikan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri di daerah sejak Tahun 2009 telah melaksanakan operasional pendidikan dengan kapasitas 299 Praja setiap kampus dengan penetapan Jurusan/Program Studi yaitu Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan di Kabupaten Gowa menyelenggarakan Program Studi Pemberdayaan Masyarakat. Mulai tahun 2010 kebijakan Pendidikan Kepamongprajaan dikonsentrasikan pada Program Diploma IV (D-IV) pada semester I, II, III, IV, V dan VI setelah masuk semester VII dan VIII dilaksanakan penjurusan dan pengalihan ke Program Strata Satu (S-1). Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Sulawesi Selatan yang diresmikan pada tanggal 8 April 2013 yang beralamat di Desa Kampili, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri Sulawesi Selatan sebenarnya sudah ada sejak tahun 2009 namun pada saat itu masih menggunakan Wisma Latobang dan Wisma milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan karena kampus di Kabupaten Gowa masih dalam proses pembangunan. Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri Sulawesi Selatan dipimpin oleh seorang Direktur dengan tingkat jabatan setara dengan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II). Selain itu Kampus Institut

Pemerintahan Dalam Negeri di Sulawesi Selatan mempunyai civitas akademika yang terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional, staf dan tenaga kontrak. Semangat pembentukan Kampus Institut Pemerintahan di Daerah adalah salah satu upaya Kementerian Dalam Negeri untuk mewujudkan terciptanya kader pamong praja yang siap ditempatkan diseluruh wilayah Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Adapun pola penempatan praja adalah Kumpul Sebar Kumpul (KSK) yaitu pada saat dilakukan seleksi dan penerimaan praja di tahun ajaran baru maka semua praja melaksanakan pendidikan di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor. Pada proses memasuki semester II para Praja masing-masing disebar ke Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Daerah sesuai dengan jurusan yang telah ditetapkan. Visi Misi Institut Pemerintahan Dalam Negeri kampus Sulawesi Selatan, Visi Institut Pemerintahan Dalam Negeri adalah sebagai berikut: “Menjadi lembaga pendidikan tinggi kepamongprajaan yang terpercaya dalam mengemban tugas pengembangan ilmu, pembentukan perilaku kepamongan dan penyedia kader pemerintahan yang terampil”. Sedangkan Visi Fakultas Politik Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri: “Pusat unggulan pembentukan kader pemerintahan yang berwawasan akademik, berjiwa kepamongprajaan dan terampil dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang kebijakan pemerintahan, politik pemerintahan, serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat”. Mengacu pada Visi Institut Pemerintahan Dalam Negeri secara umum, berikut Visi Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri Sulawesi Selatan: “Terdepan dalam membentuk praja yang berkarakter dan berjiwa kepamongprajaan, berwawasan akademik, didukung pelayanan prima yang berorientasi pada pembangunan pemberdayaan masyarakat”. Sedangkan Misi Pemerintahan Dalam Negeri Sulawesi Selatan

yang ditetapkan sebagai berikut: Mensinergikan kekuatan civitas akademika; Mengembangkan dan menyelenggarakan kurikulum berbasis pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan (Jar-Lat-Suh); Membangun jaringan kerjasama dengan berbagai kalangan yang mampu mendukung pengembangan kurikulum dan implementasinya; Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat).

Integration

Secara hierarki organisasi, posisi top manajemen adalah orang-orang yang memegang peranan besar dalam integrasi didalam organisasi. Karena secara formal telah mendapatkan legitimasi yang menghasilkan kewenangan dan otoritas tertentu. Dalam peran ini Direktur Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan sebagai top manajemen menjalankan peran yang dilakukan mengarah pada tindakan upaya koordinasi antara pimpinan dengan bawahan sesuai struktur organisasi di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan. *integration* bahwa dalam menjalankan peran *integration* yang diukur berdasarkan peningkatan koordinasi dapat dikatakan cukup baik. Terbukti Direktur Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan dengan upaya memanfaatkan kemajuan teknologi elektronik melalui media untuk memudahkan saling koordinasi dengan para pegawai yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya dilingkup Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan pada kondisi Pandemi dimasa sekarang. Peningkatan koordinasi yang dilakukan melalui kegiatan rapat pimpinan dan civitas akademik dalam kedisiplinan dan pembahasan program – program kegiatan secara bersama terkait usulan dan masukan dalam penyatupaduan seluruh kegiatan agar terdapat keselarasan dan

keserasian dalam mencapai tujuan organisasi di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan.

Communication

Komunikasi merupakan sarana yang penting dalam sebuah organisasi dalam pemberian informasi. Dalam hal ini peran pimpinan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan sebagai komunikator bagaimana bentuk interaksi yang diberikan dalam pengarahannya maupun penyebaran informasi kepada para pegawai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan. *Communication* bahwa dalam pemberian informasi dapat dikatakan cukup baik akan tetapi masih perlu komunikasi secara komprehensif dalam rapat pegawai terkait program yang akan dilaksanakan agar tidak terjadi perbedaan pendapat kepada para pegawai dalam pengarahannya dan pemberian informasi yang jelas untuk apa dan siapa yang akan mengerjakan tugas pokok serta fungsinya yang berkaitan dengan kegiatan organisasi. Dalam menjalankan peran *communication* Direktur Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan dalam pemberian informasi untuk diketahui seluruh para pegawai dilakukan melalui surat edaran berkaitan dengan kegiatan dinas di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan, sehingga masih muncul pertanyaan simpangsiur antara pegawai. Komunikasi yang diterapkan direktur selalu memanfaatkan Perkembangan *Digital Mobile*, segala informasi serta arahan dilakukan dalam group media sosial masing-masing kegiatan guna terpantaunya kegiatan tersebut dengan sukses, tetapi masih perlu arahan langsung yang komprehensif ketika kegiatan terlaksana.

Roduct Emphasis

Tindakan-tindakan penekanan yang dilakukan Pimpinan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan berorientasi pada volume pekerjaan yang diberikan kepada Pegawai/bawahan sesuai job description dengan menghasilkan kinerja sesuai dengan sasaran tujuan organisasi di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan. *Roduct emphasis* bahwa dalam menjalankan peran *Roduct Emphasis* yang diukur berdasarkan pembagian pekerjaan dikatakan cukup baik. Terbukti Direktur Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan dilihat dari unsur kuantitas, porsi pekerjaan yang diberikan sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya kepada para pegawai. Semua penyelenggaraan tugas telah diatur secara rinci, jelas, dan tegas di dalam uraian tugas berdasarkan struktur organisasi di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan. Dengan demikian, deskripsi pekerjaan masing-masing para pegawai telah jelas, pada Bagian/Subbag mengenai pembagian tugas sesuai dengan bidang kemampuan para pegawai. Jadi banyaknya atau kuantitas suatu pekerjaan telah disusun dalam daftar uraian tugas secara terorganisir di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan. Unsur kualitas yang dihasilkan sudah sesuai standar ketentuan yang dipersyaratkan oleh pimpinan untuk mengerjakan tugas pokok dan fungsinya di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan. Upaya peningkatan kualitas kinerja pegawai telah dilakukan melalui penyelenggaraan diklat-diklat, kondisi kerja yang mencakup adanya fasilitas, promosi pegawai serta system rekrutmen pegawai baik itu dalam jenjang struktural, fungsional ataupun teknis di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan.

Fronternization

Tindakan-tindakan yang menjadikan pemimpin Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan menjadi bagian dari kelompok organisasi dan mewujudkan visi dan misi di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan. *Fronternization* bahwa Direktur Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan dalam menjalankan peran *Fronternization* yang diukur berdasarkan bagian dari kelompok organisasi sudah sangat baik. Terbukti Direktur Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan – kegiatan yang bersifat legal dan social seperti upacara bertindak sebagai pembinan upacara bersama para Pegawai dan para Praja. Dalam aktifitas menghadiri undangan kegiatan yang dilaksanakan di luar lembaga sehingga lembaga luar mengakui akan budaya organisasi di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan sebagai pusat sekolah kedinasan hingga menjadi acuan oleh lembaga lainnya.

Organization

Sebagai pimpinan institusi dengan otoritas yang dimiliki diharapkan mampu menjalankan perannya sebagai pengarah, pengatur dan pengendali sehingga apa yang menjadi visi dan misi organisasi di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan dapat diaktualisasikan. Kemampuan pimpinan dalam hal mengelola organisasi di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan agar para pegawai mengetahui dengan jelas tugas atau pekerjaan, tanggung jawab, hak dan wewenang mereka. Tindakan-tindakan pimpinan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan yang mengarah pada perbedaan dan penyesuaian daripada tugas-tugas. *Organization* bahwa SDM, sarana dan prasarana yang diberikan kepada pegawai harus diminimalisir dengan

komunikasi yang lebih komprehensif, tidak terlepas dari pengawasan di media sosial tapi perlunya pengawasan langsung. Selama masa pandemi hanya dipantau dari media sosial sehingga banyak yang masih kurang jelas akan tugas yang diberikan, bahkan sering terjadi perbedaan pendapat ketika ada kegiatan atau program dilaksanakan. Kemudian kesimpulan secara keseluruhan informan diatas terkait indikator *organization* bahwa Direktur Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan perlu memahami banyak SDM dengan ilmu dan watak yang berbeda sehingga perlu pengawasan dan pengelolaan yang baik untuk diterapkan agar terwujudnya visi dan misi dikantor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan. SDM, sarana dan prasarana yang diberikan kepada pegawai harus diminimalisir dengan komunikasi yang lebih komprehensif, tidak terlepas dari pengawasan di media sosial tapi perlunya pengawasan langsung. Selama masa pandemi hanya dipantau dari media sosial sehingga banyak yang masih kurang jelas akan tugas yang diberikan, bahkan sering terjadi perbedaan pendapat ketika ada kegiatan atau program dilaksanakan.

Evaluation

Evaluasi yang dilakukan Pimpinan bertujuan untuk mengukur sejauh mana mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan baik berdasarkan kinerja pegawai. Dalam hal ini tindakan-tindakan yang dilakukan pimpinan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan dalam mengevaluasi kinerja pegawai yang berkenaan dengan pendistribusian ganjaran-ganjaran atau hukuman-hukuman dan pemberian reward. *evaluations* dapat dipahami bahwa dalam menjalankan peran *evaluations* yang diukur berdasarkan Laporan Kinerja Pegawai dikatakan cukup efektif. Dibuktikan Direktur Institut Pemerintahan

Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan mengevaluasi kinerja pegawai melalui system aplikasi yang terintegrasi dengan absensi pegawai digunakan untuk menilai laporan kinerja para pegawai baik Pegawai Negeri Sipil maupun Tenaga Kontrak diantaranya sasaran kerja pegawai berdasarkan tugas pokok, target kinerja setiap bulan berdasarkan sasaran kerja pegawai, laporan kinerja harian para pegawai dan laporan kehadiran para pegawai. Adapun pemberian reward kepada para pegawai jika tugas pokok dikerjakan dengan baik Direktur Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan akan mengapprove laporan kinerja pegawai sebagai hak pendapatan tunjangan kinerja pada setiap bulannya. Dampak dari laporan kinerja yang tidak dilaporkan akan mendapatkan punishment dengan pendekatan refresif yaitu pemotongan pendapatan tunjangan kinerja.

Initiation

Tindakan-tindakan yang dilakukan pimpinan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan yang menghasilkan inovasi dan perubahan-perubahan pada kegiatan Birokrasi Pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan. *initiation* bahwa dalam menjalankan peran kepemimpinan yang diukur berdasarkan *initiation* dikatakan cukup baik. Dibuktikan dengan Direktur Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan berusaha memiliki sikap inovatif, dinamis dan kreatif dalam menghadapi permasalahan yang terus berkembang. Sebagai pimpinan telah membawa perubahan secara factual yang dapat dikatakan cukup dilingkungan kerja dengan berusaha mengedepankan pembaharuan budaya kerja sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka peningkatan kinerja para pegawai di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis yang disusun terkait peran kepemimpinan dalam organisasi birokrasi di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan disimpulkan sebagai berikut: Peran kepemimpinan dalam organisasi birokrasi di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan: Peran kepemimpinan sebagai *integration* berdasarkan peningkatan koordinasi dapat dikatakan cukup baik. Terbukti Direktur Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan dengan upaya memanfaatkan kemajuan teknologi elektronik melalui media untuk memudahkan saling koordinasi dengan para pegawai yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya dilingkup Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan.

Peran kepemimpinan sebagai *communication* dalam pemberian informasi dapat dikatakan cukup baik akan tetapi masih perlu komunikasi secara komprehensif dalam rapat pegawai terkait program yang akan dilaksanakan agar tidak terjadi perbedaan pendapat kepada para pegawai dalam pengarahan dan pemberian informasi yang jelas untuk apa dan siapa yang akan mengerjakan tugas pokok serta fungsinya yang berkaitan dengan kegiatan organisasi.

Peran kepemimpinan sebagai *Product emphasis* dikatakan cukup baik. Terbukti Direktur Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan dilihat dari unsur kuantitas, porsi pekerjaan yang diberikan sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya kepada para pegawai. Semua penyelenggaraan tugas telah diatur secara rinci, jelas, dan tegas di dalam uraian tugas berdasarkan struktur organisasi di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan.

Peran kepemimpinan sebagai *fronternization* sudah sangat baik. Terbukti Direktur Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan melaksanakan

kegiatan – kegiatan yang bersifat legal dan social seperti upacara bertindak sebagai pembinan upacara bersama para Pegawai dan para Praja. Hal ini untuk meningkatkan kesadaran para Pegawai dan Praja di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan terhadap budaya organisasi Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan sebagai sekolah kedinasan dibawah Kementerian Dalam Negeri.

Peran kepemimpinan sebagai *organization* Direktur Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan Masih perlu memahami banyak SDM dengan ilmu dan watak yang berbeda sehingga perlu pengawasan dan pengelolaan yang baik untuk diterapkan agar terwujudnya visi dan misi dikantor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan.

Peran kepemimpinan sebagai *Evaluation* cukup efektif. Dibuktikan Direktur Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan mengevaluasi kinerja pegawai melalui system aplikasi yang terintegrasi dengan absensi pegawai digunakan untuk menilai laporan kinerja para pegawai baik Pegawai Negeri Sipil maupun Tenaga Kontrak diantaranya sasaran kerja pegawai berdasarkan tugas pokok, target kinerja setiap bulan berdasarkan sasaran kerja pegawai, laporan kinerja harian para pegawai dan laporan kehadiran para pegawai.

Peran kepemimpinan sebagai *initiation* dikatakan cukup baik. Dibuktikan dengan Direktur Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan berusaha memiliki sikap inovatif, dinamis dan kreatif dalam menghadapi permasalahan yang terus berkembang. Sebagai pimpinan telah membawa perubahan secara factual yang dapat dikatakan cukup dilingkungan kerja dengan berusaha mengedepankan pembaharuan budaya kerja sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka peningkatan kinerja

para pegawai di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alberto, Agung S. & Ignatius A. (2014) Peran Kepemimpinan Dalam Memotivasi Kinerja Pegawai. *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 3 No. 2.
- Daswati. (2012). Implementasi Peran Kepemimpinan dengan Gaya Kepemimpinan menuju kesuksesan Organisasi. *Jurnal Akademika Fisip Untad* Vol. 04.
- David L. (2008). Aspek Kepemimpinan dalam Birokrasi. *Journal of Business and Economics* Vol. 7 No. 1
- Gary, Y. (2010). *Kepemimpinan Dalam Organisasi*. Jakarta : PT. Indeks.
- Hasibuan, S.P. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Kristiawan M., Safitri D., & Lestari R. (2017). *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta : Deepublish.
- Kariena F. (2016). Faktor Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Purwakarta Periode Tahun 2008-2015. *Jurnal Politikom Indonesia* Vol. 1 No. 2.
- Kartono, K. (2002). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kusumawati, E. (2013) *Peranan Kepemimpinan dalam Birokrasi di Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur*. (Magister Universitas Mulawarman). Diperoleh <https://ar.mian.fisip-unmul.ac.id>
- Rivai, V. (2007) *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Edisi Kedua.
- Siagian, S.P. (2003). *Organisasi, Kepemimpinan, dan Perilaku Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suwatno. (1995). *Dasar-Dasar Organisasi Dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Thoha, M. (2001). *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

**EFEKTIVITAS BADAN PENGHUBUNG DALAM
MEMFASILITASI URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PEMBANGUNAN KEPADA PEMERINTAH PUSAT**
*THE EFFECTIVENESS OF LINKING AGENCY IN FACILITATING LOCAL
GOVERNMENT AND DEVELOPMENT AFFAIRS TO THE CENTRAL
GOVERNMENT*

¹Ruhut Novum S.R Simanullang, ²Rayhan Ahmad Adimulyo, ³Satrio Panji Wisesa,
⁴Sulistia Wardani, ⁵Muhammad Faisal

^{1,2,3,4} Nindya Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan

⁵Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan

Email Korespondensi: ruhutnov@gmail.com

ABSTRAK

Badan Penghubung Pemerintah Jawa Barat, adalah badan Daerah yang satu-satunya terletak di Ibu Kota Negara, setelah terbentuknya Badan Penghubung Pemerintah Jawa Barat sebagai fasilitator kebutuhan daerah dalam melakukan kerjasama dengan pemerintah pusat maka peneliti ingin mengetahui bagaimana efektivitas Badan Penghubung Pemerintah Jawa Barat dalam memfasilitasi urusan Pemerintah Jawa Barat ke Pemerintah Pusat dalam membantu memajukan pembangunan Daerah Jawa Barat penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, hasil penelitian menunjukkan 1) Karakteristik Organisasi Badan Penghubung Pemerintah Jawa Barat terdiri dari Kepala Badan yang dipimpin oleh Eselon III, Subbidang tata usaha, Subbidang Hubungan Antar Lembaga, Subbidang Promosi dan Informasi, dan Subbidang Keprotokolan, yang seluruhnya dipimpin oleh Eselon IV. 2) Karakteristik Lingkungan Badan Penghubung Pemerintah Jawa Barat berada dalam lingkup pemerintahan kota yang sangat dekat dengan pemerintahan pusat. 3) Karakteristik Pekerja sebagian besar pegawai berasal dari daerah Jawa Barat yang memiliki nilai adat dan budaya yang sama. 4) Kebijakan dan Praktek Manajemen dalam Renstra 2017- 2022 tertuang yang menjadi kebijakan pemerintah daerah dalam memyusun usaha- usaha untuk membangun daerah Jawa Barat berpointkan pada terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas, terwujudnya tata budaya adat istiadat dan seni ke- Jawa Baratan yang Islami, terwujudnya informasi dan data yang terintegritas.

Kata Kunci: Efektivitas, Urusan Pemerintah Daerah Dengan Pusat

ABSTRACT

Jawa Barat Government Liaison Agency, is a Regional agency which is only located in the Capital City, after the establishment of the Jawa Barat Government Liaison Agency as a facilitator of regional needs in collaborating with the central government, researchers want to know how the effectiveness of the Jawa Barat Government Liaison Agency in facilitating Jawa Barat Government affairs to The Central Government in helping to advance the development of the Jawa Barat Region, this research was conducted using a qualitative descriptive method, the results of the study showed 1)Organizational characteristics of the Jawa Barat Government Liaison Agency consistingof the Head of the Agency led by Echelon III, the Administration Sub-Sector, the Inter-Relations Sub-Sector, the Promotion and Information Sub-Sector, the Protocol Sub-secto, which are entirely led by Echelon IV. 2)Environmental

Characteristics The Jawa Barat Government Liaison Agency is within the scope of city administration which is very close to the central government. 3) Characteristics of workers, most of the employees come from the Jawa Barat region who have the same customary and cultural values. 4) Management Policies and Practices in the 2017-2022 Strategic Plan are stated as local government policies in formulating efforts to develop Jawa Barat areas which point to the realization of reforms. quality bureaucracy, the realization of an Islamic cultural system, customs and arts, the realization of integrated information and data.

Keywords: *Effectiveness, Relations between Local and Central Government*

PENDAHULUAN

Provinsi Jawa Barat berada di bagian barat Pulau Jawa. Wilayahnya berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Laut Jawa di sebelah utara, Laut Jawa dan Provinsi Jawa Tengah di sebelah timur, Samudera Hindia di sebelah selatan, serta Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta di sebelah barat yang menjadikan Provinsi Jawa Barat berdasarkan kondisi geografisnya menjadi salah satu Provinsi penunjang Ibukota Negara serta potensi alam dan segelintir potensi sumberdaya manusia yang paling menjanjikan ditandai dengan pengelolaan sumberdaya alam berdasarkan sumberdaya manusia mutakhir, namun hal itu tidak serta merta membuat Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat kemiskinan yang rendah. Karna pada kenyataannya masih banyak kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Maka dari itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk Badan Penghubung yang terletak di Ibu Kota Negara sebagai pihak yang berkoordinasi mengenai permasalahan pemerintahan daerah ke pemerintahan pusat. Badan Penghubung merupakan perangkat daerah di Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang penghubung pemerintahan, meliputi hubungan antar

lembaga, promosi dan informasi serta keprotokolan untuk Jawa Barat.

Pembentukan badan penghubung tersebut berdasar hukum pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016 tentang tentang perangkat daerah yang merupakan instruksi menteri dalam negeri, dengan tujuan untuk membuka belunggu yang menutup potensi daerah agar mendapatkan investornya, dan menjadi aliran ekonomi pendapatan daerah. Dalam PP No.18 Tahun 2016 tersebut berbunyi ”untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pembangunan dengan pemerintah pusat, daerah provinsi dapat membentuk badan penghubung daerah provinsi di Ibu Kota Negara”.

Pembentukan perangkat daerah tersebut dibentuk berdasarkan asas sebagai berikut:

1. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
2. Intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah
3. Efisiensi
4. Efektivitas
5. Pembagian habis tugas
6. Rentang kendali
7. Fleksibilitas

Pembentukan badan penghubung juga didasarkan pada luas daerah, jumlah penduduk, potensi dan sumber daya alam yang dimiliki. Secara karakteristik

tersebut Provinsi Jawa Barat memiliki luas wilayah 35.378 Km², terdiri dari 18 Kabupaten, 9 Kota, 627 kecamatan, 645 kelurahan, 5.957 desa, dengan jumlah penduduk 49,94 juta jiwa yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia yang jika dilihat secara potensi alam didominasi pada hasil alam berupa perkebunan dan pertanian dan dari sektor potensi sumber daya manusianya didominasi oleh sektor industri dan investasi. Untuk sektor perkebunan dan pertanian berada di beberapa kawasan seperti di sepanjang Pantura, Priangan Timur, Indramayu, Kawarang, dan Subang, adapun komoditas pertanian dan perkebunan utama di Jawa Barat antara lain padi, bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, kelapa sawit, teh, cengkeh, tembakau dan tebu. Industri dan investasi di provinsi Jawa Barat merupakan salah satu rancangan strategis pemerintah pusat dan merupakan pusat industri manufaktur dan perdagangan no-1 di Indonesia bahkan menjadi pusat industri terbesar se-Asia Tenggara yaitu Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang yang di dalamnya terdapat berbagai komoditas mulai dari rumah tangga hingga otomotif. Bahkan sektor industri, investasi, manufaktur, dan perdagangan merupakan penyumbang pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar di Jawa Barat dan bahkan salah satunya di Indonesia.

Dengan segala potensi yang dimiliki tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap setelah dibentuknya badan penghubung pemerintah daerah yang berpusat di ibukota negara dapat membuka pandangan pemerintah pusat dan dunia internasional untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya tersebut bersama-sama yang tentu tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah.

Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki tugas sebagai fasilitator untuk menjalankan pelayanan serta memfasilitasi hubungan kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Pusat serta Pemerintah Provinsi lainnya, memfasilitasi hubungan kerja dengan Perwakilan Negara Asing di Jakarta, memfasilitasi Hubungan Lembaga Swasta Nasional dan Internasional yang memiliki perwakilan di Jakarta, pelaksana fasilitasi kunjungan kerja Gubernur dan pejabat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pelaksana fasilitas promosi potensi, sumber daya alam dan budaya, dan koordinasi dengan instansi terkait pengelolaan keuangan Provinsi Jawa Barat. Dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Badan penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut memiliki peran dalam memfasilitasi segala urusan administrasi yang sifatnya non teknis, hanya bertugas dalam memfasilitasi segala kebutuhan Pemerintah Daerah ketika melakukan kunjungan kerja.

Oleh sebab itu bagaimana efektivitas Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memfasilitasi urusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke Pemerintah Pusat dalam membantu pembangunan di daerah, yang dijelaskan oleh Hidayat (1986: 30): "Efektivitas merupakan sejauh mana persentase input yang dilihat dari (Kualitas, Kuantitas, dan Waktu) dapat dicapai".

Pendapat tersebut didukung pula oleh Siagian (2001: 24) yang menjelaskan: "Efektivitas adalah pemanfaatan segala fasilitas baik sumber daya maupun hal-hal lain yang sebelumnya telah dipersiapkan untuk melakukan program yang direncanakan agar terwujudnya keberhasilan, dan efektivitas ditunjukkan

dengan terwujudnya keberhasilan dari sasaran tersebut”.

Untuk menguraikan efektivitas dari Badan Penghubung Pemerintah Jawa Barat, peneliti menggunakan teori efektivitas organisasi oleh Steers (2005) dalam *Efektivitas Organisasi*, yang mengolongkan faktor-faktor efektivitas Organisasi, yaitu: Karakteristik Organisasi, Karakteristik Lingkungan, Karakteristik Pekerja, Kebijakan dan praktek Manajemen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memfasilitasi hubungan urusan Pemerintah Jawa Barat ke Pemerintah Pusat guna membantu memajukan pembangunan Daerah Jawa Barat.

METODE

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian menggunakan metode kualitatif ditujukan untuk memberikan gambaran yang sebenarnya mengenai suatu variabel.

Menurut Sugiyono (2017: 7): ”Penelitian kualitatif adalah metode penelitian baru yang dinamakan dengan metode Postpositivistik. Metode ini sering digunakan sebagai metode artistik karena proses penelitiannya lebih bersifat seni dan disebut metode interpretive karena data hasil penelitian yang didapat lebih bersifat interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan”.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berada di Jakarta Pusat meliputi seluruh pegawai. Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2017: 224) pengumpulan

data dibagi menjadi tiga yaitu:” Data Primer, merupakan data langsung yang diberikan pada peneliti, data observasi, merupakan data yang didapatkan melalui kegiatan untuk mengumpulkan data yang kompleks, studi pustaka, digunakan untuk mengumpulkan data yang berasal dari jurnal maupun sumber-sumber referensi lain yang sesuai dengan subjek penelitian, dan dokumentasi, yaitu data yang diperoleh dari dokumen hasil kegiatan”. Teknik analisis data menggunakan melakukan triangulasi pada seluruh data yang ada dengan cara mereduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah, Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas Pemerintah Jawa Barat untuk mendukung kelancaran hubungan dan kerja sama, membina masyarakat Jawa Barat di Wilayah ibukota termasuk sekitarnya, menyelenggarakan promosi daerah, mengelola Anjungan Jawa Barat di Taman Mini Indonesia Indah dan aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang ada di lingkungan pemerintah pusat.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut maka Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki sejumlah tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat No.81 Tahun 2016 pada Bab II yaitu badan penghubung mempunyai tugas pokok dalam

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi bidang penghubung pemerintahan, meliputi hubungan antar lembaga, promosi, dan informasi serta keprotokolan, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Serta adapun fungsi dari Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Penghubung pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi
- b. Penyelenggaraan tugas dukungan teknis bidang perencanaan
- c. Penyelenggaraan administrasi Badan
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Badan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Berdasarkan isi dari peraturan tersebut maka dapat dipahami bahwasanya, Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat berfungsi sebagai pelaksana fasilitas hubungan kerja Pemerintah Jawa Barat dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang sifatnya bertugas dalam memfasilitasi urusan administrasi yang non teknis dalam usaha pembangunan Daerah.

Struktur Organisasi Badan Penghubung Pemerintah Jawa Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No.81 Tahun 2016 terdiri dari: Kepala Badan, Subbidang Tata Usaha, Subbidang Hubungan Antar Lembaga, Subbidang Promosi dan Informasi, dan Subbidang Keprotokolan.

Karakteristik Lingkungan Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat

Lingkungan pemerintahan Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat dikategorikan sangat baik, hal ini berdasarkan tinjauan peneliti dari data yang dikumpulkan selama pelaksanaan Praktek Lapangan (PL) III. Lokasi kantor yang berada di pusat pemerintahan (5 menit menuju gedung Kementerian Dalam Negeri, Gambir dan istana negara) memberikan suatu akses yang mudah bagi Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk merespon dengan cepat segala kebutuhan pemerintah daerah terkait lancarnya komunikasi dan kerjasama yang dilakukan dengan pemerintah pusat. Selain itu, ada peran penting yang terjalin antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat dalam pelaksanaan ketatapemerintahan yaitu salah satunya sebagai salah satu provinsi penunjang ibukota. Hal ini memberikan dampak baik bagi keduanya.

Karakteristik Pekerja Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat

Jumlah pekerja Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdiri dari 52 orang dengan rincian 24 ASN, 8 Calon ASN, dan 20 pegawai kontrak. Untuk jumlah pekerja tersebut tergolong dikategorikan cukup, mengingat tugas yang dimiliki oleh Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat terbilang situasional dan memadai dalam pelaksanaan keprotokolan serta untuk memberikan fasilitas pelayanan terhadap seluruh aparat pemerintah daerah Jawa Barat yang sedang melakukan kunjungan kerja ke daerah lingkungan pemerintah pusat (Jabodetabek), hal itu dikarenakan

kelebihan letak geografis Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta sehingga mobilisasi yang dilakukan pun tidak memakan waktu yang banyak sehingga kerap kali badan penghubung hanya menjadi tempat singgah. Sebagian besar pekerja atau pegawai yang ada adalah berasal dari daerah ASN Pemprov Jawa Barat yang dimutasikan oleh pemerintah daerah untuk menduduki posisi-posisi di Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sedangkan untuk pegawai honorer berasal dari sekitaran daerah Jabodetaek. Secara karakteristik pekerja Badan penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat sama seperti karakteristik pekerja di kantoryang basis tugasnya

adalah penyelenggaraan pelayanan kepada pemerintah dan masyarakat, yang memberikan pelayanan dan pengayoman pada masyarakat Jawa Barat sehingga tetap mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai masyarakat daerah Jawa Barat, tapi belakangan karena adanya fenomena pandemi Covid-19 menyebabkan pegawai diharuskan menyesuaikan dengan peraturan protokol kesehatan mengenai pelaksanaan tugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena kantor Badan Penghubung itu sendiri yang terletak di lingkungan Jakarta.

Kebijakan dan praktek Manajemen Penetapan Tujuan Srategis

Tabel 1 Data Target Kinerja Sasaran

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya Tata Budaya Adat Istiadat dan Kesenian sunda	Menguatkan Tata Budaya Adat Istiadat dan Kesenian serta menjaga kelestarian adat dan budaya sunda	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya sunda di Jakarta	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan
			Jumlah pengunjung pada pelaksanaan kegiatan promosi dan pameran Seni budaya sunda yang dilaksanakan Badan Penghubung Pemerintah Jawa Barat di Jabodetabek	22000 pengunjung	24000 pengunjung	26000 pengunjung	28000 pengunjung	30000 pengunjung
2	Penyajian informasi yang terintegrasi dengan website	Meningkatkan kualitas data dan informasi umum mengenai Jawa Barat melalui website	Jumlah kunjungan masyarakat pada anjungan Jawa Barat sebagai objek pameran di Taman Mini Indonesia Indah (TMII)	11000 pengunjung	12000 pengunjung	13000 pengunjung	14000 pengunjung	15000 pengunjung
			Jumlah Pengakses Data dan Informasi pada Website Badan Penghubung Pemerintah Jawa Barat	1000/hari	1200/hari	1300/hari	1400/hari	1500/hari

Sumber : badan-penghubung.jabarprov.go.id

Dalam tabel di atas, yang menjadi tujuan dan sasaran serta prioritas dari Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat terlihat berfokus kepada hal-hal yang bersifat umum dan bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat baik melalui website maupun pengenalan budaya-budaya sunda khususnya di lingkungan Jabodetabek, seharusnya tujuan dan sasaran juga mencakup strategi terbaik untuk melancarkan hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah lain.

Pencarian dan Pemanfaatan Sumber Daya

Dalam Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki sumber dana yaitu APBD dan APBN yang menjadi sumber utama pengelolaan segala urusan dan kegiatan Badan Penghubung Pemerintah Jawa Barat. Selain sumber keuangan dari APBN dan APBD sumber lain juga berasal dari sumber daya manusianya yaitu Dalam struktur organisasi Pemerintah Jawa Barat, Badan Penghubung berada pada jenjang eselonering IIIa. Satuan kerja ini terdiri dari 4 (empat) jabatan eselon IVa, yaitu: Kepala Badan, Sub Bagian Tata Usaha, Subbidang Hubungan Antar Lembaga, Subbidang Promosi dan Informasi, Subbidang Keprotokolan. Sumber daya Asset dan Modal terdiri dari : Kantor di Jl. Pembangunan II No.3-5, RT.9/RW.2 Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat 10130. Mess ini terdiri dari 3 lantai dan memiliki 12 kamar untuk penginapan dan 3 ruang pertemuan dengan segala fasilitas penunjang lainnya. Badan Penghubung Pemerintah Jawa Barat juga mengelola Anjungan Jawa Barat TMII.

Prestasi yang dimiliki Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat

Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki tugas yang banyak berkaitan dengan pengelolaan dan promosi daerah, adapun beberapa pencapaian diantaranya Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat 5 besar terbaik di antara perangkat daerah se-Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 dalam penyelenggaraan pelayanan, prestasi lainnya dilihat dari sudah

banyaknya aset daerah yang tersertifikasi, memberi bantuan rumah singgah, transportasi, dan saat ini sedang berusaha untuk mengembangkan dengan mengenalkan budaya sunda di lingkungan Jabodetabek baik melalui kurikulum di bangku sekolah maupun sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan animo masyarakat terhadap kebudayaan sunda Jawa Barat, selain itu Badan Penghubung Jawa Barat juga berperan aktif dalam usaha melancarkan hubungan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan swasta bahkan luar negeri terkait penanaman modal dan investasi untuk daerah Jawa Barat.

Proses Komunikasi Badan Penghubung Pemerintah Jawa Barat

Dalam kinerjanya untuk memfasilitasi segala urusan pemerintah Jawa Barat dengan pemerintah pusat, menurut penuturan Kasi Nilai Budaya, selama menjalin hubungan kerjasama antarpemerintah daerah Provinsi dengan Pemerintah Pusat, Badan Penghubung Pemerintah Jawa Barat menerima bentuk komunikasi yang sifatnya formal melalui kantor ataupun bersifat pribadi yang langsung berhubungan dengan aparat Badan Penghubung Pemerintah

Jawa Barat. Komunikasi yang dilakukan juga dapat melalui email resmi maupun WhatsApp yang langsung berhubungan dengan pegawai yang bersangkutan. Dalam penuturannya narasumber juga mengatakan, bahwa Badan Penghubung Pemerintah Jawa Barat sangat fleksibel, dalam membantu mempercepat proses administrasi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi ketika sedang menjalin hubungan kerjasama dengan instansi atau investor. Hal ini tentu menjadi kemudahan bagi daerah dalam mempercepat segala proses komunikasi dengan pihak luar yang diharapkan dapat menjadi mitra pemerintah daerah.

Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Setiap pimpinansatuan unit kerja dilingkungan

Badan Penghubung Pemerintah Jawa Barat wajib melaksanakan Sistem pengendalian internal. Dari Peraturan Gubernur tersebut dapat dipahami bahwa Badan Penghubung Jawa Barat dipimpin oleh Kepala Badan yang membawahi Kepala Subbagian, Kepala Subbidang yang wajib melakukan koordinasi antar satu sama lain, dengan begitu kepemimpinan dan pengambilan keputusan di dalam lingkungan Badan Penghubung Jawa Barat berjalan dengan budaya musyawarah yang baik.

Adaptasi dan Inovasi Organisasi

Badan Penghubung Pemerintah Jawa Barat merupakan badan daerah

yang kantornya terletak di luar daerah, dengan budaya dan karakteristik daerah yang berbeda tentu Badan Penghubung Jawa Barat mengalami banyak reduksi budaya. Secara alamiah kantor yang terletak di dekat ibu kota tentu berbeda kondisinya dengan kantor daerah yang berada di lingkungan pemerintah daerah, suasanakompetisi dalam menjalankan pemerintahan daerah yang baik terasa lebih kompetitif. Dalam melakukan inovasi Badan Penghubung Pemerintah Jawa Barat berdasarkan pengamatan dan data yang ditemukan oleh peneliti terlihat bahwa sebagian besar kegiatan yang dilakukan ide dan gagasannya berasal dari internal Badan Penghubung Pemerintah Jawa Barat.

KESIMPULAN

Efektivitas Badan Penghubung Pemerintah Jawa Barat dalam membantu memfasilitasi segala urusan pemerintah Jawa Barat dengan pemerintah pusat dapat dikategorikan sangat efektif. Keefektifan tersebut dilihat dari input tugas yang ada seluruhnya dapat diproses dengan cepat oleh Badan Penghubung Pemerintah Jawa Barat. Yang menjadi masalah ialah input tugas yang masuk tersebut sebagian besar hanya berasal dari urusan-urusan umum sedangkan untuk usaha mempercepat pembangunan bangsa belum terlihat adanya perkembangan yang signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat. (1986). Teori Efektivitas Dalam Kinerja Karyawan . Yogyakarta: Gajah Mada University press.
- Kushandajani2018Makna Otonomi Daerah di Wiayah Laut Bagi Masyarakat Pesisir-

cet2semarangFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Siagian, S. P. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
Steers, R. M. (2005). *Manajemen Organisasi Terjemahan Magdalena Jamin*. Jakarta: Erlangga.
Sugiyono, P. D. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Pemerintah Nomor.18 Perangkat Daerah . (2016). Retrieved 7 8,2020,fromBkn.go.id:<https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2016/10/PP-NOMOR-18-TAHUN-2016-PERANGKAT-DAERAH.pdf>
Peraturan Pemerintah Nomor.18 Perangkat Daerah . (2016). Retrieved 7 8, 2020,fromBkn.go.id:<https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2016/10/PP-NOMOR-18-TAHUN-2016-PERANGKAT-DAERAH.pdf>
Badan-penghubung.jabarprov.go.id

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBAYARAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR (PKB) MELALUI E-SAMSAT SELAMA
PANDEMI *COVID-19* DI BAPENDA SULAWESI SELATAN**
*COMMUNITY PARTICIPATION IN PAYING MOTOR VEHICLES TAX (PKB)
THROUGH E-SAMSAT DURING THE COVID-19 PANDEMIC AT BAPENDA
SOUTH SULAWESI*

**Sri Wisdayanti¹, Muthiah Hurmaniah Burhanuddin²,
Iswaningsi Rezki Amaliah³, Hendrawati Hamid⁴**

^{1,2,3}Nindya Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan

⁴Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan

Email: wisdasumardigmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Makassar selama tiga tahun terakhir serta faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 11 Mei sampai 2 Juni 2022. Objek penelitian adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, SAMSAT UPT Makassar, dan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian menunjukkan e-SAMSAT memberi pengaruh terhadap tingkat penerimaan PKB dan kemudahan administrasi bagi masyarakat Kota Makassar. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan SAMSAT mewujudkan produk e-SAMSAT yang mempermudah masyarakat dalam membayar pajak karena menggunakan *full online system* yang kemudian didukung oleh petugas pelayanan e-SAMSAT dalam menyelesaikan implementasi program sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembayaran pajak melalui sistem non-tunai tersebut. E-SAMSAT menstabilkan perekonomian masyarakat melalui sektor Pajak Kendaraan Bermotor semasa pandemi dengan realisasi pajak pada tahun 2020-2021 meningkat sebanyak 3,51% untuk Kota Makassar.

Kata Kunci: E-SAMSAT, Partisipasi Masyarakat, Pajak Kendaraan Bermotor

ABSTRACT

This study aims to analyze public participation in the payment of Motor Vehicle Tax (PKB) in Makassar City for the last three years and the inhibiting factors. This study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques in the form of observation and interviews. This research was conducted from May 11 to June 2, 2022. The object of the research is the Regional Revenue Agency of South Sulawesi Province, SAMSAT UPT Makassar, and motorized vehicle taxpayers. The results showed that e-SAMSAT had an effect on the level of acceptance of PKB and ease of administration for the people of Makassar City. the BOD. E-SAMSAT for the community's economy through the Motor Vehicle Tax sector during the pandemic with tax realization in 2020-2021 increasing by 3.51% for Makassar City.

Keywords: E-SAMSAT, Community Participation, Motor Vehicle Tax.

PENDAHULUAN

Di era digitalisasi seperti saat ini, setiap negara pasti ingin memberikana pelayanan yang baik kepada warga negaranya. Teknologi memberi kemudahan dalam membantuberbagai kegiatan. Arus perkembangan teknologi yang cepat memunculkan istilah baru yaitu *e-government*. Di Indonesia *e-government* di perkenalkan pada tahun 2001 yang dilandasi dari ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah, sehingga dengan kemunculan *e-government* menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menjalankan ketatanegaraan. Peran *e-government* diduga memiliki pengaruh yang kuat dalam berbagai aspek yang mempengaruhi proses pelayanan publik serta mampu mengurangi biaya atas suatu pelayanan. Dalam implementasinya tentu dibutuhkan partisipasi masyarakat. “Partisipasi lebih pada alat sehingga dimaknai partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan, sebagai media penumbuhan kohesifitas antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah juga menggalang tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab pada program yang dilakukan”. (Histiraludin, 2006:39-40). Menurut Hetifa Sj Sumatro (2004) “partisipasi adalah keterlibatan sukarela tanpa tekanan dan jauh dari perintah”. Makna ini menjelaskan bahwa partisipasi adalah keterlibatan sukarela yang dilakukan oleh seseorang atas dasar keinginan pribadi. Keterlibatan tersebut terjadi dikarenakan adanya keinginan untuk ikut serta tanpa adanya paksaan. Dengan begitu *e- government* akan berjalan dengan baik didukung oleh partisipasi masyarakat.

Pendapatan terbesar negara diperoleh melalui pajak salah satunya Pajak Kendaraan Bermotor(PKB). PKB adalah jenis penerimaan dari pajak kendaraan bermotor yang berpotensi besar meningkatkan PAD(Pendapatan Asli Daerah). Namun, dalam pembayaran PKB

banyak mengalami kendala diantaranya banyaknya masyarakat yang menunggak membayar PKB, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar PKB masih rendah, dan keterbatasan masyarakat dalam membayar PKB di masa pandemi *COVID-19*. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut diciptakanlah sistem *e-government* dalam pelayanan pembayaran pajak yang dilakukan secara *online* yakni melalui e-SAMSAT. Salah satu produk *e-government* yakni e-SAMSAT(elektronik Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) . e-SAMSAT Sulawesi Selatan diluncurkan demi memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembayaran secara elektronik atau non tunai pada saat itu. Oleh karena itu, layanan ini diluncurkan untuk membantu dalam memudahkan pendaftaran kendaraan secara *online*, agar dapat dibayar dimana saja dan kapan saja.

Gubernur Sulawesi Selatan memberikan insentif pajak kendaraan bermotor dan insentif bea balik nama kendaraan bermotor untuk masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan agar kewajiban membayar pajak masyarakat menjadi berkurang dan sumber dana masyarakat dapat dimanfaatkan untuk sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi *COVID-19*. Pemberian insentif pajak diatur dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2421/XI/Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan yang ditandatangani di Makassar pada 8 November 2021. Pemberian Insentif pajak mulai berlaku pada tanggal 8 November 2021 dan berakhir pada 30 Desember 2021. Selama pandemi *COVID-19*, jumlah realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Badan Pendapatan Daerah(Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan khususnya Kota Makassar menurun. Penurunan jumlah ini disebabkan banyaknya masyarakat yang wajib pajak menunggak pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

(PKB), yang mengakibatkan adanya penurunan jumlah relasi dari tahun 2019. Jumlah relasi Pada tahun 2019, pajak kendaraan bermotor mencapai Rp. 596.125.944.717,-. pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 3,24% menjadi Rp540.070.537.125,- penurunan ini terjadi disebabkan banyaknya penunggakan pajak akibat pandemi *COVID-19*.

Berdasarkan masalah yang dijabarkan di atas maka kami bermaksud melakukan penelitian ini untuk mengkaji dan memperoleh gambaran mengenai peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembayaran PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) melalui e-SAMSAT dilihat dari realisasi pajak PKB Kota Makassar. Dengan judul penelitian “Partisipasi Masyarakat dalam Pembayaran PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) Melalui e- SAMSAT Selama Pandemi COVID-19 di Bapenda Sulawesi Selatan”. Secara mikro, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif yang digunakan untuk menstabilkan perekonomian. Menurut Ndraha (2003) yang mengatakan ada beberapa unsur penting yang turut mempengaruhi partisipasi masyarakat yakni:

1. Komunikasi yang menumbuhkan pengertian yang efektif dan berhasil.
2. Perubahan sikap tingkah laku yang diakibatkan oleh pengertian yang menumbuhkan kesadaran.
3. Kesadaran yang didasarkan kepada perhitungan dan pertimbangan.
4. Antusiasme yang menimbulkan spontanitas, yaitu kesediaan melakukan sesuatu yang tumbuh dari dalam tubuh sendiri tanpa dipaksa orang lain.
5. Adanya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan bersama.

Dari pernyataan ini dapat mendukung hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan yaitu lewat wawancara dengan hasil bahwa dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Sulsel, tergantung pada kesadaran

masing-masing kita. Kesadaran yang dimaksud disini adalah tidak adanya keberatan atas beban pajak yang ditetapkan, kesediaan dari masyarakat wajib pajak dalam membayar PKB tepat waktu, bersedia menjadi wajib pajak PKB, patuh terhadap peraturan PKB atau pajak kendaraan bermotor yang telah ditetapkan, serta adanya perasaan ikut bertanggung jawab untuk melancarkan pembangunan. Sosialisasi Perpajakan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pentingnya sosialisasi memberikan pengertian kepada masyarakat dalam membayar pajak, dengan adanya sosialisasi perpajakan, masyarakat menjadi mengerti dan paham mengenai manfaat membayar pajak (Winerungan, 2013).

Kurangnya pengetahuan dan wawasan karena rendahnya sosialisasi perpajakan akan menyebabkan mereka tidak memahami bagaimana cara melaksanakan kewajiban perpajakan dan pada akhirnya tidak melaksanakan kewajiban itu, dan hal tersebut berdampak pada penerimaan pajak Negara (Herryanto dan Toly, 2013). Dua Pernyataan ini dapat menjadi acuan bagi kamisebagai peneliti untuk mengambil suatu kesimpulan dari hasil penelitian diatas bahwa tinggi rendahnya kesadaran atau partisipasi masyarakat yang merupakan wajib pajak kendaraan di Kantor BadanPendapatan Daerah Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh minimnya sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak Samsat Kota Makassar. Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan, dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak. Disamping itu juga, memudahkan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, memahami kebutuhan wajib pajak, tersedianya fasilitas fisik termasuk sarana

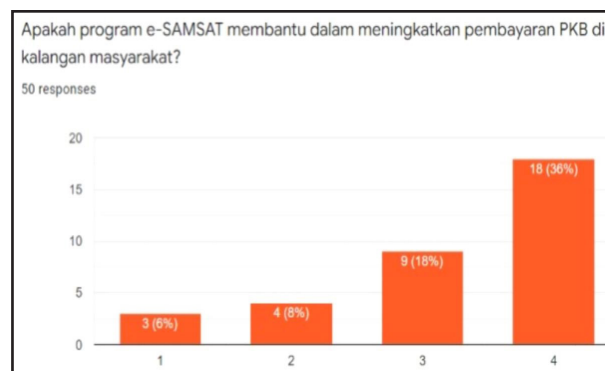
- a. Komunikasi yang menumbuhkan pengertian yang efektif dan berhasil.
- b. Perubahan sikap tingkah laku yang diakibatkan oleh pengertian yang menumbuhkembangkan kesadaran.
- c. Kesadaran yang didasarkan kepada perhitungan dan pertimbangan.
- d. Antusiasme yang menimbulkan spontanitas, yaitu kesediaan melakukan sesuatu yang tumbuh dari dalam tubuh sendiri tanpa dipaksa orang lain.
- e. Adanya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan bersama.

Dari pernyataan ini dapat mendukung hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan yaitu lewat wawancara dengan hasil bahwa dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Sulsel, tergantung pada kesadaran masing-masing kita. Kesadaran yang dimaksud disini adalah tidak adanya keberatan atas beban pajak yang ditetapkan, kesediaan dari masyarakat wajib pajak dalam membayar PKB tepat waktu, bersedia menjadi wajib pajak PKB, patuh terhadap peraturan PKB atau pajak kendaraan bermotor yang telah ditetapkan, serta adanya perasaan ikut bertanggung jawab untuk melancarkan pembangunan.

Menurut Andi Satriady Sakka, S.STP (Plt.Sekretaris Bapenda), “ E-SAMSAT merupakan inovasi dari Bapenda Sulsel dimana aplikasi ini memberikan kemudahan dan efisiensi waktu bagi masyarakat Sulsel sebagai wajib pajak yg mempermudah untuk membayar pajak kendaraan bermotornya, e-SAMSAT memberikan dampak dan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat Sulsel khusus bagi pemerintah Provinsi Sulsel karena memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak kendaraan bermotor tersebut, terutama di era pandemi *Covid-19* dimana masyarakat memiliki keterbatasan waktu & kesempatan untuk menunaikan kewajibannya

membayar pajak kendaraan bermotornya. Dengan adanya aplikasi tersebut masyarakat Sulsel cukup memanfaatkan kapan pun dan dimana pun berada dapat membayar pajak kendaraan bermotornya sehingga dengan adanya e- SAMSAT masyarakat Sulsel tidak perlu lagi datang ke Kantor Samsat untuk mengantri karena cukup membayar pajak kendaraan bermotor dari *smartphone*-nya”. Sedangkan menurut Sri Handayani Munarni, SE (Bendahara Bapenda), “E-SAMSAT merupakan program pembayaran pajak yang bisa mempermudah untuk membayar pajak kapanpun dan dimanapun melalui sistem online, contohnya pembayaran melalui Tokopedia, Indomaret, dan M-banking”. Berdasarkan hasil wawancara dapat dikemukakan bahwa dengan adanya e-SAMSAT dapat menstabilkan dan bahkan meningkatkan pendapatan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor).

Persentase Pengguna E-SAMSAT



Gambar 2. Arsip Dokumen Diagram Batang Persentase Pengguna e-SAMSAT

Sumber : docs.google.com/forms/d/1-DE6mA41vZII16WiZYRB00kA0C5Iqm-KAGxmME3E/editresponses

Dari diagram batang di atas, terdapat 50 respon yang memberikan pendapatnya dari 4 pilihan yaitu 1) sangat tidak setuju; 2) tidak setuju; 3) setuju; 4) sangat setuju. Melalui dokumen arsip tersebut dapat diketahui

sebanyak 36% yang sangat setuju dan 18% yang setuju dalam mendukung program e-SAMSAT yang sangat membantu dalam meningkatkan pembayar PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) di kalangan masyarakat. Lebih dari 50% masyarakat setuju melakukan pembayaran non-tunai melalui e-SAMSAT. Oleh karena itu dapat dikatakan e-SAMSAT merupakan jenis aplikasi yang disenangi oleh masyarakat dalam membayar pajak.

Tabel 1. Jumlah Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2019-2021

NO	TAHUN	JUMLAH REALISASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)
1	2019	Rp 596.125.944.717
2	2020	Rp 540.070.537.125
3	2021	Rp 601.005.449.427
	TOTAL	Rp 1.737.201.931.269

Sumber: Data Primer

Hasil dari Pemberian Insentif Pajak dan e-SAMSAT adalah memberikan keringanan dan pembebasan wajib pajak sehingga dapat membangkitkan perekonomian masyarakat selama pandemi COVID-19. Berdasarkan pasal 74 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, pemberian insentif pajak berupa keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak merupakan kewenangan gubernur. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Selatan pada hari Selasa, 9 November 2021 menghimbau masyarakat memanfaatkan insentif pajak atau penghapusan denda pajak kendaraan ini dengan segera membayar pajak kendaraan melalui e-SAMSAT. Jika wajib pajak masih juga tidak membayar pajak hingga 30 Desember 2021, akan dikenakan denda

sebesar 2% perbulan yang ditetapkan dari nilai pokok pajak. Aplikasi e-SAMSAT dapat didownload melalui *playstore (android)* dan *appstore (ios)*. Aplikasi ini menggunakan *full online system* dan proses yang cepat sehingga masyarakat tidak perlu datang ke kantor pajak dan hanya melakukan pembayaran PKB di rumah. Dengan adanya aplikasi e-SAMSAT meningkatkan pendapatan PKB di masa pandemi dilihat pada rentan waktu 2020-2021 mengalami kenaikan sebanyak 3,51%.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Penyebab turunnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Bapenda Sulsel selama pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut a) banyaknya masyarakat yang menunggak membayar PKB (Pajak Kendaraan Bermotor); b) tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar PKB masih rendah; c) keterbatasan masyarakat dalam membayar PKB di masa pandemi COVID-19. Solusi yang dapat dilakukan dalam peningkatan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) adalah a) Melakukan sosialisasi perpajakan dengan memperkenalkan e-SAMSAT kepada masyarakat luas, b) Mengoptimalkan penggunaan aplikasi e-SAMSAT bagi masyarakat umum dengan mengedepankan pembayaran non-tunai dalam pembayaran pajak ; c) mengoptimalkan bagian pelayanan samsat di setiap kota/kabupaten sehingga masyarakat tidak menunggak untuk membayar pajak. Selanjutnya untuk menstabilkan kembali PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) di Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan di masa pandemi disarankan supaya dapat membantu masyarakat dalam mengaplikasikan e-SAMSAT terutama para orang tua yang berusia 50 tahun keatas dengan membantu mengunduh e-SAMSAT melalui Appstore atau playstore dan membuat inovasi baru agar masyarakat dengan senang hati

membayar pajak misalnya membuat *events* yang menarik perhatian masyarakat. Kemudian untuk menstabilkan kondisi menurunnya PKB sebaiknya pemerintah membuat suatu kebijakan dengan memberikan insentif pajak selama masa pandemi sehingga tidak memberatkan masyarakat dalam membayar pajak dan dendanya.

DAFTAR PUSTAKA

Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Ndraha, Taliziduhu. (2003). Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru). (1), Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 15 September 2009. Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.

Bapenda Sulsel.2019.E-Samsat SULSEL. Diakses dari <https://bapendasulsel.web.id>

Redaksi. (2021). Mengenal E-Samsat, Cara Mudah Bayar Pajak Kendaraan Bermotor. Dari <https://www.mediasulsel.com/mengenal-e-samsat-sulsel-cara-mudah-bayar-pajak-kendaraan-bermotor/>

PANDUAN PENULISAN ARTIKEL PADA JURNAL PALLANGGA PRAJA

Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris dengan format esai. Judul artikel dicetak dengan huruf kapital semua pada posisi Center Text dengan huruf Times New Roman, ukuran 14 pont.

Nama penulis artikel dicantumkan tanpa gelar akademik, disertai nama dan alamat lembaga asal dan ditempatkan di bawah judul artikel. Dalam hal naskah ditulis oleh Tim, penyunting berhubungan dengan penulis utama. Penulis harus mencantumkan *e-mail*.

ABTSRAK. Abstrak dan kata kunci ditulis dalam dua bahasa (Indonesia dan Inggris). Panjang abstrak maksimum 200 kata, jumlah kata kunci 3-4 kata atau gabungan kata. Abstrak berisi tujuan, metode, dan hasil penelitian. Kata kunci dipisahkan dengan semi colon (;).

Sistematika artikel hasil penelitian adalah judul; nama penulis (tanpa gelar akademik), abstrak, kata kunci, pendahuluan (dengan judul), metode (dengan judul), hasil dan pembahasan (dengan judul), simpulan (dengan judul), daftar pustaka.

PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan, penulis harus menuliskan tujuan penelitian di bagian akhir pendahuluan. Penulis harus menuliskan secara berurutan latar belakang, kajian literatur terdahulu (state of the art) sebagai dasar pernyataan kebaruan ilmiah dari artikel, pernyataan kebaruan ilmiah, permasalahan penelitian, “gap analysis” dan hipotesis (bila penelitian kuantitatif). Di dalam pendahuluan tidak diperkenankan adanya tinjauan pustaka yang terpisah dalam sub judul tersendiri sebagaimana pada laporan penelitian, tetapi dituliskan terintegrasi dengan penjelasan mengenai latar belakang penelitian sehingga kajian literatur tersebut dapat menunjukkan kebaruan temuan ilmiah.

METODE

Metode berisi penjelasan tentang jenis penelitian/desain penelitian yang digunakan. Bagian ini menjelaskan tentang jumlah, subjek dan karakteristik subjek penelitian. Pada pendekatan kuantitatif, jika menggunakan instrumen penelitian/alat ukur tertentu, jumlah butir instrument, validitas, koefisien reliabilitas, serta menjelaskan prosedur analisis data yang digunakan. Jika pendekatan kualitatif, perlu menjelaskan perspektif kualitatif yang digunakan, hingga metode pengambilan data dan analisis data yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil dan pembahasan berisi hasil-hasil temuan penelitian dan pembahasannya secara ilmiah. Tuliskan temuan-temuan ilmiah yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Temuan-temuan ilmiah tersebut harus ditunjang oleh data yang memadai. Temuan ilmiah yang dimaksud di sini adalah bukan data-data hasil penelitian yang diperoleh. Temuan-temuan ilmiah tersebut harus dijelaskan secara saintifik meliputi: apakah temuan ilmiah yang diperoleh berdasarkan data di lapangan? Mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa *trend* variabel seperti itu? Semua pertanyaan tersebut harus dijelaskan secara ilmiah, tidak hanya deskriptif, dan ditunjang oleh data empiris yang memadai. Selain itu, perlu juga menjelaskannya dengan membandingkan hasil-hasil para peneliti terdahulu yang relevan topiknya. Temuan-temuan penelitian harus bisa menjawab hipotesis dan/atau pertanyaan penelitian di bagian pendahuluan.

SIMPULAN

Bagian simpulan terdiri dari satu paragraph saja namun menggambarkan jawaban dari hipotesis dan/atau tujuan penelitian. Simpulan bukan berisi perulangan dari hasil dan pembahasan, tetapi lebih kepada ringkasan hasil temuan seperti yang diharapkan di tujuan penelitian. Bila perlu dibagian akhir simpulan dapat juga dituliskan hal-hal yang akan dilakukan terkait dengan gagasan selanjutnya dari penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian daftar pustaka harus berisi semua referensi yang dikutip/disitasi dalam naskah artikel harus dicantumkan dalam bagian Daftar Pustaka. Daftar pustaka harus berisi pustaka-pustaka acuan yang berasal dari jurnal ilmiah atau buku-buku ilmiah termasuk dari laporan hasil penelitian seperti skripsi, tesis, ataupun disertasi. Jumlah referensi yang disitasi minimal 15 (limabelas) sumber pustaka. Format penulisan yang digunakan adalah: Nama pengarang. Tahun. Judul Buku. Kota Terbit. Nama Penerbit.

PERNYATAAN KEASLIAN ARTIKEL

Penulis diharuskan mengisi pernyataan tentang *keaslian* dari karya tulisnya dan belum pernah *dipublikasikan* di jurnal/media apapun.

PENERBITAN ARTIKEL

Jurnal Pallangga Praja ini terbit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu pada bulan April dan Oktober tahun berjalan. Untuk setiap kali terbit dapat memuat paling banyak dalam 8 (delapan) judul tulisan. Tulisan artikel paling lambat diterima pada 31 Maret untuk penerbitan pertama dan 30 September untuk penerbitan kedua. Sebelum diterbitkan akan dilakukan pemeriksaan atau penyuntingan artikel oleh penyunting (editor). Segala sesuatu yang menyangkut perizinan pengutipan untuk pembuatan naskah atau ihwal lain yang terkait dengan HAKI yang dilakukan oleh penulis artikel, berikut konsekwensi hukum yang mungkin timbul karenanya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis artikel tersebut. Artikel yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan kepada penulis kecuali atas permintaan penulis.

BIAYA

Biaya penerbitan artikel sepenuhnya ditanggung oleh DIPA Kampus IPDN Sulawesi Selatan. Setiap artikel yang dimuat akan diberikan reward kepada penulisnya sesuai kemampuan keuangan Kampus IPDN Sulawesi Selatan.

Kata-Kata Bijak

“Hidup adalah tantangan.
Jangan dengarkan omongan orang. Yang penting kerja,
kerja, kerja.”

Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia)

“Lulusan IPDN selain menjadi motor penggerak pemerintahan
juga harus menjadi seorang ilmuwan atau scientist.
Seperti kata ilmuwan Joseph Stycos, “*If theory without policy is for academics,
then policy without theory is for gamblers*”

Muhammad Tito Karnavian (Menteri Dalam Negeri)

Kampus IPDN di Daerah
Memperkuat
Wawasan Nusantara

Hadi Prabowo (Rektor IPDN)

Taro Ada Taro Gau
Satunya Kata dengan Perbuatan
(Local Wisdom Sulawesi Selatan)